

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---



**OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR  
SECARA TERPADU BERBASIS KONSEP EKONOMI BIRU  
GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN NELAYAN  
DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL**

Oleh

**SISWANTO, S.T., M.T.**

**KOLONEL LAUT (T) NRP 11926/P**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)  
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXV**

**LEMHANNAS RI**

**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan tugas penulisan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: "**Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Secara Terpadu Berbasis Konsep Ekonomi Biru Guna Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Dalam Rangka Ketahanan Nasional**"

Penulisan Taskap ini merupakan salah tugas dalam menyelesaikan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV Lemhannas RI Tahun 2023, berdasarkan Keputusan Gubernur Lemhannas Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LXV Tahun 2023 Lemhannas RI tanggal 27 Maret 2023.

Dalam penulisan Taskap ini, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXV Lemhannas RI pada tahun 2023. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Pembimbing Taskap, Dr. Djoharis Lubis, M.Sc. yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga dalam penulisan Taskap ini. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Penguji, Rekan-Rekan PPRA LXV, serta semua pihak yang telah memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Taskap ini.

Tak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga, khususnya istri dan anak-anakku tercinta yang selalu berdoa dan memotivasi agar penulis dapat menyelesaikan tugas belajar dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati

mohon adanya saran masukan dari semua pihak guna penyempurnaan penulisan naskah ini.

Semoga Taskap ini dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, Pemerintah Republik Indonesia khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan berkah dan bimbingan-Nya kepada kita, dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan. Amin YRA.

Sekian dan terima kasih,  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Agustus 2023

Penulis,



Siswanto, S.T., M.T.

Kolonel Laut (T) NRP 11926/P



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siswanto, S.T., M.T.  
Pangkat : Kolonel Laut (T) NRP 11926/P  
Jabatan : Perwira Staf Ahli E Teknologi Logistik, Koarmada II  
Instansi : TNI AL  
Alamat : Taman Aloha H-1/2, Sidoarjo

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXV tahun 2023 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia untuk dibatalkan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, Agustus 2023

Penulis,


Siswanto, S.T., M.T.

Kolonel Laut (T) NRP 11926/P

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIC INDONESIA

---

**DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GRAFIK.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah.....	8
3. Maksud dan Tujuan.....	8
4. Ruang Lingkup dan Sistematika.....	8
5. Metode dan Pendekatan .....	10
6. Pengertian .....	10
<b>BAB II LANDASAN PEMIKIRAN</b> .....	<b>13</b>
7. Umum .....	13
8. Peraturan Perundangan-Undangan .....	13
9. Data dan Fakta .....	15
10. Kerangka Teoritis .....	29
11. Lingkungan Strategis.....	34
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	<b>38</b>
12. Umum .....	38
13. Akar Permasalahan dan Akibat Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Secara Terpadu Berbasis	

	Konsep Ekonomi Biru Guna Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Dalam Rangka Ketahanan Nasional.....	38
14.	Anatomi Permasalahan Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Secara Terpadu Berbasis Konsep Ekonomi Biru Guna Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Dalam Rangka Ketahanan Nasional... ..	61
15.	Strategi Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Secara Terpadu Berbasis Konsep Ekonomi Biru Guna Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Dalam Rangka Ketahanan Nasional .....	81
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	86
16.	Simpulan.....	86
17.	Rekomendasi.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	91
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	:	
LAMPIRAN I	: ALUR PIKIR	
LAMPIRAN II	: INDEKS KETAHANAN NASIONAL VARIABEL GATRA EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA TAHUN 2021-2022	
LAMPIRAN III	: PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PROGRAM-PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
LAMPIRAN IV	: STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2021-2022	
LAMPIRAN V	: STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2021-2022	
LAMPIRAN VI	: KONDISI SEKOLAH TERAKREDITASI B DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023	
LAMPIRAN VII	: <i>GRAND DESIGN</i> PROGRAM NASIONAL TERPADU PEMBERDAYAAN DESA PESISIR (PANDU DAYA DESIR)	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

**DAFTAR TABEL**

- TABEL 1. INDEK KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2021-2022
- TABEL 2. JUMLAH NELAYAN MENURUT SUB SEKTOR PERIKANAN TANGKAP
- TABEL 3. TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DI BEBERAPA KABUPATEN/KOTA PESISIR
- TABEL 4. JUMLAH KAPAL PERIKANAN LAUT MENURUT KATEGORI DAN UKURAN
- TABEL 5. TEMUAN DAN PENANGANAN KASUS *DESTRUCTIVE FISHING* DI INDONESIA TAHUN 2013-2019
- TABEL 6. JENIS IKAN DENGAN TINGKAT PEMANFAATAN *OVER-EXPLOITED*



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIC INDONESIA

---

### DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 1. KETERSEDIAAN GURU ASN DI SATUAN PENDIDIKAN NEGERI  
TAHUN 2019

GRAFIK 2. NILAI UJI KOMPETENSI GURU TAHUN 2019

GRAFIK 3. NTN NELAYAN DI INDONESIA PERIODE 2016-2021



## DAFTAR GAMBAR

- GAMBAR 1. SEBARAN PELABUHAN PERIKANAN BERDASARKAN PULAU DAN KLASIFIKASI
- GAMBAR 2. KONDISI MANGROVE INDONESIA TAHUN 2021
- GAMBAR 3. PROYEKSI TINGKAT PRODUKSI KOMODITAS UTAMA PER WPP 2020-2024
- GAMBAR 4. KONDISI PELABUHAN PERIKANAN KARANGANYAR KABUPATEN REMBANG



**OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR  
SECARA TERPADU BERBASIS KONSEP EKONOMI BIRU  
GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN NELAYAN  
DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang.**

Indonesia menetapkan kebijakan dalam pembangunan ekonomi dengan menerapkan konsep ekonomi biru. Indonesia melanjutkan kebijakan tersebut, antara lain melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Kelautan pada tahun 2014. Pada Undang-Undang ini menjelaskan bahwa *“ekonomi biru adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan pengelolaan kelautan berkelanjutan serta konservasi laut dan sumber daya pesisir beserta ekosistemnya dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip antara lain keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah, dan nilai tambah ganda (multiple revenue)”*<sup>1</sup>.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki 17.504 buah pulau dengan garis pantai sepanjang 108.000 kilometer<sup>2</sup>. Sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan yang wilayahnya terbentang seluas 6.400.000 kilometer persegi<sup>3</sup>. Kondisi kelautan yang demikian menjadikan Indonesia memiliki sumber daya kelautan yang sangat besar dan beragam. Di dalam laut Indonesia dapat ditemukan ikan dengan beragam jenis dan ukuran, terumbu karang yang indah dan bervariasi, minyak bumi, gas alam, serta sumber daya laut non-hayati seperti garam, rumput laut, krustasea, dan lain-lain. Gugusan pulau Indonesia pun memiliki daya tarik wisata bahari yang luar biasa. Hamparan air laut yang jernih, karang yang beraneka ragam, dan pemandangan laut yang spektakuler banyak ditemui di wilayah pesisir Indonesia sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

---

<sup>1</sup> Sekretariat Negara.(2014).Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

<sup>2</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan.(2023). Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2022. Volume 1 Tahun 2022.

<sup>3</sup> Ibid. hal 10.

Kekayaan laut Indonesia merupakan penopang bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan demikian, maka memerlukan pengelolaan sumber daya alam laut yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Pengelolaan kekayaan alam laut harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun demikian, pengelolaan dan pemanfaatan sumber kekayaan laut Indonesia belum secara optimal meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sampai dengan tahun 2021, kekayaan laut Indonesia baru dapat dimanfaatkan sekitar 25 persen dari total potensinya<sup>4</sup>. Tidak mengherankan jika sektor kelautan memberikan kontribusi yang minim terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. Pada sub-sektor perikanan misalnya, pada tahun 2021 hanya mampu memproduksi ikan sebesar Rp. 395,4 triliun atau memberikan kontribusi pada PDB sebesar 2,77 persen<sup>5</sup>. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menyatakan bahwa kontribusi ekonomi PDB dari sektor kelautan dan perikanan masih sangat kecil, yaitu hanya 2,8 persen (22 Januari 2022)<sup>6</sup>. Melihat fakta dan data ini, maka memerlukan langkah-langkah serius dalam pengelolaan kekayaan laut Indonesia sehingga memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian bangsa.

Dalam paradigma pembangunan yang baru, pemberdayaan masyarakat menjadi suatu kebutuhan yang tidak terpisahkan dalam setiap proses pembangunan yang berfokus pada kepentingan rakyat, partisipatif masyarakat, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengambil peran aktif dalam pembangunan, serta meningkatkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan dan pemanfaatan sumber kekayaan alam yang tersedia. Melalui pemberdayaan masyarakat, diharapkan masyarakat bisa lebih memahami dan mengambil bagian dalam pembangunan yang berkelanjutan, sehingga dapat tercipta kemajuan yang berkesinambungan dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat.

---

<sup>4</sup> Keliat, Makmur, et.al.(2022).Prospek Ekonomi Biru Bagi Pemulihan Ekonomi Indonesia. LAB 45 Monograf. Jakarta: Laboratorium Indonesia 2045. hal 2.

<sup>5</sup> KKP.(2022).Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2022. Volume 1 Tahun 2022. hal 13.

<sup>6</sup> Hendra, S.(2022).Mendongkrak Kontribusi PDB Perikanan. <http://www.kompas.id>, diakses pada tanggal 5 April 2022, pukul 08.52 Wib.

Terkait dengan pembangunan di bidang kelautan, maka pemberdayaan masyarakat pesisir menjadi upaya strategis guna mendukung pengelolaan potensi kekayaan laut Indonesia dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Ada tiga aspek penting yang perlu diperdagakan pada setiap proses pemberdayaan masyarakat, yaitu pemberdayaan manusia, usaha, dan lingkungan yang oleh Sumadyo (2001), disebutnya dengan Tri Bina (Tri Daya)<sup>7</sup>. Pemberdayaan masyarakat pesisir dapat ditinjau dari ketiga lingkup tersebut di atas, yang saat ini memang belum optimal, ditandai hal-hal sebagai berikut:

a. Pemberdayaan manusianya.

1) Pendidikannya. Pendidikan mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat pesisir karena dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi kesenjangan sosial serta ekonomi. Pendidikan juga berkontribusi meningkatkan produktivitas dan inovasi dalam berbagai sektor, termasuk sektor kelautan. Namun, pendidikan sebagian besar masyarakat pesisir hanya lulusan pendidikan sekolah dasar (SD) atau bahkan tidak bersekolah<sup>8</sup>. Hal ini menyebabkan tingkat kesadaran masyarakat nelayan terhadap pendidikan anak-anak mereka juga masih rendah, hal ini ditandai dengan kecenderungan orang tua yang membiarkan anak-anak mereka ikut bekerja di laut untuk mencari nafkah daripada pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu<sup>9</sup>.

2) Kesehatannya. Begitu pula dengan kesehatan, merupakan hal penting bagi masyarakat karena kesehatan yang optimal dapat meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas nelayan. Ketika seseorang sehat, ia dapat melakukan berbagai aktivitas dengan lebih optimal dan memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap berbagai penyakit. Masyarakat yang sehat dapat memperkuat tenaga kerja dan mengurangi biaya kesehatan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah

---

<sup>7</sup> Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato.(2019).Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik.Bandung: Alfabeta.hal 113.

<sup>8</sup> Heru,H.(2023).Angka Kemiskinan di Wilayah Pesisir Lebih Tinggi dan Kompleks, Upaya Pemerintah?, <https://kbr.id/nasional/122021/>, diakses pada tanggal 5 Maret 2023, pukul 18.04 Wib.

<sup>9</sup> Siregar.(2016).Kesadaran Masyarakat Nelayan terhadap Pendidikan Anak. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Vol 4 (1). hal 1-10.

dan individu. Namun, kondisi kesehatan dan akses layanan kesehatan masyarakat pesisir saat ini masih rendah. Kepedulian masyarakat terhadap kesehatan lingkungannya juga masih rendah<sup>10</sup>. Sehingga masih banyak ditemukan penyakit menular.

3) Pendapatannya. Pendapatan nelayan dapat dilihat dari Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang pada mencapai sebesar 106,46 pada tahun 2022<sup>11</sup>. Nilai ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan riil masyarakat pesisir, dan kenyataannya masih banyak masyarakat pesisir yang hidup dalam kondisi miskin.

b. Pemberdayaan usahanya.

1) Permodalan. Permodalan sangat diperlukan untuk mengembangkan usaha masyarakat nelayan. Namun, usaha-usaha masyarakat nelayan masih mengalami kesulitan dalam memperoleh modal usaha. Ketidakmampuan masyarakat nelayan memberikan jaminan membuat sulit bagi mereka untuk mendapatkan pinjaman sesuai kebutuhan. Selain itu, lembaga keuangan kurang percaya dan enggan memberikan pinjaman keuangan karena para nelayan tidak memiliki keahlian dalam menyusun laporan keuangan dan lemahnya keahlian menyusun proposal. Sehingga beberapa lembaga keuangan memberikan bunga tinggi sebagai bentuk kompensasi atas resiko yang akan dialami oleh lembaga keuangan.

2) Teknologi. Teknologi yang digunakan pada proses usaha masyarakat nelayan masih tradisional, sehingga kurang efektif dan efisien, serta menghasilkan produk kurang berkualitas di pasar. Akibatnya, usaha masyarakat nelayan kurang bisa bersaing di pasar. Masyarakat nelayan belum menggunakan teknologi modern dalam proses produksinya dapat disebabkan oleh finansial yang terbatas, kurangnya pemahaman tentang pentingnya teknologi untuk bisnis

---

<sup>10</sup> Loc. Cit.

<sup>11</sup> Direktur Jenderal Penangkapan Ikan.(2023).Refleksi 2022 & Outlook 2023. Kementerian Kelautan dan Perikanan.

meraka, dan kendala tradisi di masyarakat yang lebih suka dengan teknologi tradisional yang diperoleh secara turun-temurun.

3) Akses Pemasaran. Pemasaran hasil usaha nelayan saat ini belum berdaya guna dan berhasil guna sehingga tidak ada jaminan pasar dan harga, serta minimnya pelatihan tentang kualitas produk<sup>12</sup>. Saat ini, daya saing produk usaha nelayan masih rendah sehingga menurunkan pendapatan yang nelayan.

c. Pemberdayaan lingkungannya.

1) *Destructive fishing*. Konsep pengelolaan sumber daya ikan yaitu pengelolaan berbasis konsep ekonomi biru. Namun saat ini, masih ditemukan pelanggaran penangkapan ikan secara merusak (*destructive fishing*) oleh nelayan dalam jumlah kasus yang tinggi<sup>13</sup>.

2) *Over fishing*. Kegiatan penangkapan ikan yang berlebihan menjadi masalah yang sering terjadi di Indonesia. Misalnya, terdapat 7 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Indonesia, dimana ikan Kerapu yang telah mengalami *over-exploited*<sup>14</sup>.

3) Kerusakan mangrove. Masih adanya kerusakan hutan mangrove di Indonesia terjadi terutama karena lahan yang sebelumnya digunakan untuk hutan mangrove dikonversi menjadi lahan untuk budidaya perikanan dan pertambakan yang berdampak buruk pada lingkungan.

Melihat fenomena diatas, maka perlu langkah-langkah pemberdayaan masyarakat pesisir dengan melibatkan pihak-pihak terkait sehingga lebih efektif dan efisien. Sesuai yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi *leading* sektor dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan masyarakat pesisir harus dilaksanakan dengan prinsip keterpaduan antar

<sup>12</sup> I Nengah, P.W.(2023).Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pendekatan Pengembangan Usaha Perikanan. Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan, Edisi Khusus 2023. hal 91-95.

<sup>13</sup> Penjaga Laut.(2021).Mengapa Destructive Fishing Marak Terjadi di Laut Indonesia. <http://jagalaut.id/>, diakses pada tanggal 5 Maret 2023, pukul 16.05 Wib.

<sup>14</sup> Fika,N.U.(2021).Banyak Ikan Ditangkap Berlebihan, Komnas Kajiskan Minta Pemerintah Andalkan Data Stok. <http://money.kompas.com>, diakses pada tanggal 5 Maret 2023, pukul 17.00 Wib.

instansi/lembaga terkait. Namun demikian, saat ini terdapat program-program pemberdayaan dari instansi/lembaga lain yang tumpang tindih kegiatan sehingga kurang memberikan hasil yang optimal, antara lain:

- a. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PMP-PPK), dilaksanakan oleh KKP mulai tahun 2015 sampai dengan saat ini<sup>15</sup>.
- b. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Nasional (PNPM) Mandiri Pedesaan Perkotaan, dilaksanakan oleh KemenDes PDTT, mulai tahun 2021 sampai dengan saat ini. Program ini kemudian bertransformasi menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)<sup>16</sup>.
- c. Program Keluarga Harapan (PKH), dilaksanakan oleh Kemensos, mulai tahun 2018 sampai dengan saat ini<sup>17</sup>.
- d. Program Kampung Nelayan Maju (Kalaju), dilaksanakan oleh KKP, mulai tahun 2021 sampai dengan saat ini<sup>18</sup>.
- e. Program Kampung Bahari Nasional (KBN), dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut, mulai tahun 2018 sampai dengan saat ini<sup>19</sup>.
- f. Program Pelayanan Kesehatan di Wilayah Terpencil dan Perbatasan, dilaksanakan oleh Kemenkes, mulai tahun 2015 sampai dengan saat ini<sup>20</sup>.

Berdasarkan kondisi pemberdayaan masyarakat pesisir dan program-program pemberdayaan yang ada saat ini, dapat dilihat bahwa:

- a. Pemberdayaan masyarakat pesisir masih belum dilaksanakan secara optimal dengan beberapa fenomena yang telah diuraikan di atas. Sehingga akar permasalahan yang menjadi penyebabnya, memerlukan solusi

<sup>15</sup> KKP.(2020).Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Sebagai Sistem Pertahanan Negara. <http://kkp.go.id>, diakses pada tanggal 09 Mei 2023, pukul 21.52 Wib.

<sup>16</sup> KemendesPDTT.(2021).Bumdesa Bersama Selamatkan Aset Rp. 12,7 Triliun Dana Eks PNPM. <https://kemendes.go.id/berita/view/detail/4046/>, diakses pada tanggal 09 Mei 2023, pukul 22.01 Wib.

<sup>17</sup> Kemensos.(2018).Peraturan Menteri Sosisl RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harap (PKH).

<sup>18</sup> KKP.(2022).Verifikasi Kampung Nelayan Maju. <https://kkp.go.id/> , diakses pada tanggal 10 Mei 2023, pukul 04.07 Wib.

<sup>19</sup> Muhammad,N.S.(2021).KKP: Program Kampung Bahari Sejahteraan Masyarakat Pesisir. <https://ekonomi.republik.co.id>, diakses pada tanggal 10 Mei 2023, pukul 03.57 Wib.

<sup>20</sup> Kemenkes.(2015).Permenkes RI Nomor 90 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil.

pemecahan dengan mempertimbangkan aspek politik, ekonomi, sosial dan teknologi.

b. Pemberdayaan masyarakat masih terkotak-kotak, parsial, belum terpadu sehingga tidak memperoleh hasil yang optimal. Sehingga diperlukan keterpaduan strategi yang terkoordinir, sistematis, terukur, komprehensif dan berkesinambungan.

c. Adanya tumpang tindih program antara satu program pemberdayaan dengan program pemberdayaan lainnya.

d. Potensi ekonomi biru Indonesia yang besar belum mampu diterjemahkan ke dalam operasionalisasi kegiatan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jika persoalan-persoalan pemberdayaan masyarakat pesisir seperti yang diuraikan sebelumnya tidak diatasi, akan berimplikasi pada masyarakat tidak sepenuhnya bisa menikmati hasil pengelolaan potensi sumber daya laut berbasis konsep ekonomi biru. Dengan kata lain, kesejahteraan nelayan masih jauh dari harapan. Kondisi tersebut berdasarkan data jumlah penduduk pada Maret 2022 bahwa masih ada sebesar 9,54% (26,16 juta jiwa) penduduk yang miskin. Angka tersebut meliputi kemiskinan di kota sebesar 11,82% (11,82 juta jiwa) dan di perdesaan sebesar 14,34% (14,34 juta jiwa)<sup>21</sup>. Selain itu, kemiskinan masyarakat pesisir dapat dilihat dari tingkat kemiskinan ekstrem, dimana masyarakat nelayan pun belum seluruhnya sejahtera. Kondisi tersebut didukung oleh pernyataan Wakil Presiden RI, Bapak Ma'ruf Amin bahwa dari jumlah kemiskinan ekstrem di Indonesia di tahun 2022, sebanyak 12,5% (1,3 juta jiwa) di antaranya berada di wilayah pesisir dan mereka mempunyai masalah yang kompleks<sup>22</sup>.

Berdasarkan persoalan-persoalan pemberdayaan masyarakat pesisir seperti diuraikan sebelumnya, maka diperlukan optimalisasi pemberdayaan masyarakat pesisir dari perspektif manusianya, usahanya, dan lingkungannya secara terpadu berbasis konsep ekonomi biru. Alternatifnya, dengan menyusun program pembangunan desa pesisir secara terpadu. Diawali dengan menyinergikan program-program pemberdayaan masyarakat pesisir yang saat ini sudah ada.

<sup>21</sup> Novia, D.S., et.al.(2022).Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia. BPS.

<sup>22</sup> Heru, H.(2023).Angka Kemiskinan di Wilayah Pesisir Lebih Tinggi dan Kompleks. Upaya Pemerintah? <http://kbr.id/nasional/122021/>, diakses pada tanggal 6 Februari 2023, pukul 20.05 Wib.

Selanjutnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan, meningkatkan usaha perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip berkelanjutan. Diharapkan program tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan yang memadai. Serta meningkatnya pendapatan guna memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder lainnya. Tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan yang tinggi tentu akan memberikan dampak pada meningkatnya tabungan masyarakat serta investasi, dan pada gilirannya meningkatkan ketahanan ekonomi nasional yang tangguh.

## 2. Rumusan Masalah.

Perumusan masalah dari Taskap ini sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya adalah **"bagaimana optimalisasi pemberdayaan masyarakat pesisir secara terpadu berbasis konsep ekonomi biru guna meningkatkan kesejahteraan nelayan dalam rangka ketahanan nasional"**. Selanjutnya, dari rumusan masalah tersebut, terdapat tiga pertanyaan kajian yang dapat diuraikan, sebagai berikut:

- a. Bagaimana akar permasalahan dan akibat belum optimalnya pemberdayaan masyarakat pesisir secara terpadu berbasis konsep ekonomi biru guna meningkatkan kesejahteraan nelayan dalam rangka ketahanan nasional?
- b. Bagaimana anatomi permasalahan belum optimalnya pemberdayaan masyarakat pesisir secara terpadu berbasis konsep ekonomi biru guna meningkatkan kesejahteraan nelayan dalam rangka ketahanan nasional?
- c. Bagaimana strategi optimalisasi pemberdayaan masyarakat pesisir secara terpadu berbasis konsep ekonomi biru guna meningkatkan kesejahteraan nelayan dalam rangka ketahanan nasional?

## 3. Maksud dan Tujuan.

### a. Maksud.

Penulisan Taskap ini bermaksud untuk memberikan gambaran tentang belum optimalnya pemberdayaan masyarakat pesisir secara terpadu berbasis ekonomi biru, menganalisis, dan menentukan langkah-langkah strategis

terhadap pemecahan masalah guna meningkatkan kesejahteraan nelayan dalam rangka ketahanan nasional.

**b. Tujuan.**

Sedangkan tujuan penulisan Taskap ini yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran berupa rekomendasi strategis kepada pihak yang berkepentingan untuk memecahkan masalah pemberdayaan masyarakat pesisir yang lebih terpadu dan berbasis ekonomi biru guna meningkatkan kesejahteraan nelayan dalam rangka ketahanan nasional.

**4. Ruang Lingkup dan Sistematika.**

**a. Ruang Lingkup.**

Penulisan Taskap ini dibatasi pada optimalisasi pemberdayaan masyarakat pesisir secara terpadu berbasis konsep ekonomi biru, khususnya membahas tentang pemberdayaan manusianya, usahanya dan lingkungannya guna meningkatkan kesejahteraan nelayan dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi nasional.

**b. Sistematika.**

Penyusunan Taskap ini ditata dengan sistematika, sebagai berikut:

- 1) BAB I Pendahuluan. Bab ini memaparkan latar belakang berupa fenomena permasalahan, perumusan masalah dan perincian pertanyaan-pertanyaan kajian tentang optimalisasi pemberdayaan masyarakat pesisir secara terpadu berbasis ekonomi biru guna meningkatkan kesejahteraan nelayan dalam rangka ketahanan nasional.
- 2) BAB II Landasan Pemikiran. Bab ini berisi tentang landasan pemikiran yang meliputi peraturan perundang-undangan, data dan fakta, kerangka teoritis, serta lingkungan strategis yang berpengaruh dan relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas.
- 3) BAB III Pembahasan. Bab ini menyajikan data dan fakta baik dari data primer dan sekunder untuk selanjutnya dianalisa menggunakan pendekatan perundang-undangan, teori, dan perkembangan lingkungan strategis. Pembahasan dilakukan untuk menganalisis akar permasalahan, faktor-faktor penyebab dan menentukan langkah-langkah strategis pemecahan masalah.

4) BAB IV Penutup. Pada Bab ini berisi jawaban atas pertanyaan kajian pada Bab I serta rekomendasi untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat pesisir secara terpadu berbasis ekonomi biru guna meningkatkan kesejahteraan nelayan dalam rangka ketahanan nasional.

## 5. Metode dan Pendekatan.

### a. Metode.

Penulisan Taskap ini menggunakan metode kualitatif di mana data yang diperoleh melalui metode meta data dan analisa pembahasan menggunakan metode analisis PEST.

### b. Pendekatan.

Taskap ini menggunakan pendekatan dari perspektif ketahanan nasional secara multidisiplin ilmu sesuai kerangka teori yang digunakan.

## 6. Pengertian.

### a. Optimalisasi.

Optimalisasi adalah suatu proses untuk mencari alternatif terbaik dari beberapa pilihan yang tersedia, dengan tujuan mencapai hasil yang efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya yang ada. Dalam konteks ekonomi, optimalisasi sering digunakan dalam rangka memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya.<sup>23</sup>

### b. Pemberdayaan.

Suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada di lingkungannya secara mandiri dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat juga dianggap sebagai suatu proses yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program yang berdampak pada kehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat hubungan antar

<sup>23</sup> Tony M. Wijaya.(2018).Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro. PT. RajaGrafindo Persada.hal 142-143.

sesama masyarakat serta antara masyarakat dengan pemerintah dan lembaga lainnya<sup>24</sup>.

**c. Terpadu.**

Suatu kondisi dimana berbagai proses dan kegiatan dari institusi/departemen yang berbeda saling terkoordinasi dan bekerja sama secara terpadu sehingga efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar<sup>25</sup>.

**d. Ekonomi Biru.**

Merupakan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dan konservasi sumber daya alam laut dan pesisir serta ekosistemnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip seperti partisipasi masyarakat, efisiensi sumber daya, minimalisasi limbah dan penciptaan nilai (*multiple revenue*)<sup>26</sup>.

**e. Kesejahteraan.**

Kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi dimana individu atau masyarakat secara umum merasa bahagia, sejahtera, dan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosialnya<sup>27</sup>.

**f. Ketahanan Nasional.**

Ketahanan Nasional (Tannas) dapat diartikan sebagai sebuah keadaan dinamis bangsa Indonesia berupa ketangguhan dan kebulatan tekad, termasuk kemampuan membangun kekuatan nasional untuk menghadapi segala bentuk tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan kehidupan bangsa dan negara Indonesia<sup>28</sup>.

---

<sup>24</sup> Bambang Sutiyono.(2016).Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa. CV. Pustaka Setia

<sup>25</sup> Glosarium Online.(2019).Apa itu terpadu? Pengertian terpadu dan definisinya dalam Glosarium, diakses pada tanggal 16 Maret 2023, pukul 07.30 Wib.

<sup>26</sup> Sekretariat Negara.(2014).Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

<sup>27</sup> Sekretariat Negara.(2009).Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

<sup>28</sup> Tim Pokja Bahan Ajar BS Tannas.(2023).Ketahanan Nasional. Lemhannas: Direktorat Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional. hal 46.

**g. Ketahanan Ekonomi Nasional.**

Ketahanan Ekonomi Nasional dapat diartikan sebagai sebuah keadaan dinamis perekonomian bangsa Indonesia, berupa ketangguhan dan kebulatan tekad, termasuk kemampuan membangun kekuatan nasional untuk menghadapi segala bentuk tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar serta langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan perekonomian bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945<sup>29</sup>.

**h. Indikator Keberhasilan.**

Indikator keberhasilan merujuk pada kriteria atau parameter yang digunakan untuk menilai apakah suatu program atau kegiatan telah berhasil mencapai tujuannya atau tidak. Indikator keberhasilan haruslah dapat diukur dan diamati agar dapat memberikan informasi yang jelas tentang sejauh mana tujuan telah tercapai. Saat menentukan indikator keberhasilan, perlu memastikan bahwa indikator tersebut relevan dengan sasaran yang ingin dicapai dan dapat diimplementasikan dengan baik dalam program atau kegiatan yang dilakukan<sup>30</sup>.

**i. Masyarakat Pesisir.**

Adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil<sup>31</sup>.

---

<sup>29</sup> Ibid. hal 78.

<sup>30</sup> Wildani.(2022).Perencanaan Satuan Pendidikan Madrasah. NTB: Pusat Pendidikan dan Penelitian Indonesia. hal 51.

<sup>31</sup> KKP.(2014).Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40/Permen-Kp/2014 Tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

## BAB II LANDASAN PEMIKIRAN

### 7. Umum.

Bab ini berisi tentang landasan pemikiran yang meliputi peraturan perundang-undangan, data dan fakta, kerangka teoritis, serta lingkungan strategis. Landasan pemikiran merupakan dasar pemikiran yang berkaitan dengan rumusan permasalahan, yakni bagaimana mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat pesisir secara terpadu berbasis ekonomi biru guna meningkatkan kesejahteraan nelayan dalam rangka ketahanan nasional. Peraturan perundang-undangan digunakan sebagai payung hukum dan dasar yuridis untuk menilai atau mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang sedang dikaji. Sedangkan kerangka teoritis akan memberikan dasar teori yang kemudian dikembangkan sebagai acuan menganalisis pemecahan masalah. Data dan fakta digunakan sebagai data empiris untuk mengidentifikasi akar permasalahan. Selain itu, perkembangan lingkungan strategis baik di tingkat global, regional, maupun nasional sebagai pendekatan secara holistik, komprehensif dan integral, utamanya yang terkait dengan pokok bahasan untuk menjadi pertimbangan dalam pembahasan agar tidak berpikir secara parsial.

### 8. Peraturan Perundang-undangan.

#### a. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan<sup>32</sup>.

Pasal 7 pada Undang-Undang ini menjelaskan tentang jumlah ikan yang diperbolehkan untuk ditangkap di wilayah pengelolaan perikanan (tidak *over fishing*) dan Pasal 8 menjelaskan tentang larangan penangkapan ikan dengan merusak atau *destructive fishing*. Kedua Pasal ini akan digunakan untuk menilai sejauh mana nelayan mempunyai kesadaran dalam menjaga keberlanjutan lingkungan laut selama menangkap ikan sebagai bentuk implementasi konsep ekonomi biru.

---

<sup>32</sup> Sekretariat Negara.(2004).Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

**b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar<sup>33</sup>.**

Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 7 dalam Peraturan Pemerintah (PP) ini mengatur pengelolaan Wajib Belajar. Pasa-pasal tersebut akan digunakan sebagai referensi sejauh mana Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan jaminan peningkatan kualitas pendidikan kepada masyarakat pesisir. Selain itu, Pasal 13 ini juga digunakan sebagai acuan sejauh mana masyarakat pesisir memenuhi hak dan kewajibannya dalam melaksanakan Wajib Belajar.

**c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 40/Permen-Kp/2014 Tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil<sup>34</sup>.**

Secara garis besar, PermenKP ini mengatur tentang peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K). Khususnya pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 akan digunakan sebagai dasar untuk menilai bagaimana peran serta masyarakat dalam pengelolaan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan WP3K. Selanjutnya Pasal 10 sampai dengan Pasal 18 digunakan untuk melihat bagaimana KKP dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui peningkatan kapasitas dan kualitas SDM, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, dan asset ekonomi produktif lainnya.

**d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/Permen-Kp/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024<sup>35</sup>.**

Peraturan ini merupakan dokumen indikatif rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran

<sup>33</sup> Sekretariat Negara.(2021).Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.

<sup>34</sup> KKP.(2014).Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40/Permen-Kp/2014 Tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

<sup>35</sup> KKP.(2020).Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/Permen-Kp/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas PermenKP. Dokumen ini akan digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pemberdayaan masyarakat pesisir.

**e. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan<sup>36</sup>.**

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) ini akan menjadi acuan dalam mengevaluasi sejauh mana Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah melaksanakan dan pembinaan pemberdayaan bidang kesehatan bagi masyarakat pesisir.

**9. Data dan Fakta.**

**a. Indek Ketahanan Nasional (IKN).**

Berdasarkan pengukuran yang dilaksanakan oleh Laboratorium Ketahanan Nasional (Labkurtannas) Lemhannas RI sesuai Tabel 1, IKN tahun 2021 mengalami penurunan ke tahun 2022. Namun demikian, IKN pada tahun 2022 dengan skor **2,75** (warna hijau) atau **“Cukup Tangguh”**, artinya ketangguhan dan tekad bangsa saat ini memadai untuk menghadapi berbagai tantangan dan ancaman dari dalam maupun luar negeri. Lebih detail IKN pada tiap Gatra tiap Variabel dapat dilihat di **Lampiran II**.

  
**Tabel 1**  
**Indek Ketahanan Nasional Tahun 2021-2022**

No	Bidang	Tahun	
		2021	2022
1	Geografi	2,78	2,79
2	Demografi	2,92	2,96
3	SKA	2,81	2,80
4	Ideologi	2,44	2,45
5	Politik	2,78	2,81
6	Ekonomi	2,61	2,62
7	Sosbud	2,71	2,67
8	Hankam	3,10	3,10
<b>IKN</b>		<b>2,81</b>	<b>2,75</b>

(Sumber Data: Profil Ketahanan Nasional (2021), (2022))

<sup>36</sup> Sekretariat Negara.(2016).Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

## b. Gambaran Umum Masyarakat Pesisir Indonesia.

Indonesia memiliki garis pantai yang panjang dan wilayah pesisir yang secara ekonomi memiliki potensi sumber daya alam yang beragam. Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir dan bergantung pada sumber daya alam di dalamnya disebut sebagai masyarakat pesisir, yang meliputi masyarakat adat, lokal, dan tradisional. Mayoritas dari mereka bekerja sebagai nelayan, baik nelayan perairan laut dan perairan umum pedalaman (PUD). Pertumbuhan jumlah nelayan dari tahun 2018 hingga 2022 di Indonesia dapat dilihat dalam Tabel 2 di bawah ini:

**Tabel 2**  
**Jumlah Nelayan Menurut Sub Sektor Perikanan Tangkap**

Jumlah Nelayan	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Total (Orang)</b>	<b>2.667.572</b>	<b>2.637.269</b>	<b>2.736.218</b>	<b>2.849.473</b>	<b>2.925.818</b>
Nelayan Laut	2.289.529	2.292.024	2.088.959	2.359.064	2.359.264
Nelayan PUD	378.043	345.245	647.259	490.409	566.554

(Sumber data : statistik.kkp.go.id Tahun 2023)

Berdasarkan Tabel 2 di atas, jumlah nelayan menurun pada tahun 2019 sebesar 1,14 persen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Walhi, penurunan jumlah nelayan tersebut karena adanya perubahan iklim dan industri ekstraktif. Perubahan iklim mengakibatkan waktu melaut para nelayan berkurang menjadi hanya enam bulan, sehingga banyak dari nelayan berpindah profesi untuk tetap memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan adanya industri ekstraktif berupa reklamasi dan pertambangan di WP3K, membuat nelayan kehilangan tempat tinggalnya sehingga harus berpindah profesi<sup>37</sup>. Nelayan Indonesia tersebar di berbagai Kabupaten/Kota/Desa pesisir. Sampai dengan tahun 2022, jumlah Kabupaten/Kota/Desa pesisir adalah sebagai berikut<sup>38</sup>:

- 1) Jumlah Kabupaten/Kota Pesisir : 514 Kabupaten/Kota.
- 2) Jumlah Kecamatan Pesisir : 7.024 Kecamatan.

<sup>37</sup> Walhi.(2022).Jumlah Nelayan Indonesia Terus Menurun akibat perubahan iklim dan Industri ekstraktif. <https://www.walhi.or.id>, diakses pada tanggal 15 Mei 2023, pukul 20.45 Wib.

<sup>38</sup> KKP.(2022).Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2022 Volume 1 Tahun 2022.

3) Jumlah Desa Pesisir Pantai : 52.329 Desa.

**c. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.**

Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan penggerak utama pemberdayaan masyarakat pesisir. Namun demikian, terdapat beberapa program pemberdayaan masyarakat dari kementerian/lembaga lainnya yang dapat melibatkan masyarakat pesisir, antara lain:

- 1) Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PMP-PPK), dilaksanakan oleh KKP mulai tahun 2015 sampai dengan saat ini<sup>39</sup>.
- 2) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dilaksanakan oleh Kemendes PDTT, mulai tahun 2021 sampai dengan saat ini<sup>40</sup>.
- 3) Program Keluarga Harapan (PKH), dilaksanakan oleh Kemensos, mulai tahun 2018 sampai dengan saat ini<sup>41</sup>.
- 4) Program Kampung Nelayan Maju (Kalaju), dilaksanakan oleh KKP, mulai tahun 2021 sampai dengan saat ini<sup>42</sup>.
- 5) Program Kampung Bahari Nasional (KBN), dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut, mulai tahun 2018 sampai dengan saat ini<sup>43</sup>.
- 6) Program Pelayanan Kesehatan (PPK) di Wilayah Terpencil dan Perbatasan, dilaksanakan oleh Kemenkes, mulai tahun 2015 sampai dengan saat ini<sup>44</sup>. Perbedaan dan persamaan masing-masing program di atas dapat dilihat pada **Lampiran III**.

<sup>39</sup> KKP.(2020).Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Sebagai Sistem Pertahanan Negara. <https://kkp.go.id/djprl/p4k/artikel/22501>, diakses pada tanggal 09 Mei 2023, pukul 21.52 Wib.

<sup>40</sup> Sekretariat Negara.(2021).Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

<sup>41</sup> Kemensos.(2018).Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

<sup>42</sup>KKP.(2022).Verifikasi Kampung Nelayan Maju. <https://kkp.go.id/djpt/ppnprigi/artikel/38215>, diakses pada tanggal 10 Mei 2023, pukul 04.07 Wib.

<sup>43</sup> Muhammad Nur Syamsi.(2021).KKP: Program Kampung Bahari Sejahterakan Masyarakat Pesisir. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/qoom0a349/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2023, pukul 03.57 Wib.

<sup>44</sup> Kemenkes.(2015).Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 90 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil.

**d. Kondisi Pendidikan Masyarakat Pesisir.**

Sebagian besar masyarakat pesisir memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Tabel 3 memberikan informasi mengenai tingkat pendidikan mayoritas masyarakat pesisir di Kabupaten/Kota pesisir di Indonesia yang hanya menamatkan pendidikan SD.

**Tabel 3**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat di Beberapa Kabupaten/Kota Pesisir**

No	Kabupaten/ Kota Pesisir	Tingkat Pendidikan Tertinggi		
		Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SMA
2	Tanjung Pinang	28.958	17.076	47.867
3	Rembang	200.880	27.843	86.346
4	Tuban	488.504	213.642	205.289
5	Maumere	101.295	14.152	36.852
6	Ambon	26.525	21.679	124.016
7	Makasar	112.160	96.469	232.509
8	Cirebon	487.982	185.152	191.063
9	Ternate	17.137	4.060	7.325
10	Majene	36.830	12.713	23.816
	<b>Total</b>	<b>1.524.809</b>	<b>609.361</b>	<b>994.129</b>

(Sumber data: bps.go.id Tahun 2023)

Data pada Tabel 3 diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota Dalam Angka. Metode sampel diambil dari setiap Kabupaten/Kota yang mewakili setiap provinsi di Indonesia, dengan tujuan untuk memperoleh data tingkat pendidikan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia. Dari data tersebut, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat pesisir hanya menamatkan pendidikan SD, sedangkan di kota Tanjung Balai, Tanjung Pinang, dan Makassar, tingkat pendidikan masyarakat pesisir dapat mencapai SMA. Meskipun demikian, masih terdapat penduduk di tiga kota tersebut yang hanya menamatkan SD.

Pendidikan masyarakat desa pesisir di Indonesia penting untuk dikembangkan karena masyarakat desa pesisir kurang memperoleh akses pendidikan yang memadai, antara lain disebabkan:

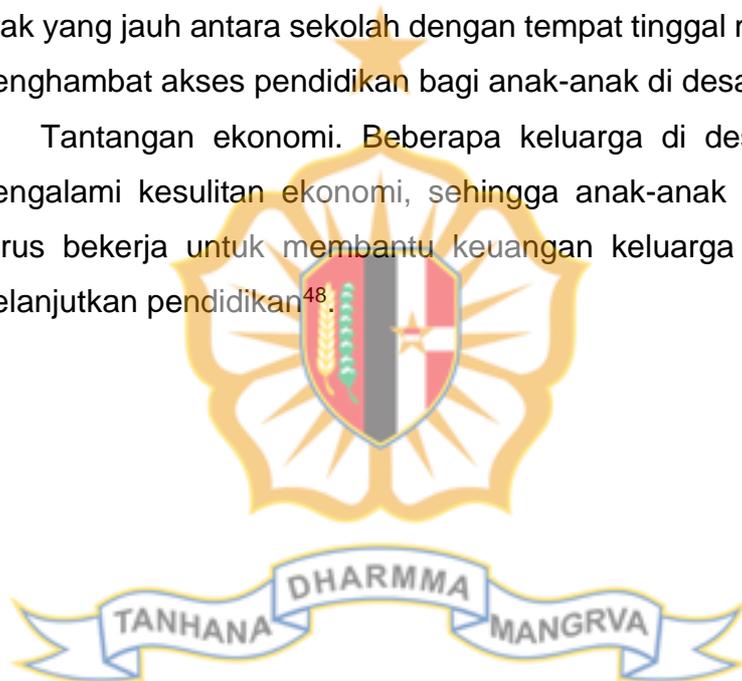
- 1) Keterbatasan infrastruktur pendidikan. Infrastruktur pendidikan di daerah pesisir masih terbilang kurang memadai, seperti jumlah sekolah

yang terbatas, rusaknya gedung sekolah, minimnya fasilitas pendukung seperti laboratorium dan perpustakaan<sup>45</sup>.

2) Keterbatasan sumber daya manusia. Desa pesisir memiliki minimnya jumlah sumber daya manusia yang berkualifikasi sebagai guru, sehingga kualitas pendidikan yang diberikan masih kurang memadai<sup>46</sup>. Secara nasional, ketersediaan guru ASN dapat dilihat pada Grafik 1 di bawah ini, di mana terdapat kurang dari 5 persen sekolah negeri memiliki guru ASN yang memadai. Namun, sebanyak 1.387 sekolah negeri tidak memiliki guru ASN.

3) Terbatasnya akses pendidikan. Keterbatasan transportasi dan jarak yang jauh antara sekolah dengan tempat tinggal masyarakat dapat menghambat akses pendidikan bagi anak-anak di desa pesisir<sup>47</sup>.

4) Tantangan ekonomi. Beberapa keluarga di desa pesisir masih mengalami kesulitan ekonomi, sehingga anak-anak mereka terpaksa harus bekerja untuk membantu keuangan keluarga dan tidak dapat melanjutkan pendidikan<sup>48</sup>.

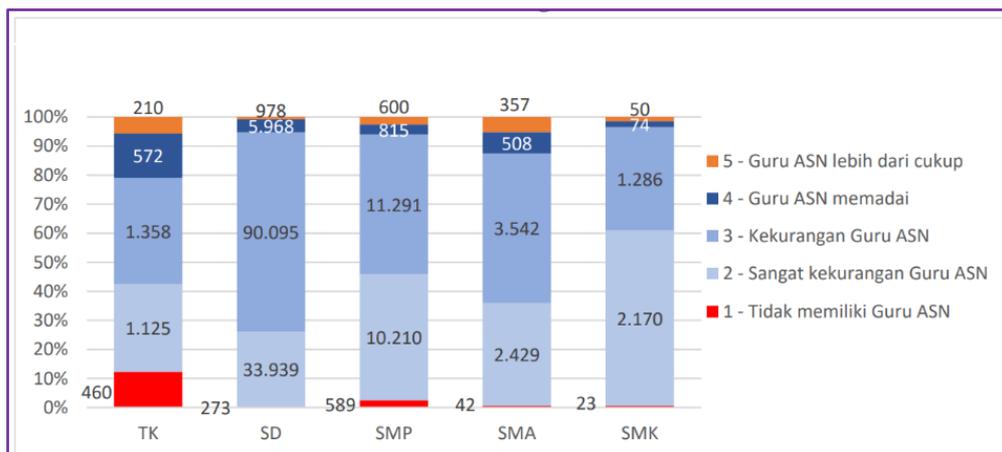


<sup>45</sup> Hidayah, N. N., et al. (2020). Penyediaan Infrastruktur Sekolah di Kawasan Pesisir Jawa Tengah. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 12(2), 178-187.

<sup>46</sup> Arifin, Z. (2019). Kualitas Pendidikan di Daerah Pesisir Kabupaten Pacitan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 6(1), 29-34.

<sup>47</sup> Nugraheni, A. D., & Sudarsono, A. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akses Pendidikan di Daerah Pesisir (Studi Kasus: Desa Kemiren, Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 15(2), 107-116.

<sup>48</sup> Sari, N. A., & Djam'an, S. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anak Putus Sekolah di Desa Pesisir: Studi Kasus di Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(2), 132-143.

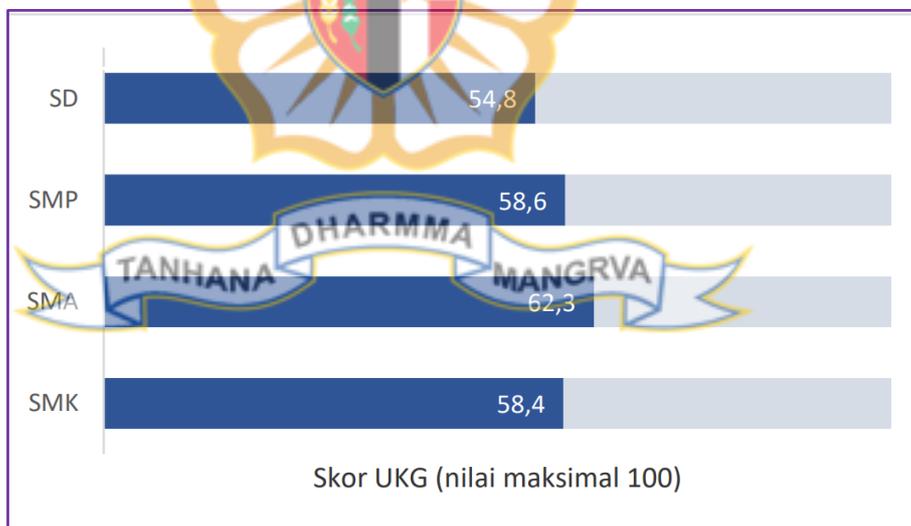


(Sumber data: Lampiran Permendikbudristek RI Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024)

**Grafik 1**

**Ketersediaan Guru ASN di Satuan Pendidikan Negeri Tahun 2019**

Selanjutnya kompetensi guru dapat dilihat dari hasil nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) pada Grafik 2 dibawah ini.



(Sumber data: Lampiran Permendikbudristek RI Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024)

**Grafik 2**

**Nilai Uji Kompetensi Guru Tahun 2019**

### e. **Kondisi Kesehatan Masyarakat Pesisir.**

Kesehatan masyarakat desa pesisir di Indonesia merupakan isu yang penting karena masyarakat desa pesisir memiliki keunikan dan tantangan tersendiri dalam menjaga Kesehatan. Kondisinya tergantung pada lokasi dan faktor-faktor lingkungan setempat seperti lokasi geografis, kondisi lingkungan, faktor sosial dan budaya, akses terhadap layanan kesehatan, akses terhadap sumber daya alam, serta perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan di desa pesisir di Indonesia. Beberapa masalah kesehatan yang umum dijumpai di desa pesisir di Indonesia antara lain:

- 1) Penyakit menular. Masyarakat pesisir di Indonesia memiliki risiko tinggi terhadap penyakit menular seperti malaria, demam berdarah, dan diare akibat kurangnya akses terhadap sanitasi dan air bersih yang memadai<sup>49</sup>.
- 2) Kekurangan gizi. Masyarakat pesisir di Indonesia mengandalkan tangkapan laut sebagai sumber makanan utama, namun kekurangan variasi makanan dan kurangnya akses terhadap sumber makanan yang seimbang dapat menyebabkan kekurangan gizi dan malnutrisi<sup>50</sup>. Pemerintah, melalui KKP telah melaksanakan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) untuk mengatasi masalah kekurangan gizi ini<sup>51</sup>.
- 3) Kesehatan ibu dan anak. Masyarakat pesisir di Indonesia menghadapi masalah kesehatan ibu dan anak, seperti kematian ibu saat melahirkan dan malnutrisi pada anak-anak<sup>52</sup>. Masalah kesehatan ibu dan anak diatasi dengan cara meningkatkan pelayanan antenatal sesuai standar pelayanan<sup>53</sup>.

<sup>49</sup> Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.(2016).Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016. <https://dinkes.jatimprov.go.id/userimage/dokumen>, diakses pada tanggal 10 Mei 2023, pukul 06.00 Wib.

<sup>50</sup> Susilowati, I. H., & Azizah, F.(2020).Kekurangan Gizi Pada Anak Balita di Wilayah Pesisir Kabupaten Indramayu. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, 10(2), 80-91

<sup>51</sup> KKP.(2020).PermenKP Nomor 17/permen-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

<sup>52</sup> Salma, W. O. et.al.(2021).Buku Referensi Potret Masyarakat Pesisir Konsep Inovasi Gizi & Kesehatan. Jogjakarta: Deepublish.

<sup>53</sup> Kemenkes.(2019).Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

4) Penyakit akibat kerja. Kegiatan penangkapan ikan dan pengolahan hasil tangkapan laut dapat menyebabkan risiko terjadinya penyakit akibat kerja, seperti cedera fisik dan keracunan akibat paparan bahan kimia<sup>54</sup>. Kecelakaan kerja tersebut diatasi dengan cara mendirikan Pos Unit Kesehatan Kerja Terintegrasi (Pos UKK)<sup>55</sup>.

Kondisi tersebut karena di wilayah pesisir masih kekurangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes). Sampai dengan semester II tahun 2022, jumlah Puskesmas di daerah terpencil dan sangat terpencil ada sekitar 10.374 unit atau sekitar 25% dari total Puskesmas yang terdaftar<sup>56</sup>. Tenaga Kesehatan juga terbatas seperti kekurangan tenaga dokter, dokter gigi dan apoteker di puskesmas terpencil. Kekurangan dengan dokter diatasi dengan cara pengiriman tenaga kesehatan ke daerah terpencil dengan adanya komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan sarana tempat tinggal, alat transportasi, dan jaminan keselamatan selama di daerah tugas<sup>57</sup>.

#### **f. Tingkat Pendapatan Masyarakat Pesisir.**

Tingkat kesejahteraan nelayan dapat dilihat dari pendapatan nelayan yang diukur dari Nilai Tukar Nelayan (NTN). Pada prinsipnya NTN menggambarkan kondisi daya beli para pelaku usaha di sektor perikanan. Nilai NTN diperoleh dengan membandingkan besaran indeks yang diterima nelayan (IT) dengan indeks yang dibayarkan nelayan (IB). Perkembangan NTN di Indonesia tahun 2016 sampai dengan 2021, dapat dilihat dari Grafik 3. Pendapatan nelayan sesungguhnya dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya kebijakan penangkapan pada WPPNRI, sarana prasarana, infrastruktur yang tersedia di wilayah Indonesia, dan lain-lain. Tentu kondisi ini akan memengaruhi besaran indeks yang diterima nelayan (IT). Sementara

<sup>54</sup> Nuraini Nuraini dan Muhammad Firdaus.(2019).Kesehatan Nelayan di Indonesia: Sebuah Telaah Literatur. Jurnal Kesehatan Masyarakat, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2019.

<sup>55</sup> Kemenkes.(2016).Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi

<sup>56</sup> Kemenkes.(2023).Data *online* <https://kemenkes.go.id>, diakses pada tanggal 18 Mei 2023, pukul 05.26 Wib.

<sup>57</sup> Iin Nurlinawati, Rudi Hendro Putranto.(2020).Faktor-Faktor Penempatan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Daerah Terpencil/Sangat Terpeci. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Vol.4, (1).

biaya operasional yang dikeluarkan nelayan tetap. Bahkan nilai hasil tangkapan lebih kecil dari pada biaya operasional.



(Sumber data: bps.go.id Tahun 2023)

**Grafik 3**  
**NTN Nelayan di Indonesia Periode 2016-2021**

Berdasarkan Grafik 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan nelayan tangkap dan nelayan pembudidaya meningkat dari tahun 2016 sampai dengan 2021, kecuali pada tahun 2020 di mana pendapatan nelayan menurun akibat dari pengaruh COVID-19 yang memaksa nelayan menghentikan aktivitas ekonomi di berbagai sektor<sup>58</sup>.

Selanjutnya dari data statistik KKP tahun 2023, jumlah kapal perikanan menurut kategori dan ukuran dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.

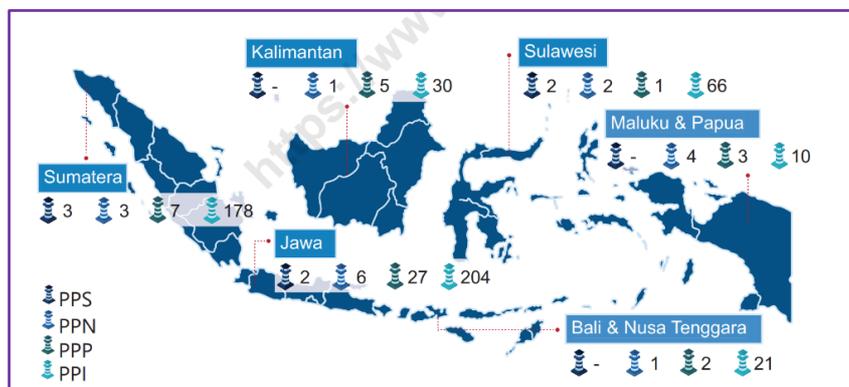
**Tabel 4**  
**Jumlah Kapal Perikanan Laut Menurut Kategori dan Ukuran**

Jumlah Kapal Perikanan Tangkap Laut	2019	2020	2021
Total (Unit)	936.249	1.161.332	1.004.060
Perahu Tanpa Motor	192.653	159.417	136.848
Perahu Motor Tempel	427.309	503.955	476.484
Kapal Motor	316.287	497.960	390.728
Kapal Motor < 5 GT	201.924	388.618	29.6764
Kapal Motor 5-10 GT	708.86	64.708	54.398
Kapal Motor 10-20 GT	22.200	21.589	18.902
Kapal Motor 20-30 GT	16.964	17.652	14.238
Kapal Motor 30-50 GT	1130	975	1.010
Kapal Motor 50-100 GT	2.050	2.786	3.238
Kapal Motor 100-200 GT	1.126	1.616	2.162
Kapal Motor 200- 300 GT	7	15	15
Kapal Motor 300-500 GT		1	1

(Sumber data : statistika.kkp.go.id Tahun 2023)

<sup>58</sup> KKP.(2020).Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020.

Selanjutnya jumlah dan sebaran Pelabuhan Perikanan di Indonesia, menurut klasifikasi tahun 2022 seperti terlihat pada Gambar 1 dibawah ini.



(Sumber : BPS, Statistik Pelabuhan Perikanan 2022)

**Gambar 1**  
**Sebaran Pelabuhan Perikanan Berdasarkan Pulau dan Klasifikasi**

#### g. Usaha Masyarakat Nelayan.

Secara umum, masih ada potensi yang besar untuk pengembangan usaha bagi masyarakat nelayan, misalnya dalam bentuk usaha mikro atau wirausaha di sektor perikanan. Namun, masih diperlukan dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait dalam hal pendanaan, pendidikan, pengembangan produk, dan pemasaran untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi serta kinerja usaha masyarakat nelayan. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Didi Haryono, et.al. (2022), yang menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti permodalan, akses pasar, inovasi produk, serta keterampilan dan manajerial berperan dalam pengembangan usaha mikro di sektor perikanan tangkap<sup>59</sup>.

Dalam hal kebutuhan kelembagan usaha masyarakat nelayan, saat ini sudah dibentuk BUMDes dan Koperasi Unit Masyarakat (KUD). BUMDes dan KUD adalah organisasi ekonomi yang dibentuk di tingkat desa dengan tujuan meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakatnya. Kedua organisasi ini dikelola oleh warga desa dan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari pengurus dan anggota. Perbedaannya, BUMDes memiliki bentuk badan hukum dan dikelola secara profesional, sedangkan KUD merupakan

<sup>59</sup> Didi Haryono, et.al.(2022).Pemberdayaan dan Pengembangan UKM Masyarakat Pesisir Berbasis Platform Digital. Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.5, (3).hal. 544-553.

bentuk koperasi yang dikelola oleh anggota. BUMDes lebih fleksibel dalam kegiatan usahanya dan dapat melakukan berbagai jenis usaha, sedangkan KUD berfokus pada kegiatan usaha yang terkait dengan bidang koperasi. Sumber pendanaan BUMDes berasal dari dana desa, sedangkan KUD dibiayai oleh simpanan dan modal anggota. Berdasarkan catatan dari KemenDesPDPTT, sampai Mei 2023 nama BUMDes terdaftar sebanyak 27.139 dan 14.153 di antaranya sudah berbadan hukum (52,15%)<sup>60</sup>. Berdasarkan catatan Kompas, BUMDes telah membuka lapangan kerja untuk 20.369.834 orang dengan omzet Rp. 4,6 triliun<sup>61</sup>.

#### h. Kondisi Ekosistem Laut.

Pemberdayaan masyarakat bidang lingkungan bertujuan agar nelayan menjaga kelestarian ekosistem. Kerusakan ekosistem laut bisa diakibatkan oleh faktor alam maupun ulah manusia. Beberapa kerusakan ekosistem akibat ulah manusia seperti penangkapan ikan secara merusak (*destructive fishing*), perusakan hutan mangrove, serta pencemaran udara, air dan tanah. Dalam praktiknya, *destructive Fishing* menggunakan bom ikan, umpan beracun, dan membajak dasar laut. Berdasarkan data dari KKP, selama kurun waktu 2013 hingga 2019, terdapat kasus *destructive fishing* sebanyak 653 kasus, seperti terlihat pada Tabel 5. Berdasarkan tabel tersebut, Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang paling banyak ditemukan kasus *destructive fishing* di Indonesia oleh karena jumlah nelayan paling banyak kedua setelah Jawa Timur yaitu 169.718 orang<sup>62</sup>. Dalam konteks ini, peluang melakukan pelanggaran *destructive fishing* menjadi lebih besar dan juga sikap menginginkan penangkapan ikan yang lebih cepat dan murah.

---

<sup>60</sup> KemendesPDPTT.(2023).Data online. <https://kemendes.go.id>, diakses pada tanggal 18 Mei 2023, pukul 11.19 Wib.

<sup>61</sup> Trisno Yulianto.(2023).Resolusi BUMDes 2023. <https://kompas.go.id>, diakses pada tanggal 18 Mei 2023, pukul 11.30 Wib.

<sup>62</sup> KKP.(2020).Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2022 Volume 1.

**Tabel 5**  
**Temuan dan Penanganan Kasus *Destructive Fishing* di Indonesia**  
**Tahun 2013-2019**

No	Provinsi	Bom	Racun	Setrum	Alkap	Jumlah
1	Sulawesi Selatan	451	19	0	1	471
2	Kalimantan Selatan	0	0	57	0	57
3	Lampung	19	1	7	3	30
4	NTT	14	4	0	0	18
5	Gorontalo	8	3	0	1	12
6	Sulawesi Tenggara	8	1	1	0	10
7	NTB	8	1	0	0	10
8	Sumatera Barat	3	4	1	0	8
9	Jawa Barat	0	0	8	0	8
10	Kepulauan Riau	3	2	0	0	5
11	Sumatera Utara	2	0	1	0	5
12	Sulawesi Utara	2	1	0	0	3
13	Sulawesi Tengah	2	1	0	0	3
14	Papua	3	0	0	0	3
15	Kalimantan Barat	0	0	2	0	3
16	Kalimantan Timur	2	0	0	0	2
17	Jawa Timur	1	0	0	1	2
18	Sumatera Selatan	0	0	0	1	1
19	Maluku	1	0	0	0	1
20	Bali	0	1	0	0	1
<b>Jumlah</b>		<b>529</b>	<b>40</b>	<b>77</b>	<b>7</b>	<b>653</b>

(Sumber data : statistik kkp.go.id Tahun 2023)

#### i. Kelestarian Hutan Mangrove.

Wilayah pesisir Indonesia memiliki luas hutan mangrove yang sangat luas, namun masih cukup banyak mengalami kerusakan. Penyebab kerusakan antara lain pembukaan lahan tambak, penebangan kayu, pertambangan, perikanan yang tidak berkelanjutan, pembangunan infrastruktur, intrusi air laut, polusi, dan lain-lain. Data dari *Environmental Performance Index 2022* (EPI) juga menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan Indonesia termasuk dalam kategori "buruk" di Asia Pasifik, dengan nilai 28,2 dari 100, yang menempatkan Indonesia pada urutan 164 dari 180 negara yang disurvei<sup>63</sup>. EPI menilai level keberlanjutan lingkungan negara-negara melalui indikator yang terangkum dalam tiga kategori besar, yaitu:

<sup>63</sup> Adi Ahdiat.(2022).Pelestarian Lingkungan Indonesia Tergolong Buruk di Asia Pasifik, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/25/>, diakses pada tanggal 11 Mei 2023, pukul 02.32 Wib.

- 1) Kesehatan Lingkungan. Meliputi kualitas udara, pencemaran air, limbah, dan sebagainya.
- 2) Iklim. Kebijakan mitigasi perubahan iklim, emisi gas rumah kaca, dan sebagainya.
- 3) Daya Hidup Ekosistem. Kualitas biodiversitas, keberlanjutan perikanan, pertanian, sumber daya air, dan sebagainya.

Perhitungan EPI dilakukan dengan memberikan bobot pada masing-masing kategori indikator. Bobot ini didasarkan pada kesepakatan internasional tentang pentingnya isu-isu lingkungan tertentu.

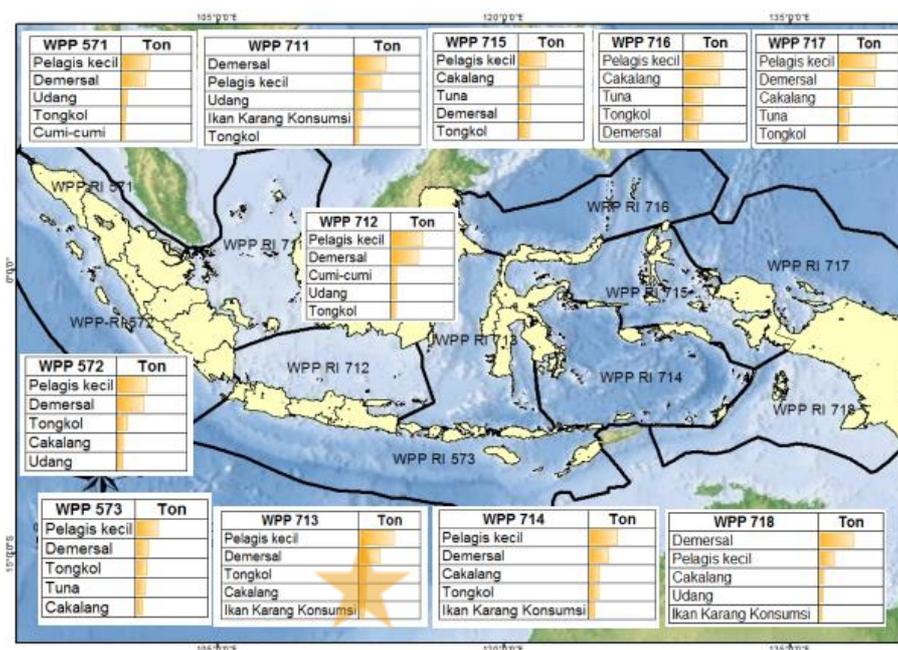


(sumber data : kkp.go.id Tahun 2023)

**Gambar 2**  
**Kondisi Mangrove Indonesia Tahun 2021**

#### **j. Wilayah Penangkapan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).**

Gambar 3 di bawah ini adalah WPPNRI yaitu wilayah perairan tertentu di mana nelayan dan industri perikanan dapat menjalankan kegiatan penangkapan ikan secara sah dan berkelanjutan. Pembentukan WPPNRI bertujuan untuk mengatur dan menjaga sumber daya ikan laut di perairan Indonesia agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. WPPNRI dibagi dalam sebelas zona dan Proyeksi Tingkat Produksi Komoditas Utama per WPP 2020-2024.



(Sumber data : Rancangan Renstra DJPT 2020-2024)

**Gambar 3**  
**Proyeksi Tingkat Produksi Komoditas Utama per WPP 2020-2024**

Sedangkan status pemanfaatan ikan di WPP, diatur seperti pada Tabel 6 di bawah ini.

**Tabel 6**  
**Jenis Ikan Dengan Tingkat Pemanfaatan Over-exploited**

WPP	Cumi-cumi	Ikan Demersal	Ikan Karang	Ikan Pelagis Besar	Ikan Pelagis Kecil	Kepiting	Lobster	Rajungan	Udang Penaeid
WPP 571		0		0		0	0		
WPP 572			0	0			0		0
WPP 573	0						0		
WPP 711						0	0		0
WPP 712		0		0					
WPP 713	0		0		0		0		0
WPP 714			0				0		
WPP 715			0				0		
WPP 716			0						
WPP 717			0						0
WPP 718	0		0						

(Sumber data: statistik.kkp.go.id Tahun 2023)

Keterangan : 0 = Pembatasan Pemanfaatan Ikan Pada WPP terkait.

Tabel 6 memberikan informasi tentang status pemanfaatan ikan. Sebagai contoh di WPP 571, ikan Demersal (*Demergere*), ikan Pelagis Besar (*Katsuwonus pelamis*), Kepiting (*Brachyura*), Lobster (*Nephropidae*) diberi tanda kotak warna merah, yang artinya penangkapan jenis ikan tersebut telah melebihi batas dan tidak diizinkan untuk ditangkap lagi sampai dengan batas waktu tertentu. Situasi ini menimbulkan dua persepsi, yaitu Pemerintah menginginkan pengaturan penangkapan ikan namun nelayan tetap ingin menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, memerlukan kebijakan untuk mengatasi masalah ini. Kebijakan yang optimal dapat merujuk pada suatu kebijakan yang dapat mengakomodasi kebutuhan nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan lingkungan perairan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Kebijakan yang optimal juga harus mampu meminimalkan penangkapan ikan yang berlebihan dan merusak ekosistem perairan serta memberikan penghargaan kepada nelayan yang menjalankan praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan.

## 10. Kerangka Teoritis.

### a. Teori Optimalisasi.

Optimalisasi adalah suatu proses untuk mencari alternatif terbaik dari beberapa pilihan yang tersedia, dengan tujuan mencapai hasil yang efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya yang ada. Dalam konteks ekonomi, optimalisasi sering digunakan dalam rangka memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya<sup>64</sup>.

### b. Teori Pemberdayaan.

Menurut teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Sumadyo (2001), terdapat Tri Bina (Tri Daya) dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yaitu pemberdayaan manusianya, usahanya, dan lingkungannya<sup>65</sup>. Tri Bina atau pemberdayaan dimaksud, yaitu:

<sup>64</sup> Airlangga, A. S., & Darsono, D.(2019).Pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan restoran seafood. Jurnal Manajemen Pemasaran Petra, 7(1), 1-12.

<sup>65</sup>Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato.(2019).Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.hal 113.

- 1) Pemberdayaan manusianya. Pemberdayaan manusia pada aspek pendidikan dimaksudkan kemampuan setiap individu mencakup ranah pengetahuan, sikap dan keterampilan<sup>66</sup>. Pemberdayaan dalam ranah sikap menghasilkan individu untuk berani melakukan perubahan ekonomi yang secara terus menerus untuk memperbaiki tingkat pendapatannya<sup>67</sup>. Secara umum, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola kesehatan secara mandiri agar masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat tentang kesehatan mereka sendiri<sup>68</sup>.
- 2) Pemberdayaan usahanya. Pemberdayaan bidang usaha adalah upaya untuk memberikan kesempatan dan memfasilitasi kelompok miskin untuk memiliki akses ke sumber daya seperti modal, teknologi, informasi, dan jaminan pasar. Dengan tujuan agar mereka dapat mengembangkan usahanya, meningkatkan pendapatan, menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan mereka<sup>69</sup>.
- 3) Pemberdayaan lingkungannya. Pemberdayaan bidang lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal ini sangat penting untuk menjaga kelestarian dan kelangsungan lingkungan hidup dalam rangka mencapai tujuan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup<sup>70</sup>.

### c. Konsep Ekonomi Biru.

Konsep *Blue Economy* adalah sebuah pendekatan yang memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan manusia, dengan fokus pada pengembangan ekonomi berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan serta pengembangan teknologi dan manajemen

---

<sup>66</sup> Ibid.hal 223.

<sup>67</sup> Ibid.hal 33.

<sup>68</sup> Kemenkes.(2013).Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

<sup>69</sup> Opcit. hal 33.

<sup>70</sup> Opcit. hal 34.

sumber daya yang ramah lingkungan<sup>71</sup>. Konsep ini diperkenalkan oleh Gunter Pauli dalam bukunya pada tahun 2010 dan terus dikembangkan di seluruh dunia. *Blue Economy* menekankan pemanfaatan potensi kekayaan alam yang tersedia secara produktif dan praktis memperbaiki kondisi lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja baru. Dalam bukunya, Pauli menyajikan 100 inovasi terkait *Blue Economy* yang berhasil diimplementasikan di berbagai belahan dunia dan menekankan konsep ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), ekonomi biru adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang dapat mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) PBB. Konsep ekonomi biru dapat membantu mencapai *SDGs* dengan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, meningkatkan ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga keberlanjutan lingkungan laut dan pesisir. Hal ini juga sejalan dengan target *SDGs* nomor 14 yang menekankan pentingnya menjaga dan memulihkan keberlanjutan lingkungan laut dan pesisir<sup>72</sup>.

#### **d. Teori PESTLE (*Political, Economic, Social, Technological, Legal, Environmental*).**

Teori PESTLE adalah suatu kerangka analisis yang digunakan untuk memeriksa faktor-faktor lingkungan luar yang dapat mempengaruhi suatu organisasi atau bisnis<sup>73</sup>. Teori PESTLE dapat digunakan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dengan cara memeriksa faktor-faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan program pemberdayaan tersebut. Berikut adalah penjelasan singkat tentang bagaimana teori PESTLE dapat diterapkan dalam konteks pemberdayaan masyarakat pesisir:

- 1) *Political* (Politik). Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan masyarakat pesisir adalah

<sup>71</sup> Pauli, G.(2010).The Blue Economy: 10 years, 100 innovations, 100 million jobs. Paradigm Publications.

<sup>72</sup> United Nations Development Programme.(2016).Blue Economy: Concept and Opportunities.

<sup>73</sup> Johnson, G., at.al.(2019).Exploring Strategy: Text and Cases (11th ed.). Pearson.

komponen politik yang perlu dipertimbangkan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. Kebijakan pengelolaan pesisir, misalnya, dapat membatasi akses masyarakat setempat ke sumber daya laut yang penting bagi kelangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat pesisir harus mendukung kebijakan yang keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.

2) *Economic* (Ekonomi). Faktor ekonomi yang perlu dipertimbangkan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir adalah kondisi ekonomi lokal, ketersediaan sumber daya alam, serta kondisi pasar untuk produk-produk lokal. Dalam pemberdayaan masyarakat pesisir, perlu ditingkatkan keterampilan dan daya saing masyarakat setempat dalam mengolah dan memasarkan produk-produk lokal mereka.

3) *Social* (Sosial). Faktor sosial yang perlu dipertimbangkan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir adalah faktor sosial dan budaya lokal. Misalnya, adat dan kebiasaan masyarakat setempat yang mungkin membatasi kemampuan mereka dalam mengembangkan usaha atau mengakses sumber daya. Oleh karena itu, dalam pemberdayaan masyarakat pesisir, perlu dilakukan pendekatan yang menghargai adat dan budaya setempat.

4) *Technological* (Teknologi). Faktor teknologi yang perlu dipertimbangkan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir adalah perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat setempat. Misalnya, penggunaan teknologi pengolahan ikan atau pengolahan produk laut lainnya yang dapat meningkatkan nilai tambah produk dan daya saing masyarakat setempat.

5) *Legal* (Hukum). Faktor hukum yang perlu dipertimbangkan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan alam dan pembangunan masyarakat pesisir. Dalam pemberdayaan masyarakat pesisir, perlu ditingkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat

setempat tentang hak-hak mereka dan undang-undang yang dapat melindungi hak-hak mereka.

6) *Environmental* (Lingkungan). Dalam pemberdayaan masyarakat pesisir sangat penting untuk mempertimbangkan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu memerlukan pemahaman dari masyarakat pesisir akan pentingnya menjaga sumber daya alam dan lingkungan agar tetap lestari.

#### e. Teori Strategi.

Teori strategi telah ada sejak zaman kuno ketika para pemimpin militer seperti Sun Tzu dan Clausewitz mengembangkan teori strategi untuk digunakan dalam peperangan. Asal usul kata strategi berasal dari bahasa Yunani kuno "*Strategos*" yang terdiri dari dua kata yaitu kata *stratos* yang berarti tentara dan *agein* yang berarti pemimpin. Oleh karena itu, strategi dapat diartikan sebagai memimpin tentara. Para pemimpin tentara, juga dikenal sebagai *strategos-jenderal* atau panglima, bertanggung jawab mengatur manuver dan pertempuran, dan menggunakan kemampuan seni perang mereka untuk memimpin tentara dalam jumlah besar di atas peta<sup>74</sup>.

Teori strategi memiliki pendekatan yang berbeda dalam merumuskan dan melaksanakan strategi. Pemilihan teori strategi yang tepat tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh setiap organisasi. Menurut Alfred Chandler, strategi ialah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang suatu perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan itu<sup>75</sup>. Sedangkan menurut Anthony dan Govindarajan, strategi itu merupakan suatu proses dalam manajemen yang sistematis yang didefinisikan sebagai proses dalam pengambilan keputusan atas program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan sumber daya yang akan dialokasikan dalam setiap program selama beberapa

<sup>74</sup> Tim Pokja Bahan Ajar BS Strategi.(2023).Ketahanan Nasional. Lemhannas: Direktorat Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional. hal 3.

<sup>75</sup> Siti Khotijah.(2004). *Smart Strategy of "Marketing"* Persaingan Pasar. Bandung: Alfabeta.Hal 6., <http://repository.iainkudus.ac.id/>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2023, pukul 07.02 Wib.

tahun mendatang<sup>76</sup>. Dari kedua pendapat tersebut mempunyai kesamaan dengan definisi kontemporer strategi yaitu sebuah ilmu yang didasari oleh komponen Tujuan (*Ends*), Cara (*Ways*), dan sarana (*Means*) yang dilaksanakan dalam suatu rentang waktu (*Timeline*), distribusi tugas (*Tasking*) dan pengukuran keberhasilan (*Metrics*) serta diproyeksikan untuk menjaga keseimbangan ketiga komponen<sup>77</sup>.

## 11. Lingkungan Strategis.

Perkembangan lingkungan strategis yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat pesisir secara terpadu berbasis konsep ekonomi biru guna meningkatkan kesejahteraan nelayan dalam rangka ketahanan nasional, yaitu:

### a. Global.

Perkembangan lingkungan strategis global terkait dengan pemberdayaan masyarakat pesisir secara terpadu berbasis konsep ekonomi biru yaitu adanya *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang diadopsi oleh PBB pada tahun 2015, khususnya tujuan nomor:

- 1) Tujuan nomor 1: Tidak ada kemiskinan, yaitu membangun sistem sosial dan ekonomi yang inklusif untuk menghilangkan kemiskinan di seluruh dunia.
- 2) Tujuan nomor 3: Kesehatan yang baik dan kesejahteraan, yaitu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.
- 3) Tujuan nomor 4: Pendidikan berkualitas, yaitu memastikan semua orang memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
- 4) Tujuan nomor 14: Kehidupan di bawah air, yaitu mempromosikan konservasi dan pengelolaan kehidupan laut dan perairan yang berkelanjutan.

<sup>76</sup> Pelajaran.co.id.(2023). 20 Pengertian Strategi Menurut Pendapat Para Ahli Terlengkap, <https://www.pelajaran.co.id/>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2023, pukul 07.07 Wib.

<sup>77</sup> Op.Cit.

*SDGs* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir. Melalui pendekatan lintas sektor, akses yang lebih baik, perlindungan lingkungan, kemandirian ekonomi, maka *SDGs* dapat membantu memperkuat keberdayaan masyarakat pesisir dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

**b. Regional.**

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) telah menegaskan komitmennya untuk mengembangkan sektor perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di kawasan Asia Tenggara. Hal ini tercermin dalam Rencana Aksi ASEAN untuk Pengembangan Perikanan Berkelanjutan (*ASEAN Sustainable Fisheries Development Action Plan*) dan Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan ASEAN (*ASEAN Fisheries and Aquaculture Empowerment Program*).

- 1) *ASEAN Sustainable Fisheries Development Action Plan* bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan sektor perikanan di kawasan ASEAN melalui pendekatan berbasis ilmu pengetahuan, tata kelola yang baik, dan kerja sama yang erat antar negara anggota. Beberapa strategi yang digunakan antara lain adalah pengembangan teknologi dan praktik perikanan yang ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, dan peningkatan akses pasar<sup>78</sup>.
- 2) *ASEAN Fisheries and Aquaculture Empowerment*. Program bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di kawasan ASEAN melalui pemberdayaan ekonomi dan pengembangan keterampilan. Program ini mencakup beberapa kegiatan seperti pelatihan keterampilan, manajemen bisnis, pengembangan koperasi, dan pengembangan pasar yang adil dan berkelanjutan<sup>79</sup>.

Keberadaan kedua program tersebut dapat dimanfaatkan dalam hal bekerja sama sebagai bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat pesisir.

---

<sup>78</sup> ASEAN.(2018).*ASEAN Sustainable Fisheries Development Action Plan (2018-2022)*. ASEAN Secretariat.

<sup>79</sup> ASEAN.(2020).*ASEAN Fisheries and Aquaculture Empowerment Program*. ASEAN Secretariat.

**c. Nasional.**

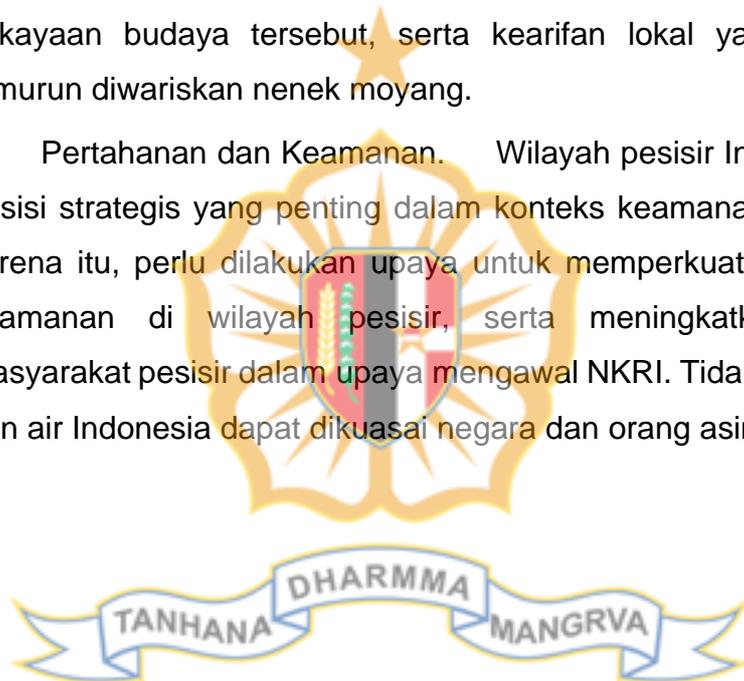
Perkembangan lingkungan strategis nasional Indonesia yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat pesisir secara terpadu berbasis ekonomi biru dapat dijelaskan melalui aspek Asta Gatra dalam ketahanan nasional, sebagai berikut:

- 1) Geografi. Indonesia memiliki kondisi geografi dengan ribuan pulau. Letak geografi yang demikian menjadi kendala aksesibilitas pemberdayaan masyarakat pesisir yang berada di pulau-pulau tersebut. Selain itu, beberapa wilayah pesisir rentan terhadap bencana alam.
- 2) Demografi. Penduduk di wilayah pesisir Indonesia memiliki beragam latar belakang etnis, agama, dan budaya. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat pesisir, perlu dilakukan pendekatan yang inklusif dan partisipasi untuk memperkuat keterlibatan dan peran masyarakat pesisir dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan wilayah pesisir mereka. Di samping itu, perlu mengimplementasikan Alinea IV Pembukaan UUD 1945, yaitu negara melindungi segenap tumpah darah seluruh kehidupan bangsa Indonesia termasuk para nelayan pesisir.
- 3) Sumber Kekayaan Alam. Wilayah pesisir Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya, seperti perikanan, pertanian, kehutanan, dan tambang. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut perlu dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan adil, sehingga masyarakat pesisir dapat terlibat secara langsung dan merasakan manfaat dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut secara berkesinambungan.
- 4) Politik. Kebijakan politik di Indonesia sangat berpengaruh pada pemberdayaan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat partisipasi politik masyarakat pesisir dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan wilayah pesisir mereka, dan memastikan perlindungan hak-hak masyarakat pesisir dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh politik di seluruh tingkatan.

5) **Ekonomi.** Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dapat dilakukan melalui aqua wisata, seperti pengembangan sektor pariwisata, pertanian, perikanan, dan industri kreatif yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat pesisir dalam mengelola usaha ekonomi kreatif di bidang aqua wisata.

6) **Sosial Budaya.** Masyarakat pesisir Indonesia memiliki kekayaan budaya yang beragam, seperti tradisi, bahasa, dan seni. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat identitas budaya masyarakat pesisir, serta meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap kekayaan budaya tersebut, serta kearifan lokal yang sudah turun temurun diwariskan nenek moyang.

7) **Pertahanan dan Keamanan.** Wilayah pesisir Indonesia memiliki posisi strategis yang penting dalam konteks keamanan nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat pertahanan dan keamanan di wilayah pesisir, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat pesisir dalam upaya mengawal NKRI. Tidak sejengkal tanah dan air Indonesia dapat dikuasai negara dan orang asing.



## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **12. Umum.**

Pada Bab III ini akan disajikan materi pembahasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kajian yang ditanyakan pada Bab I. Pembahasan diawali dengan tahap mengidentifikasi akar permasalahan dan akibat belum optimalnya pemberdayaan masyarakat pesisir secara terpadu berbasis konsep ekonomi biru. Pada tahap ini, proses analisis menggunakan kerangka teori Tri Bina (Tri Daya) dalam pemberdayaan masyarakat yang meliputi pemberdayaan manusianya, usahanya dan lingkungannya. Selanjutnya, guna memahami secara holistik, komprehensif dan integral anatomi permasalahan belum optimalnya pemberdayaan masyarakat pesisir, dianalisis menggunakan *PEST Analysis* (Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi). Pada tahap akhir akan dirumuskan strategi optimalisasi pemberdayaan masyarakat pesisir secara terpadu berbasis konsep ekonomi biru guna meningkatkan kesejahteraan nelayan dalam rangka mendukung ketahanan nasional.

#### **13. Akar Permasalahan dan Akibat Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Secara Terpadu Berbasis Konsep Ekonomi Biru Guna Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Nasional.**

Menurut teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Sumadyo (2001), terdapat Tri Bina (Tri Daya) dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yaitu pemberdayaan manusianya, usahanya, dan lingkungannya<sup>80</sup>. Pemberdayaan masyarakat pada aspek manusia merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatannya. Pemberdayaan manusia di bidang pendidikan dimaksudkan untuk memberdayakan kemampuan setiap individu secara optimal mencakup ranah pengetahuan, sikap dan keterampilan<sup>81</sup>. Pemberdayaan ranah sikap menghasilkan individu untuk berani melakukan

---

<sup>80</sup> Sumadyo, H.(2001).Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hal 113.

<sup>81</sup> Ibid.hal 223.

perubahan ekonomi yang secara terus menerus memperbaiki tingkat pendapatannya<sup>82</sup>. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan bertujuan untuk menuju kemandirian masyarakat sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatannya<sup>83</sup>. Pemberdayaan bidang usaha bertujuan mengembangkan usaha masyarakat untuk mendapatkan akses modal, teknologi, informasi, pasar, dan lain-lain. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat pesisir<sup>84</sup>. Pemberdayaan bidang lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga sumber daya alam dan mengelolanya secara berkelanjutan<sup>85</sup>. Teori ini sangat relevan sebagai kerangka teoritis untuk melihat secara holistik, komprehensif, dan integral keberhasilan pemberdayaan masyarakat pesisir.

**a. Pemberdayaan Manusianya.**

1) Pendidikan. Pemberdayaan pendidikan masyarakat adalah upaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan tujuan menumbuhkan semangat belajar masyarakat seumur hidup<sup>86</sup>. Pemerintah memegang peran penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang berkualitas. Dalam konteks ini, pemerintah telah mengeluarkan program pendidikan Wajib Belajar (Wajar) yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar<sup>87</sup>. Serta mengeluarkan program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program Wajar menjamin hak setiap warga negara, termasuk masyarakat pesisir untuk memperoleh pendidikan dasar yang berkualitas. Sedangkan dana BOS digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat pesisir dengan membantu sekolah menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, meliputi pembelian buku, peralatan, kegiatan ekstrakurikuler, dan pemeliharaan

---

<sup>82</sup> Ibid.hal 33.

<sup>83</sup> Kemenkes.(2013).Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

<sup>84</sup> Op.Cit.hal 34.

<sup>85</sup> Op.Cit.hal 34.

<sup>86</sup> Op.Cit.hal 111.

<sup>87</sup> Sekretariat Negara.(2008).Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.

infrastruktur. Secara prinsip, program-program pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat pesisir.

Namun demikian, saat ini mayoritas masyarakat pesisir belum optimal mencapai Wajar 9 tahun, seperti terlihat pada **Tabel 3 Bab II halaman 18** sebelumnya, sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat di Beberapa Kabupaten/Kota Pesisir**

No	Kabupaten/ Kota Pesisir	Tingkat Pendidikan Tertinggi		
		Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SMA
1	Tanjung Balai	24.538	16.575	39.046
2	Tanjung Pinang	28.958	17.076	47.867
3	Rembang	200.880	27.843	86.346
4	Tuban	488.504	213.642	205.289
5	Maumere	101.295	14.152	36.852
6	Ambon	26.525	21.679	124.016
7	Makasar	112.160	96.469	232.509
8	Cirebon	487.982	185.152	191.063
9	Ternate	17.137	4.060	7.325
10	Majene	36.830	12.713	23.816
<b>Total</b>		<b>1.524.809</b>	<b>609.361</b>	<b>994.129</b>

(Sumber data: bps.go.id Tahun 2023)

Berdasarkan data diatas, dari 10 sampel Kabupaten/Kota pesisir, terdapat 7 kota yang sebagian besar penduduknya lulusan SD. Sedangkan 3 kota yaitu Tanjung Balai, Tanjung Pinang, dan Makassar sebagian besar penduduknya lulusan SMA. Namun demikian, di ketiga kota tersebut masih ada penduduknya yang lulusan SD. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidikan masyarakat pesisir saat ini masih sangat rendah. Ketua Dewan Pakar Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Agi Revrison Baswir pada diskusi *online Outlook KNTI 2023* mengemukakan bahwa menurut data Direktorat Pendidikan Sekolah Dasar (Ditpsd), 80% nelayan memiliki pendidikan di bawah SMP<sup>88</sup>. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Muhammad Ihsan et. al. (2020) juga mendukung fakta bahwa anak-anak nelayan Suku Bajo di Kampung Bajo, NTB, sebagian besar hanya belajar sampai tamat SD, meskipun usia mereka sudah layak untuk melanjutkan ke pendidikan

<sup>88</sup> Themmy Doaly.(2023).Outlook KNTI: 80% Nelayan Kecil Berpendidikan di bawah SMP, <https://www.mongabay.co.id/>, diakses pada tanggal 9 Juni 2023, pukul 06.55 Wib.

menengah<sup>89</sup>. Akar permasalahan rendahnya pendidikan masyarakat pesisir tersebut adalah kurangnya sarana pendidikan, rendahnya kualitas dan kuantitas guru, ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan, sistem manajemen pendidikan yang belum baik, dan kurangnya kedisiplinan siswa. Secara nasional pun, SPM Bidang Pendidikan seperti pada **Lampiran IV** masih perlu ditingkatkan.

Tingkat pendidikan masyarakat pesisir yang masih rendah tersebut akan memberikan akibat dan dampak, antara lain:

- a) Mengakibatkan terbatasnya kesempatan masyarakat pesisir memperoleh pekerjaan yang lebih layak karena harus bersaing dengan mereka yang berpendidikan SMA, sehingga berdampak meningkatnya pengangguran dan kemiskinan bagi anak-anak nelayan yang hanya berpendidikan SD.
- b) Mengakibatkan masyarakat pesisir sulit berperan aktif dalam pembangunan di daerahnya, sehingga berdampak pada terhambatnya pengelolaan sumber daya wilayah pesisir.
- c) Mengakibatkan rendahnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan, sehingga berdampak orang tua kurang memberikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi kepada anak-anaknya.
- d) Dapat pula mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat pesisir terhadap kesehatan diri dan lingkungannya, sehingga berdampak pada menurunnya kualitas hidupnya.

Jika dikaitkan dengan konsep ekonomi biru, maka tingkat pendidikan masyarakat pesisir yang masih rendah ini akan menghambat tercapainya tujuan nomor 4 *SDGs*: Pendidikan Berkualitas, yaitu memastikan semua orang memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.

Berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan langkah-langkah pemberdayaan masyarakat pesisir untuk meningkatkan kualitas pendidikannya, antara lain: *Pertama*, meningkatkan kerjasama pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam

---

<sup>89</sup> Andi Muhammad Ihsan, et.al.(2020).Formal Child Education in the Fisherman Perspective of the Bajo Tribe in Bajo Village. Jurnal La Geografia Vol. 18 No 3 Juni 2020.

mengimplementasikan program Wajar 9 tahun. *Kedua*, meningkatkan pendapatan nelayan sehingga mampu mencukupi biaya pendidikan. *Ketiga*, meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pendidikan dan tenaga pengajar di wilayah pesisir. *Keempat*, meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir terhadap pentingnya pendidikan.

## 2) Kesehatan.

Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan mencakup upaya-upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sehingga dibutuhkan penyediaan layanan kesehatan dasar yang mudah, cepat, dan murah dengan memanfaatkan pengobatan “modern” atau tradisional yang telah teruji manfaatnya<sup>90</sup>. Sehingga masyarakat pesisir mampu mengatasi masalah kesehatan yang kompleks, seperti penyakit menular, kesehatan lingkungan, dan gizi buruk.

Salah satu program pemerintah dalam pemberdayaan kesehatan masyarakat yaitu adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Program JKN memberikan akses kesehatan dan perlindungan finansial kepada seluruh penduduk Indonesia, termasuk masyarakat nelayan. Program ini mencakup berbagai pelayanan kesehatan, seperti pelayanan dasar, spesialis, rawat inap, rawat jalan, obat, dan persalinan. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan dengan diterbitkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. Peraturan ini mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata di seluruh wilayah Indonesia, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Namun demikian, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan saat ini belum memberikan hasil yang optimal. Beberapa penelitian dan laporan menunjukkan bahwa akar permasalahan kondisi kesehatan masyarakat pesisir seperti data yang dipaparkan pada **Bab II halaman 20 s.d. 22** antara lain masih ditemukan penyakit menular seperti malaria,

---

<sup>90</sup> Sumadyo, H.(2001).Upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Daerah. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.hal 33.

demam berdarah, dan diare<sup>91</sup>. Masyarakat pesisir juga masih kekurangan gizi dan malnutrisi<sup>92</sup>. Masalah lain terkait dengan kesehatan masyarakat pesisir yaitu adanya kematian ibu saat melahirkan dan malnutrisi pada anak-anak<sup>93</sup>. Angka Kematian Ibu (AKI) di wilayah pesisir ikut memberikan kontribusi secara nasional, dimana AKI di Indonesia masih pada angka 350 orang per 100.000 kelahiran yang masih belum mencapai target 184 AKI per 100.000 kelahiran<sup>94</sup>. Berdasarkan data dan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesehatan masyarakat pesisir masih perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan menjadi lebih baik. Secara nasional, persentase Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, sesuai pada **Lampiran V** juga masih perlu ditingkatkan.

Lebih lanjut, jika akar permasalahan kesehatan masyarakat pesisir tidak segera diatasi akan memberikan akibat dan dampak pada kehidupan mereka, antara lain:

- a) Kesehatan nelayan yang rendah dapat mengakibatkan menurunnya produktivitas kerja nelayan sehari-hari, sehingga berdampak pada penambahan beban ekonomi bagi keluarga nelayan.
- b) Tingkat kesehatan masyarakat nelayan yang rendah dapat mengakibatkan penyebaran penyakit menjadi lebih mudah, sehingga berdampak pada peningkatan beban pelayanan dan perawatan kesehatan.
- c) Rendahnya tingkat kesehatan masyarakat dapat mengakibatkan peningkatan kelahiran *stunting*, sehingga berdampak serius pada perkembangan anak dan kesehatannya.

Jika dikaitkan dengan konsep ekonomi biru, tingkat kesehatan masyarakat pesisir yang masih rendah ini akan menghambat

---

<sup>91</sup> Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.(2017).Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016. Surabaya: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

<sup>92</sup> Susilowati, I. H., & Azizah, F.(2019).Kekurangan gizi pada anak balita di wilayah pesisir Kabupaten Indramayu. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, 10(2), 80-91.

<sup>93</sup> Salma,W.O, et.al.(2021).Buku Referensi Potret Masyarakat Pesisir Konsep Inovasi Gizi & Kesehatan. Jogjakarta: Deepublish.

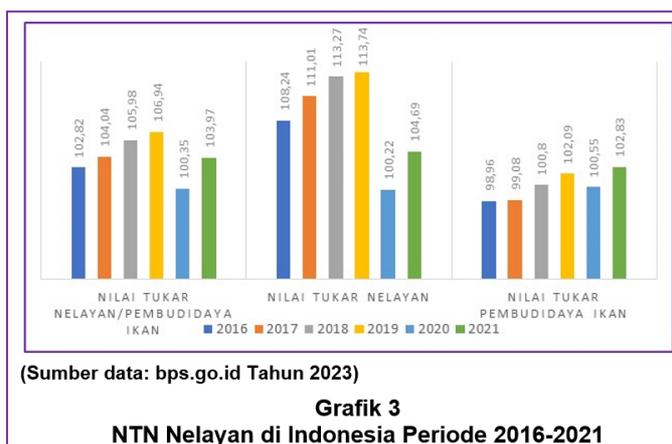
<sup>94</sup> Djoharis Lubis.(2023).Konsep Demografi Dalam Pembangunan IKN Terhadap Isu Kependudukan. Materi Slide Paparan, disampaikan kepada PPRA 65 Lemhannas RI pada tanggal 23 Mei 2023.

tercapainya tujuan nomor 3 *SDGs*: Kesehatan Yang Baik dan Kesejahteraan, yaitu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan langkah-langkah pemberdayaan masyarakat pesisir untuk meningkatkan kesehatannya, antara lain: *Pertama*, meningkatkan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan SPM Bidang Kesehatan. *Kedua*, meningkatkan pendapatan nelayan untuk mencukupi biaya kesehatan. *Ketiga*, meningkatkan ketersediaan sarana prasarana kesehatan dan tenaga dokter di wilayah pesisir, termasuk aksesibilitasnya. *Keempat*, meningkatkan kesadaran masyarakat nelayan terhadap kesehatan diri dan lingkungannya.

### 3) Pendapatan.

Pemberdayaan pendapatan masyarakat pesisir bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan cara memanfaatkan sumber daya alam di wilayah pesisir. Pemerintah telah mengeluarkan Program Pemberdayaan Ekonomi Nelayan yang bertujuan meningkatkan pendapatan nelayan. Program ini berupa pemberian pelatihan dan pendidikan kepada nelayan tentang teknik penangkapan ikan yang lebih efisien, pengolahan ikan, manajemen usaha, dan keterampilan lainnya. Keberhasilan pemberdayaan pendapatan nelayan dapat dilihat dari NTN, seperti ditampilkan pada **Grafik 3 Bab II halaman 23** sebelumnya, sebagai berikut:



Sebagai contoh, pada **Grafik 3**, pendapatan nelayan tangkap cenderung meningkat dari tahun 2016 hingga 2021, kecuali pendapatan nelayan tangkap pada tahun 2020 menurun karena dampak *COVID-19*. Secara keseluruhan, NTN mengalami peningkatan, meskipun peningkatannya masih sangat kecil jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) KKP Tahun 2020-2024, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Tahun 2020 : NTN sesuai target Renstra sebesar 102<sup>95</sup>, riil NTN sesuai Grafik 3 sebesar 100,22, tidak tercapai (-1,78).
- b) Tahun 2021 : NTN sesuai target Renstra sebesar 103<sup>96</sup>, riil NTN sesuai Grafik 3 sebesar 104,69, tercapai 1,69 point.
- c) Tahun 2022 : NTN sesuai target Renstra sebesar 105,46<sup>97</sup>, riil NTN sesuai Grafik 3 sebesar 106,46, tercapai 1,46 point.

Akar permasalahan pendapatan nelayan adalah kenaikan NTN masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan riil nelayan dan faktanya kondisi saat ini masyarakat pesisir masih banyak yang miskin. Pernyataan tersebut berdasarkan data jumlah penduduk pada Maret 2022 bahwa masih ada sebesar 9,54% (26,16 juta jiwa) penduduk yang miskin, dengan rincian angka kemiskinan di kota sebesar 11,82% (11,82 juta jiwa) dan di perdesaan, termasuk penduduk desa pesisir sebesar 14,34% (14,34 juta jiwa)<sup>98</sup>. Selain itu, kemiskinan masyarakat pesisir dapat dilihat dari tingkat kemiskinan ekstrem, dimana masyarakat nelayan pun belum seluruhnya sejahtera. Kondisi tersebut didukung oleh pernyataan Wakil Presiden RI, Bapak Ma'ruf Amin bahwa dari jumlah kemiskinan ekstrem di Indonesia di tahun 2022, sebanyak 12,5% (1,3

<sup>95</sup> KKP.(2020).Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/Permen-Kp/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

<sup>96</sup> Loc.cit.

<sup>97</sup> Loc.cit.

<sup>98</sup> Novia, D.S., et.al.(2022).Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia. BPS.

juta jiwa) di antaranya berada di wilayah pesisir dan mereka mempunyai masalah yang kompleks<sup>99</sup>.

Pendapatan masyarakat yang masih rendah seperti diuraikan di atas, akan memberikan akibat dan dampak, antara lain:

- a. Mengakibatkan nelayan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga berdampak menurunnya kualitas hidup nelayan.
- b. Mengakibatkan ketidakmampuan nelayan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, sehingga berdampak pada kesehatan yang buruk.
- c. Mengakibatkan terbatasnya akses nelayan terhadap pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, sehingga berdampak terbatasnya kesempatan memperoleh pekerjaan di luar sektor perikanan.

Jika dikaitkan dengan konsep ekonomi biru, tingkat pendapatan masyarakat pesisir yang masih rendah ini akan menghambat tercapainya tujuan nomor 1 *SDGs*: Tidak Ada Kemiskinan, yaitu membangun sistem sosial dan ekonomi yang inklusif untuk menghilangkan kemiskinan di seluruh dunia.

Berdasarkan akar permasalahan masih rendahnya pendapatan nelayan, maka diperlukan langkah-langkah, antara lain: *Pertama*, pemerintah memberikan subsidi harga BBM pada nelayan tradisional. *Kedua*, pengendalian harga ikan dan bahan-bahan untuk operasional penangkapan ikan. *Ketiga*, mencari alternatif pendapatan lain selama nelayan tidak pergi ke laut karena cuaca. *Keempat*, peningkatan sarana dan prasarana dan infrastruktur operasional perikanan.

## b. Pemberdayaan Usahanya.

### 1) Akses Permodalan.

Permodalan yang cukup untuk usaha masyarakat nelayan di desa pesisir sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas pasar, dan meningkatkan produksi<sup>100</sup>. Sebaliknya,

<sup>99</sup> Heru Haetami.(2022).Angka Kemiskinan di Wilayah Pesisir Lebih Tinggi dan Kompleks, Upaya Pemerintah?, <https://kbr.id/nasional/122021/angka-kemiskinan-di-wilayah-pesisir-lebih-tinggi-dan-kompleks-upaya-pemerintah/107146.html>, diakses pada tanggal 6 Februari 2023, pukul 18.30 Wib.

<sup>100</sup> Didi Haryono, et.al.(2022).Pemberdayaan dan Pengembangan UKM Masyarakat Pesisir Berbasis Platform Digital. Jurnal Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.5, (3). hal, 544-553.

permodalan yang kurang dapat menghambat pertumbuhan usaha masyarakat nelayan dan mengurangi daya saing di pasar<sup>101</sup>. KKP telah menyediakan program Pembiayaan Mikro dengan tujuan memberikan akses pembiayaan usaha masyarakat nelayan dengan bunga rendah dan proses pengajuan yang sederhana<sup>102</sup>. Meliputi pinjaman modal usaha, pembiayaan alat tangkap ikan, dan pembiayaan pengembangan usaha perikanan. Namun demikian, penelitian oleh Sahputra menunjukkan bahwa akar permasalahan pemodalannya untuk usaha masyarakat nelayan masih menemui kendala dalam pengajuan pinjaman bank karena perlu agunan, kurangnya akses ke pasar modal, dan keterbatasan akses ke modal ventura<sup>103</sup>. Sebagai pelaku usaha, masyarakat nelayan memang masih menghadapi kendala, yaitu lemahnya struktur permodalan dan keterbatasan dalam memperoleh modal ke lembaga atau sumber-sumber permodalan karena persyaratan agunan yang tidak bisa dipenuhi dalam memperoleh kredit (Alimarwan Hanan, 2003)<sup>104</sup>.

Jika ketersediaan permodalan bagi usaha masyarakat nelayan tidak diberikan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka akan memberikan akibat dan dampak yang kurang baik terhadap usaha nelayan, antara lain:

- a) Dapat mengakibatkan kesulitan bagi nelayan untuk membeli peralatan perikanan yang modern dan efisien, sehingga berdampak pada keterbatasan memperoleh hasil tangkapan.
- b) Dapat mengakibatkan terbatasnya investasi dalam pengembangan usaha perikanan, sehingga berdampak ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial di masyarakat nelayan.

---

<sup>101</sup> Hamsal, et.al.(2023).Pengembangan Ekonomi Nelayan Kepenghuluan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4, No. 1 Januari 2023, hal. 9-15.

<sup>102</sup> Dirjen Perikanan Tangkap.(2023).<https://kkp.go.id/djpt/infografis-detail/1281-pembiayaan-mikro-solusi-mudah-permodalan-nelayan>, diakses pada tanggal 22 Mei 2023, pukul 19.05 Wib.

<sup>103</sup> Sahputra, H., & Koto, M. S.(2022).Sosialisasi Pelatihan dan Pendampingan Pelaku Usaha UMKM di Desa Kebun Pisang Kabupaten Tapanuli Tengah. COVIT (*Community Service of Health*), 2(2), 7-13.

<sup>104</sup> Faroham Syarif.(2020).Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Makro, Kecil dan Menengah. Makassar.Yayasan Barcode.

Dari uraian diatas, permodalan berperan strategis dalam rangka mengembangkan usaha masyarakat nelayan. Kaitannya dengan konsep ekonomi biru, jika tingkat pendapatan dari usaha masyarakat pesisir yang masih rendah akan menghambat tercapainya tujuan nomor 1 *SDGs*: Tidak Ada Kemiskinan, yaitu membangun sistem sosial dan ekonomi yang inklusif untuk menghilangkan kemiskinan di seluruh dunia.

Dalam rangka mengatasi akar permasalahan permodalan dalam pemberdayaan usaha masyarakat nelayan, maka diperlukan langkah-langkah, antara lain: *Pertama*, meskipun pemerintah telah memberikan dukungan modal, mungkin dapat diberikan dengan suku bunga yang lebih rendah. *Kedua*, meningkatkan manajemen keuangan usaha masyarakat nelayan untuk menarik pemodal. *Ketiga*, menjalin hubungan dengan lembaga keuangan untuk memperoleh modal usaha. *Keempat*, menerapkan teknologi finansial untuk memperoleh akses ke permodalan dengan cepat dan mudah tanpa harus memenuhi persyaratan yang rumit.

## 2) Teknologi Usaha Masyarakat Nelayan.

Penerapan teknologi modern dalam proses produksi diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kekuatan bersaing bagi usaha masyarakat nelayan. Penggunaan teknologi yang tepat guna dan modern dalam proses produksi dapat menurunkan biaya produksi dan biaya operasional, namun sebaliknya jika menggunakan teknologi yang masih tradisional. Oleh karena itu, pengembangan teknologi usaha harus menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kapasitas usaha nelayan yang pada gilirannya dapat mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat nelayan berbasis ekonomi biru.

Kenyataannya, beberapa penelitian memberikan kesimpulan bahwa masyarakat nelayan masih menggunakan teknologi tradisional dalam usahanya. Penelitian oleh Eko Setiawan menunjukkan bahwa dalam proses produksi, masyarakat nelayan Kabupaten Bangka masih memakai peralatan yang tradisional dan dilakukan secara manual,

sehingga memakan waktu dan tenaga yang banyak<sup>105</sup>. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Yulianti Debby Tri menemukan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu melalui pengolahan ikan laut tidak berhasil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk penggunaan teknologi tradisional dan kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat nelayan tentang teknik pengolahan ikan laut<sup>106</sup>.

Masyarakat nelayan yang masih menggunakan teknologi tradisional dalam proses produksi usahanya akan memberikan akibat dan dampak, sebagai berikut:

- a) Dapat mengakibatkan rendahnya kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan, sehingga berdampak menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
- b) Mengakibatkan proses produksi membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup banyak, sehingga berdampak mengurangi pendapatan.
- c) Mengakibatkan produk yang dihasilkan kurang menarik dan kurang kompetitif, sehingga berdampak menurunnya daya saing.

Berkaitan dengan konsep ekonomi biru, jika teknologi yang diterapkan dalam usaha nelayan masih tradisional, maka akan menyebabkan pendapatan nelayan menjadi kecil, sehingga menghambat tercapainya tujuan nomor 1 SDGs: Tidak Ada Kemiskinan, yaitu membangun sistem sosial dan ekonomi yang inklusif untuk menghilangkan kemiskinan di seluruh dunia.

Berdasarkan akar permasalahan diatas, maka perlu pemberdayaan masyarakat nelayan untuk menggunakan teknologi modern dalam usahanya, antara lain: *Pertama*, memberikan pembiayaan yang terjangkau dalam pengadaan teknologi modern yang dibutuhkan nelayan. *Kedua*, membuat kerja sama dengan perusahaan teknologi

<sup>105</sup> Eko Setiawan, et.al.(2021).Peningkatan Produktivitas Makanan Khas Bangka Pada UMKM " Kakap" Menggunakan Teknologi Tepat Guna di Nelayan 2 Sungailiat Kab.Bangka. Proseding Seminar Nasional Unimus, Vol 4, hal 2060-2066.

<sup>106</sup> Yulianti, Debby Tri.(2019).Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Pengolahan Ikan Laut di Kecamatan Kampung Melayu Oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Diploma Thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

modern untuk memperoleh akses terhadap teknologi terbaru. *Ketiga*, membuat jaringan dan kemitraan dengan usaha lainnya untuk memperoleh informasi tentang teknologi terbaru dan cara penggunaannya.

### 3) Akses Pemasaran.

Akses pemasaran yang baik sangat diperlukan untuk dapat mencapai pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan produk dari usaha masyarakat nelayan. Hal ini akan berdampak positif pada pendapatan masyarakat nelayan. Dengan merancang strategi pemasaran yang baik, maka aktivitas pemasaran dapat dijalankan dengan lebih efektif sehingga dapat membantu usaha masyarakat nelayan berkembang dengan cepat. Terlebih pada era transformasi digital, pemasaran digital dapat membantu meningkatkan penjualan dan ekspos bisnis ke pasar yang lebih luas.

Pemerintah Indonesia sedang mendorong digitalisasi UMKM sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan sektor ekonomi digital. Namun, masih banyak para nelayan yang belum memanfaatkan pemasaran digital untuk mempromosikan produk mereka sehingga usahanya kurang dikenal di masyarakat. Pada tahun 2024, pemerintah menargetkan sebanyak 30 juta pelaku UMKM untuk melakukan digitalisasi UMKM, namun menurut *Indonesia E-Commerce Association (idEA)*, pada bulan Mei 2022, hanya tercapai sekitar 13,7 juta pelaku UMKM yang sudah terlibat dalam ekosistem digital, atau sekitar 21 persen dari total jumlah pelaku UMKM<sup>107</sup>.

Jika para nelayan tidak menggunakan basis digital dalam pemasaran produknya, akan mengakibatkan kehilangan peluang untuk memperluas jangkauan pasar dan menurunnya penjualan, sehingga berdampak pada kemunduran usaha yang dilakukannya. Jika dikaitkan dengan konsep ekonomi biru, permasalahan tersebut akan menghambat tercapainya tujuan nomor 1 *SDGs*: Kemiskinan, yaitu membangun

---

<sup>107</sup> Portal Informasi Indonesia.(2022).Mengoptimalkan Digitalisasi UMKM. <https://www.indonesia.go.id/>, diakses pada tanggal 2 Juni 2023, pukul 08.07 Wib.

sistem sosial dan ekonomi yang inklusif untuk menghilangkan kemiskinan di seluruh dunia.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu pemberdayaan usaha masyarakat pesisir sehingga mempunyai akses pemasaran yang luas dan kuat, antara lain: *Pertama*, meningkatkan kualitas dan ketersediaan produk yang dihasilkan sehingga mempunyai daya saing. *Kedua*, memberikan informasi dan membina kemampuan nelayan untuk melihat kebutuhan pembeli/pasar. *Ketiga*, melaksanakan pelatihan dan mendorong penggunaan digitalisasi usaha masyarakat nelayan. *Keempat*, pemerintah perlu menyediakan infrastruktur internet yang memadai di seluruh wilayah pesisir sebagai sarana digitalisasi usaha masyarakat nelayan.

### c. Pemberdayaan Lingkungannya.

Hal penting lain dalam pemberdayaan masyarakat pesisir yaitu mengupayakan agar masyarakat memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Adapun yang menjadi fokus bahasan ini yaitu meningkatnya kesadaran nelayan untuk tidak menangkap ikan secara merusak (*destructive fishing*), tidak menangkap ikan secara berlebihan (*over fishing*), dan meningkatnya kesadaran untuk menjaga kelestarian hutan mangrove.

#### 1) *Destructive Fishing*.

*Destructive fishing* merujuk pada metode penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan merugikan ekosistem laut<sup>108</sup>. *Destructive fishing* juga mencakup praktik-praktik penangkapan ikan berlebihan, penangkapan ikan dengan alat yang tidak selektif, dan penangkapan ikan di kawasan yang dilindungi<sup>109</sup>. Metode penangkapan dengan cara *destructive fishing* dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap ekosistem laut dan sumber daya ikan.

Kebijakan pemerintah terkait dengan pencegahan *destructive fishing* dapat dilihat pada Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun

<sup>108</sup> Agnew, D. J., et.al.(2009).Estimating the worldwide extent of illegal fishing. PLoS ONE, 4(2), e4570. doi: 10.1371/journal.pone.0004570.

<sup>109</sup> Christensen, V., & Pauly, D.(1995).Fishing down marine food webs: It is far more pervasive than we thought. Bulletin of Marine Science, 57(2), 638-656.

2004 Tentang Perikanan, yang menjelaskan tentang larangan penangkapan ikan dengan cara *destructive fishing*. Kebijakan pemerintah untuk melarang penangkapan ikan secara merusak sudah diantisipasi oleh pemerintah, namun para nelayan di beberapa kota/kabupaten pesisir masih melakukan penangkapan ikan secara merusak, seperti ditunjukkan pada **Tabel 5 Bab II halaman 26**, sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Temuan dan Penanganan Kasus *Destructive Fishing* di Indonesia Tahun 2013-2019**

No	Provinsi	Bom	Racun	Setrum	Alkap	Jumlah
1	Sulawesi Selatan	451	19	0	1	471
2	Kalimatan Selatan	0	0	57	0	57
3	Lampung	19	1	7	3	30
4	NTT	14	4	0	0	18
5	Gorontalo	8	3	0	1	12
6	Sulawesi Tenggara	8	1	1	0	10
7	NTB	8	1	0	0	10
8	Sumatera Barat	3	4	1	0	8
9	Jawa Barat	0	0	8	0	8
10	Kepulauan Riau	3	2	0	0	5
11	Sumatera Utara	2	0	1	0	5
12	Sulawesi Utara	2	1	0	0	3
13	Sulawesi Tengah	2	1	0	0	3
14	Papua	3	0	0	0	3
15	Kalimantan Barat	0	0	2	0	3
16	Kalimantan Timur	2	0	0	0	2
17	Jawa Timur	1	0	0	1	2
18	Sumatera Selatan	0	0	0	1	1
19	Maluku	1	0	0	0	1
20	Bali	0	1	0	0	1
	<b>Jumlah</b>	<b>529</b>	<b>40</b>	<b>77</b>	<b>7</b>	<b>653</b>

(Sumber data : statistik kkp.go.id Tahun 2023)

Berdasarkan tabel tersebut, pada kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2019 telah ditemukan 653 kasus *destructive fishing* di 20 provinsi. Kejadian *destructive fishing* paling banyak ditemukan di provinsi Sulawesi Selatan yaitu 471 kasus, yang dilakukan dengan cara pengeboman dan dengan racun. Jumlah nelayan di Sulawesi Selatan merupakan jumlah paling banyak kedua setelah Jawa Timur yaitu 169.718 orang<sup>110</sup>. Hal ini menyebabkan peluang terjadinya pelanggaran *destructive fishing* menjadi lebih tinggi. Data tersebut dapat menjadi dasar bahwa nelayan masih belum mempunyai kesadaran dalam memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan.

<sup>110</sup> KKP.(2020).Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2022 Volume 1.

Jika praktek *destructive fishing* dibiarkan tanpa pengawasan yang optimal, maka dapat berakibat pada kerusakan ekosistem laut, sehingga berdampak menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Jika dikaitkan dengan konsep ekonomi biru, maka praktik *destructive fishing* akan menghambat tercapainya, tujuan nomor 14 SDGs: Kehidupan di Bawah Air, yaitu mempromosikan konservasi dan pengelolaan kehidupan laut dan perairan yang berkelanjutan.

Terkait dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka perlu pemberdayaan masyarakat agar tidak melakukan *destructive fishing* yang dapat dilakukan dengan cara: *Pertama*, memberikan pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat tentang dampak negatif dari *destructive fishing* terhadap lingkungan dan kelangsungan hidup ikan. *Kedua*, mendorong penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dalam kegiatan perikanan. *Ketiga*, mendorong pengembangan kegiatan perikanan yang berkelanjutan, seperti budidaya ikan, yang dapat mengurangi tekanan terhadap sumber daya ikan di laut. *Keempat*, meningkatkan pengawasan dan menerapkan hukuman yang tegas bagi pelaku *destructive fishing*.

## 2) *Over Fishing*.

*Over fishing* merujuk pada kegiatan penangkapan ikan yang melebihi tingkat pemulihan sumber daya ikan alami. Ini terjadi ketika ikan yang ditangkap dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada tingkat reproduksi ikan, sehingga populasi ikan tidak memiliki kesempatan untuk pulih secara alami,<sup>111</sup> yang pada akhirnya dapat mengarah pada kepunahan spesies ikan tertentu<sup>112</sup>.

Pencegahan terhadap *over fishing*, telah diantisipasi oleh Pemerintah, seperti pada Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Pasal ini mengatur tentang jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan dengan tujuan

<sup>111</sup> Worm, B., et.al.(2009).Rebuilding global fisheries. Science, 325(5940), 578-585. doi: 10.1126/science.1173146.

<sup>112</sup> Pauly, D., et.al.(2002).Towards sustainability in world fisheries. Nature, 418(6898), 689-695. doi: 10.1038/nature01017.

menjaga keseimbangan jumlah ikan di wilayah Indonesia. Pemerintah juga menerbitkan PermenKP RI Nomor 18/Permen-Kp/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Namun demikian, permasalahan *over fishing* masih terjadi di perairan Indonesia, seperti terlihat pada **Tabel 6 Bab II halaman 28** sebelumnya, sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Jenis Ikan Dengan Tingkat Pemanfaatan *Over-exploited***

WPP	Cumi-cumi	Ikan Demersal	Ikan Karang	Ikan Pelagis Besar	Ikan Pelagis Kecil	Kepiting	Lobster	Rajungan	Udang Penaeid
WPP 571		0		0		0	0		
WPP 572			0	0			0		0
WPP 573	0						0		
WPP 711						0	0		0
WPP 712		0		0					
WPP 713	0		0		0		0		0
WPP 714			0				0		
WPP 715			0				0		
WPP 716			0						
WPP 717			0						0
WPP 718	0		0						

(Sumber data: statistik.kkp.go.id Tahun 2023)  
Keterangan : 0 = Pembatasan Pemanfaatan Ikan Pada WPP terkait.

Tabel tersebut memberikan informasi bahwa masih terjadi *over-exploited* pada jenis ikan tertentu. Sebagai contoh pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 571, jenis ikan Demersal (*Demergere*), ikan Pelagis Besar (*Katsuwonus pelamis*), Kepiting (*Brachyura*) dan Lobster (*Nephropidae*) diberi tanda lingkaran warna merah (0) yang artinya penangkapan jenis ikan tersebut telah melebihi batas dan tidak diizinkan untuk ditangkap lagi. Jenis ikan dengan tingkat pemanfaatan *over-exploited* juga dapat dilihat pada WPP lainnya. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa kasus *over fishing* masih terjadi di perairan Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan bahwa Indonesia masih menghadapi ancaman *over fishing* yang dapat menyebabkan penurunan jumlah ikan dan produksi. Namun demikian, pemerintah telah menetapkan peraturan dan pembatasan untuk mencegah terjadinya *over fishing* di Indonesia

dan memastikan bahwa ancaman ini tidak terulang di masa depan<sup>113</sup>. Penelitian tentang keberlanjutan ikan Kerapu di Pulau Leonardus, Kepulauan Spermonde, Sulawesi Selatan, menemukan bahwa indeks keberlanjutan ikan Kerapu Sunu (*Plectropomus leopardus*) di Kepulauan Spermonde hanya sebesar 32,97, yang menunjukkan bahwa ikan Kerapu telah dieksploitasi terlalu banyak<sup>114</sup>. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan (Komnaskajiskan) melalui KepmenKP Nomor 19 Tahun 2022 menunjukkan bahwa ikan pelagis besar dimanfaatkan sebesar 130% dan ikan demersal sebesar 110% dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) di WPP 712 (Laut Jawa)<sup>115</sup>.

Jika kegiatan *over fishing* tidak diawasi dan dikendalikan akan mempunyai akibat dan dampak yang buruk terhadap lingkungan dan kehidupan nelayan, antara lain:

- a) *Over fishing* dapat mengakibatkan penurunan populasi ikan, sehingga berdampak menurunnya pendapatan nelayan.
- b) Selain itu, *over fishing* juga dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut, sehingga berdampak hilangnya sumber daya laut.

Seperti halnya *destructive fishing*, jika *over fishing* tidak dikendalikan akan menghambat tercapainya tujuan nomor 14 SDGs: Kehidupan di Bawah Air, yaitu mempromosikan konservasi dan pengelolaan kehidupan laut dan perairan yang berkelanjutan.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir untuk mencegah praktik *over fishing*, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan, antara lain: *Pertama*, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang

<sup>113</sup> CNBC Indonesia.(2021).Menteri KKP Trenggono: Jangan Ada Lagi Overfishing di NKRI!. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210717092719-4-261621/>, diakses pada tanggal 31 Mei 2023, pukul 05.26 Wib.

<sup>114</sup> Ernaningsih, et.al.(2023).Analisis Keberlanjutan Ikan Kerapau Sunu (P. Leonardus) Di Kepulauan Spermande Sulawesi Selatan. Jurnal Akuakultur, Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap dan Ilmu Kelautan Vol 6 No 1 Juni 2023 Hal.24-34.

<sup>115</sup> KKP.(2022).Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan Yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik.

pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya ikan. *Kedua*, memberdayakan nelayan untuk mengelola sumber daya ikan secara berkelanjutan. *Ketiga*, mendorong pengembangan teknologi dan praktik perikanan yang ramah lingkungan. *Keempat*, memberlakukan peraturan yang ketat untuk membatasi jumlah ikan yang dapat ditangkap. *Kelima*, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum.

### 3) Kelestarian Hutan Mangrove.

Mangrove menyediakan habitat penting bagi berbagai spesies tanaman dan hewan seperti satwa liar, ikan, moluska, dan burung migran. Mangrove juga merupakan sumber mata pencaharian bagi masyarakat pesisir yang bergantung pada kegiatan seperti perikanan, budidaya kerang, dan pariwisata. Kerusakan mangrove dapat mengakibatkan hilangnya kelangsungan hidup berbagai spesies, serta mengurangi keanekaragaman hayati secara keseluruhan<sup>116</sup>.

Peraturan Presiden RI Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove dan Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, khususnya pada Pasal 60 Ayat (2) huruf b menyatakan bahwa "*Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berkewajiban menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*".

Kebijakan tentang menjaga kelestarian hutan mangrove telah dibuat oleh Pemerintah dengan tujuan untuk menjaga kelestarian hutan mangrove, namun demikian tingkat kerusakan hutan mangrove di Indonesia masih cukup luas, dengan fakta bahwa saat ini masih terdapat hutan mangrove dengan kategori tumbuh sedang dan jarang, seperti terlihat pada **Gambar 2 Bab II halaman 27** sebelumnya, sebagai berikut:

---

<sup>116</sup> Giri, C., et.al.(2011).Status and distribution of mangrove forests of the world using earth observation satellite data. *Global Ecology and Biogeography*, 20(1), 154-159. doi: 10.1111/j.1466-8238.2010.00584.x.



Data dari *Environmental Performance Index 2022* (EPI) juga memberikan informasi bahwa pelestarian lingkungan Indonesia termasuk dalam kategori "buruk" di Asia Pasifik, dengan nilai 28,2 dari 100, yang menempatkan Indonesia pada urutan 164 dari 180 negara yang disurvei<sup>117</sup>.

Hutan mangrove mengandung sumber daya yang besar, maka kerusakan mangrove dapat berakibat dan dampak negatif, antara lain:

- 1) Kerusakan hutan mangrove dapat mengakibatkan pengurangan sumber daya bagi masyarakat yang bergantung pada hutan mangrove untuk mencari ikan, udang, dan kerang, sehingga berdampak pada berkurangnya pendapatan nelayan.
- 2) Hutan mangrove berfungsi sebagai penahan abrasi dan gelombang laut, maka jika hutan mangrove rusak akan berakibat rentan terhadap abrasi dan erosi, sehingga berdampak menurunnya ketahanan bencana.

Kerusakan hutan mangrove tentu akan menghambat tercapainya, tujuan nomor 14 *SDGs*: Kehidupan Di Bawah Air, yaitu mempromosikan konservasi dan pengelolaan kehidupan laut dan perairan yang berkelanjutan.

<sup>117</sup> Adi Ahdiat.(2022).Pelestarian Lingkungan Indonesia Tergolong Buruk di Asia Pasifik, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/25/>, diakses pada tanggal 11 Mei 2023, pukul 02.32 Wib.

Kerusakan hutan mangrove menjadi perhatian serius dari pemerintah, untuk itu perlu pemberdayaan masyarakat pesisir agar mempunyai kepedulian menjaga kelestarian hutan mangrove, yang dapat dilakukan antara lain: *Pertama*, menggalakkan gerakan masyarakat penanaman kembali hutan mangrove. *Kedua*, mencari alternatif penghasilan lain bagi nelayan sehingga mereka tidak memanfaatkan sumber daya hutan mangrove apalagi dengan cara tidak berkelanjutan. *Ketiga*, pengendalian pembukaan tutupan hutan mangrove. *Keempat*, meningkatkan pengawasan dan hukuman tegas bagi yang merusak hutan mangrove.

Selain yang telah diuraikan di atas, pemerintah telah menetapkan kebijakan pemberdayaan masyarakat dengan diterbitkan PermenKP RI Nomor 40/Permen-Kp/2014 Tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat. Pasal 10 PermenKP ini menyatakan sebagai bentuk amanat bahwa "*Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.*" Pada pelaksanaannya, berdasarkan data pada **Bab II halaman 17**, terdapat beberapa program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga/kementerian lain, antara lain yang dilaksanakan oleh KKP, KemendesPDTT, Kemensos, Kemenkes, dan TNI Angkatan Laut. Program-program ini menunjukkan bahwa setiap kelembagaan mempunyai kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraannya, namun disisi lain juga memunculkan permasalahan. Analisa lebih lanjut menunjukkan bahwa program-program tersebut saling tumpang tindih kegiatan, seperti yang terlihat pada **Lampiran III**. Sebagai contoh, Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PMP-PPK), yang dilaksanakan oleh KKP mempunyai persamaan program dan kegiatan dengan:

- a. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yang dilaksanakan oleh Kemendes PDTT, yaitu mempunyai persamaan pada kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat dan

pengembangan sarana prasarana sosial ekonomi dan Pengembangan kelembagaan masyarakat.

b. Program Keluarga Harapan (PKH), yang dilaksanakan oleh Kemensos yaitu mempunyai persamaan pada kegiatan pengembangan sarana prasarana sosial ekonomi dan peningkatan kesehatan/kualitas lingkungan.

c. Program Kampung Nelayan Maju (Kalaju), yang dilaksanakan oleh Ditjen Penangkapan Ikan KKP, yaitu mempunyai persamaan pada kegiatan pengembangan sarana prasarana sosial ekonomi dan kesehatan/kualitas lingkungan.

d. Program Kampung Bahari Nusantara (KBN), yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut, yaitu mempunyai persamaan pada kegiatan sarana prasarana sosial ekonomi dan pengembangan kelembagaan masyarakat.

e. Program Pelayanan Kesehatan (PPK) di Wilayah Terpencil, Perbatasan, yang dilaksanakan oleh Kemenkes, yaitu mempunyai persamaan pada kegiatan peningkatan Kesehatan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat saat ini masih belum terpadu, dimana program satu dengan program lainnya masih tumpang tindih kegiatan. Padahal jika merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa PW3K diselenggarakan berdasarkan keterpaduan, yaitu *“mengintegrasikan kebijakan dengan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan horizontal antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah”*. Selain itu, berdasarkan studi literatur dan pustaka serta juga wawancara dengan Direktur Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pada tanggal 16 Mei 2023, menyatakan bahwa saat ini memang belum ada penyusunan Rencana Aksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di KKP.

Program-program pemberdayaan masyarakat yang saling tumpang tindih tersebut tentu akan memberikan akibat dan dampak, antara lain sebagai berikut:

- 1) Tumpang tindih program atau kegiatan seringkali mengakibatkan inefisiensi anggaran yang cukup besar dan memberikan dampak pada defisit anggaran pemerintah.
- 2) Program-program pemberdayaan masyarakat pesisir yang tumpang tindih cenderung tidak terkoordinasi dan terpadu dengan baik yang mengakibatkan kurangnya efektivitas dan efisiensi dari program tersebut, yang berdampak menghambat terwujudnya tujuan pembangunan .

Oleh karena itu, guna mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat pesisir, diperlukan langkah-langkah, antara lain: *Pertama*, di Kemenko Maritim dan Investasi dibentuk tim Terpadu Gerakan Nasional Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Guna Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan. *Kedua*, koordinasi antara pihak terkait untuk mengidentifikasi kegiatan yang tumpang tindih dan memadukan kegiatan supaya efektif dan efisien.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa akar permasalahan belum optimalnya pemberdayaan masyarakat pesisir secara terpadu berbasis konsep ekonomi biru, sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan masyarakat pesisir belum optimal yang ditandai dengan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pesisir dengan mayoritas lulusan SD.
- b. Pemberdayaan masyarakat pesisir bidang kesehatan belum optimal karena masih ditemukan penyakit menular seperti malaria, demam berdarah, dan diare. Masyarakat pesisir juga masih kekurangan gizi dan malnutrisi. Masalah lain kesehatan masyarakat pesisir yaitu masalah kesehatan ibu dan anak seperti kematian ibu saat melahirkan, dan malnutrisi pada anak-anak.
- c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan pendapatan nelayan belum optimal, dimana capaian NTN masih relatif kecil dibanding dengan target yang ditentukan dan faktanya masyarakat pesisir masih dalam kemiskinan.

- d. Akses permodalan masih menjadi kendala bagi sebagian usaha-usaha nelayan.
- e. Usaha masyarakat nelayan belum terlaksana dengan optimal yang disebabkan teknologi yang digunakan dalam proses produksi masih tradisional.
- f. Nelayan memiliki kendala dalam akses pemasaran untuk menjual produk usahanya.
- g. Pemberdayaan masyarakat pesisir terhadap kesadaran untuk menjaga lingkungan juga belum optimal, dimana masih ditemukan pelanggaran penangkapan dengan cara merusak (*destructive fishing*) di Indonesia.
- h. Begitu pula dengan kesadaran untuk menjaga lingkungan juga belum optimal karena masih terjadi *over fishing*.
- i. Pelestarian hutan mangrove masih belum terwujud karena masih adanya kerusakan hutan mangrove di wilayah-wilayah pesisir Indonesia.
- j. Terdapat beberapa program pemberdayaan masyarakat pesisir dari instansi/kementerian yang tumpang tindih kegiatan.

#### **14. Anatomi Permasalahan Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Secara Terpadu Berbasis Konsep Ekonomi Biru Guna Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Nasional.**

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada subpasal 13, telah diketahui akar permasalahan belum optimalnya pemberdayaan masyarakat pesisir secara terpadu berbasis ekonomi biru. Selanjutnya pada subpasal 14 ini, akan diuraikan anatomi permasalahan yaitu menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya akar permasalahan tersebut dengan menggunakan metode *PEST Analisis*, sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pesisir dengan mayoritas lulusan SD, dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:**

- 1) Aspek Politik. Berdasarkan Pasal 4 pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar, *bahwa "Program wajib belajar diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah sesuai*

*kewenangannya, atau masyarakat*". Namun, pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum sepenuhnya berhasil melaksanakan kebijakan program Wajar di wilayah pesisir. Hal ini disebabkan karena 20% dari APBN sebagian besar digunakan untuk pembayaran gaji, honor guru, dan biaya perjalanan dinas. Sedangkan pembiayaan untuk implementasi terlaksananya Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Wajar 9 bahkan 12 tahun kurang perolehan.

Untuk itu, dalam mengoptimalkan program Wajar, diperlukan langkah-langkah antara lain: *Pertama*, memadukan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan Wajar. *Kedua*, melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan 100%. *Ketiga*, memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan program Wajar.

2) Aspek Ekonomi. Aspek ekonomi yang memengaruhi rendahnya kualitas pendidikan masyarakat pesisir yaitu masih rendahnya pendapatan nelayan. Keterbatasan ekonomi mengakibatkan nelayan kesulitan memenuhi kebutuhan dana pendidikan sehingga berkurangnya akses ke pendidikan berkualitas dan seringkali harus putus sekolah pada usia dini. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi dana pendidikan kepada nelayan miskin dan meningkatkan pendapatan nelayan sehingga keluarga nelayan memperoleh pelayanan pendidikan yang lebih baik.

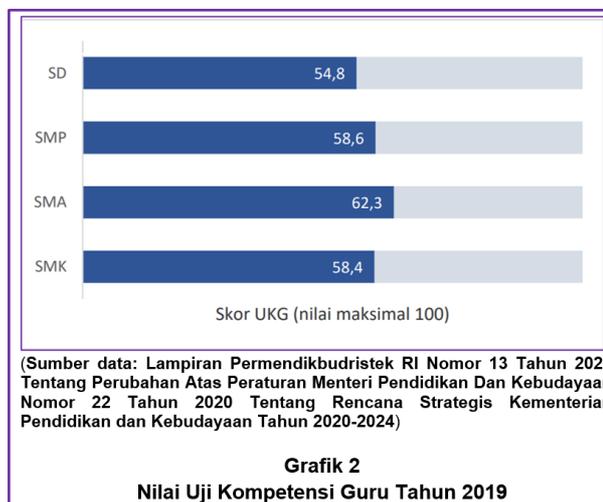
3) Aspek Sosial. Ada banyak hal dari aspek sosial yang bisa memengaruhi belum optimalnya pemberdayaan masyarakat pesisir di bidang pendidikan sehingga pendidikannya masih rendah, antara lain:

a) Ketersediaan guru di sekolah-sekolah pesisir masih terbatas baik dari jumlah maupun kompetensinya. Secara nasional, ketersediaan guru ASN di sekolah-sekolah dapat dilihat pada

**Grafik 1 Bab II halaman 20** sebelumnya, sebagai berikut:



Dari data diatas, sebagai contoh pada satuan pendidikan SD dengan jumlah 130.980 sekolah, terdapat 33.939 sekolah (26%) **sangat kekurangan Guru ASN**. Kemudian terdapat 90.095 sekolah (68,78%) **kekurangan Guru ASN**, dan hanya 5.968 sekolah (4,55%) dengan **Guru ASN memadai**. Berdasarkan data tersebut, dapat memberikan argumentasi bahwa memang masih terjadi kekurangan guru ASN di sekolah-sekolah Indonesia, termasuk di sekolah-sekolah pesisir. Belum lagi, keterbatasan sarana prasarana kebutuhan hidup dasar yang diterima guru di daerah pesisir atau bahkan terpencil dan terluar membuat semangat mengajar guru menjadi berkurang. Selanjutnya, guru di sekolah-sekolah Indonesia juga mempunyai kompetensi yang masih rendah, seperti terlihat pada **Grafik 2 Bab II halaman 20** sebelumnya, sebagai berikut:



Terlihat dari grafik di atas, bahwa nilai Ujian Kompetensi Guru (UKG) untuk guru SD dengan rata-rata nilai 54,8 dan UKG guru SMP sebesar 58,6 dari skor target nilai 100. Dari data hasil UKG ini cukup memberikan alasan bahwa kompetensi guru-guru di Indonesia masih rendah, dan perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Data lain dapat dilihat pada **Lampiran VI**, sebagai berikut:

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI

**KONDISI SEKOLAH TERAKREDITASI B DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020**

Sekolah	Rasio Siswa Rombel	Rasio Siswa Ruang Kelas	Rasio Siswa Guru	% Guru Kualifikasi	% Guru Sertifikasi	% Guru PNS	% Ruang Kelas Layak	Laboratorium IPA	Perpustakaan	Internet	Sanitasi Siswa
	Standar										
	Maks 28/32	Maks 28/32	Maks 28/32	100	100	100	100	Min 1	Min 1	ada	Min 3
SDN Sarangmeduro 20315516	16,83	101	16,83	83,33	50	33,33	16,67	0	1	tdk ada	0
SDN Sambiyen 20315529	25,67	0	17,11	88,89	44,44	33,33	0	0	1	ada	1
SDN 2 Pamotan 20315594	24,67	59,2	21,14	71,43	64,29	50	41,67	1	1	tdk ada	0
SDN Wiroto 20315553	14	28	10,5	100	75	62,5	50	0	1	tdk ada	0
SMPN 2 Sedan 20315706	23,67	23,67	8,88	93,75	56,25	37,5	66,67	2	0	ada	18
SMPN 2 Bulu 20315732	24,57	16,44	8,82	77,78	55,56	66,67	100	4	1	ada	2

Lampiran VI adalah contoh sekolah SD dan SMP di Kabupaten Rembang yang terakreditasi B. Dari data terlihat bahwa terdapat banyak guru yang belum mempunyai kualifikasi S1/D4, bahkan ada yang masih berstatus guru honorer. Sebagai contoh, guru di SDN Sarangmeduro, hanya 83,33% guru yang berkualifikasi S-1/D4, hanya 50% bersertifikasi, dan hanya 33% di antaranya yang berstatus ASN/PNS.

b) Selain itu, jarak yang jauh antara sekolah dengan tempat tinggal masyarakat menjadi kendala bagi anak-anak di desa pesisir. Sebagai contoh yang terjadi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan, di mana terdapat beberapa pulau yang hanya memiliki sekolah SD, sehingga anak-anak nelayan

harus pergi ke kota untuk melanjutkan sekolah tingkat menengah bahkan SMA Terbuka<sup>118</sup>.

c) Faktor penyebab lainnya, bahwa masyarakat pesisir banyak yang kurang berpartisipasi dalam pendidikan yang ada di sekolah anaknya<sup>119</sup>. Padahal partisipasi sangat diperlukan dalam proses pendidikan.

d) Beberapa masyarakat pesisir memiliki kepercayaan dan tradisi yang dapat menghambat partisipasi dalam pendidikan. Misalnya, beberapa masyarakat pesisir masih percaya bahwa anak perempuan tidak harus pergi bersekolah, namun lebih baik mengurus rumah tangga.

e) Kondisi anak-anak nelayan yang tidak bersekolah atau putus sekolah juga dapat memengaruhi motivasi anak-anak di sekitarnya untuk tidak sekolah, terutama jika mereka tidak mendapatkan perhatian dan dukungan dari orang tua mereka.

f) Kemiskinan juga memengaruhi cara berpikir para orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya pada jenjang yang lebih tinggi dengan alasan lebih baik membantu orang tua menangkap ikan untuk memenuhi pendapatan keluarga.

Berdasarkan faktor-faktor penyebab tersebut, maka diperlukan langkah-langkah antara lain: *Pertama*, menambah jumlah dan kompetensi guru di wilayah pesisir, termasuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. *Kedua*, merubah status guru honorer menjadi ASN. *Ketiga*, mempermudah aksesibilitas ke sekolah. *Keempat*, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat nelayan terhadap pendidikan.

4) Aspek Teknologi. Aspek teknologi yang memengaruhi tingkat pendidikan di wilayah pesisir disebabkan sarana prasarana pendidikan di wilayah pesisir masih terbilang kurang memadai. Bahkan, pada wilayah-wilayah terpencil hanya tersedia sekolah dasar, sedangkan

<sup>118</sup> Khumairah Mansyur.(2019).Budaya Pendidikan Anak Pesisir di Wilayah Kepulauan Spermonde. Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran, Vol 1, No 2, Mei-Agustus, 2019.

<sup>119</sup> Ika Wahyuni Putri,et.al.(2023).Pesisir dan Masyarakat Pesisir. Makasar: CV. Tohar Media.hal 74.

jenjang sekolah menengah berada di kota. Sebagai contoh, di Pulau Podang-Podang Lompo hanya memiliki satuan pendidikan SD sehingga beberapa anak nelayan harus pergi ke kota untuk mendapatkan pendidikan menengah. Di kota tersebut tersedia SMA Terbuka, namun siswanya berasal dari pulau-pulau lain yang juga berprofesi sebagai nelayan sehingga tatap muka sekolah dengan guru hanya beberapa kali dalam sebulan karena akses ke kota yang jauh dan terbatas waktu<sup>120</sup>. Kurangnya sarana prasarana pendidikan di wilayah pesisir juga disebabkan oleh akses dan transportasi yang sulit menjangkau ke wilayah-wilayah pesisir<sup>121</sup>.

Selain itu, beberapa sekolah sudah tersedia kelas sesuai rombongan belajar, namun di antaranya mengalami rusak berat. Laboratorium dan perpustakaan juga belum tersedia di setiap sekolah. Sebagai contoh, dari sejumlah sekolah SD dan SMP terakreditasi B yang berada di wilayah pesisir Kabupaten Rembang seperti pada **Lampiran VI**, sebagian besar ditemukan sarana prasarana yang tidak memenuhi standar. Sebagai contoh SD Sarangmeduro, hanya 16,67% ruang kelas yang layak karena rusak berat, tidak ada Laboratorium IPA, dan sarana sanitasi/jamban yang tidak layak.

Menurut data Statistik Pendidikan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, tersedia kurang lebih 1,2 juta ruang kelas pada tingkat SD pada tahun ajaran 2021/2022. Jumlah tersebut kurang lebih sebanyak tiga kali dari jumlah ruang kelas di SMP. Penilaian ketersediaan ruang kelas di sekolah diukur berdasarkan jumlah dan juga kondisi/ keadaannya. Jika dibandingkan dengan tahun ajaran 2020/2021, jumlah ruang kelas yang rusak berat telah mengalami penurunan. Namun, jumlah ruang kelas yang dalam keadaan baik juga mengalami penurunan<sup>122</sup>. Terkait dengan ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang saat ini masih mengalami kekurangan, maka diperlukan langkah-langkah, yaitu: *Pertama*, perlu menambah

---

<sup>120</sup> Ibid.

<sup>121</sup> Ika Wahyuni Putri, et al. (2023). Pesisir dan Masyarakat Pesisir. Makasar: CV. Tohar Media. hal 75.

<sup>122</sup> Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Pendidikan Tahun 2022.

ketersediaan satuan sekolah di wilayah pesisir. *Kedua*, perlu meningkatkan jumlah dan kualitas sarana prasarana pendidikan lainnya seperti ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium. *Ketiga*, menyediakan fasilitas internet sesuai standar kebutuhan mbps/siswa.

**b. Kesehatan masyarakat yang belum berkualitas, seperti masih ditemukan penyakit menular, kekurangan gizi dan malnutrisi, serta masih adanya kematian ibu saat melahirkan, dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:**

1) Aspek Kebijakan Politik. Berdasarkan Pasal 2 Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan menjelaskan bahwa "*Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan dasar kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan*". Belum tercapainya kondisi kesehatan masyarakat seperti telah diuraikan sebelumnya, mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah belum mengimplementasikan kebijakan program SPM secara maksimal di wilayah pesisir. Lebih detail persentase SPM Bidang Kesehatan tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada **Lampiran V**.

Oleh karena itu, perlu langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama*, pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk fasilitas kesehatan, obat-obatan, dan tenaga kesehatan. *Kedua*, melaksanakan SPM bidang kesehatan 100%. *Ketiga*, melakukan penilaian kepatuhan terhadap regulasi SPM untuk memastikan bahwa Pemerintah Daerah serius dan memprioritaskan SPM Bidang Kesehatan. *Keempat*, memperkuat koordinasi bahwa data SPM sistem informasi di tingkat pusat untuk keperluan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan SPM.

2) Aspek Ekonomi. Pendapatan nelayan yang masih rendah memengaruhi tingkat kesehatan masyarakat pesisir. Masyarakat nelayan yang hidup dalam kemiskinan cenderung memiliki akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, makanan bergizi, air bersih, sanitasi yang baik, dan lingkungan yang sehat. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit menular,

malnutrisi, dan masalah kesehatan lainnya<sup>123</sup>. Untuk itu, perlu meningkatkan pendapatan nelayan sehingga memiliki kesempatan memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik dan juga perlu menambah subsidi dana kesehatan kepada masyarakat miskin.

3) Aspek Sosial. Kondisi tenaga kesehatan, lingkungan, dan budaya merupakan aspek sosial yang bisa memengaruhi tingkat kesehatan masyarakat pesisir yang masih rendah, antara lain:

a) Masih adanya keterbatasan tenaga dokter, dokter gigi dan apoteker di puskesmas. Secara nasional, per tanggal 1 April 2020, jumlah dokter umum dan dokter spesialis di rumah sakit hanya berjumlah 122.023 orang atau mengalami kekurangan sebanyak 8.182 orang dari kebutuhan ideal<sup>124</sup>. Kekurangan tenaga kesehatan juga berimbas terhadap ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit di wilayah pesisir. Faktor inilah yang memengaruhi SPM Bidang Kesehatan di wilayah pesisir masih belum memenuhi hak masyarakat.

b) Kondisi lingkungan pesisir yang buruk, seperti sanitasi yang tidak memadai, polusi air laut, dan kerusakan ekosistem, dapat memengaruhi kesehatan masyarakat pesisir.

c) Budaya dan tradisi masyarakat pesisir juga dapat memengaruhi kesehatannya, seperti kepercayaan pada pengobatan tradisional yang belum teruji manfaatnya.

Mengatasi permasalahan ini, maka perlu langkah-langkah pemecahannya yaitu: *Pertama*, meningkatkan jumlah dan kompetensi dokter yang bertugas di wilayah pesisir, termasuk menyediakan kebutuhan dasar hidupnya dan memberikan intensif yang lebih. *Kedua*, meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir terhadap kesehatan lingkungannya.

---

<sup>123</sup> World Health Organization.(2010).Social determinants of health. [https://www.who.int/health-topics/social-determinants-of-health#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/social-determinants-of-health#tab=tab_1), diakses pada tanggal 6 Juni 2023, pukul 08.52 Wib.

<sup>124</sup> Kemenkes.(2023).Data Onlie. <https://kemenkes.go.id>, diakses pada tanggal 18 Mei 2023, pukul 05.26 Wib.

4) Aspek Teknologi. Aspek teknologi yang memengaruhi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yaitu:

- a) Keterbatasan Fasyankes yang tersedia wilayah pesisir. Sampai dengan semester II tahun 2022, jumlah puskesmas di daerah terpencil dan sangat terpencil ada sekitar 10.374 unit atau sekitar 25% dari total puskesmas yang terregistrasi<sup>125</sup>. Selain itu, secara nasional, tingkat ketersediaan jumlah rumah sakit juga masih kurang yang ditandai dengan jumlah tempat tidur di Indonesia hanya sebesar 1,2 per 1000 penduduk, sementara itu, WHO mensyaratkan paling tidak 5 per 1000 penduduk<sup>126</sup>.
- b) Selain itu, layanan bidang kesehatan berbasis internet, misalnya aplikasi *mHealth*, *telemedicine* dan aplikasi lainnya belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir karena keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur teknologi.

Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah yaitu: *Pertama*, meningkatkan ketersediaan Fasyankes di wilayah pesisir termasuk kemudahan aksesnya. *Kedua*, menyediakan infrastruktur internet yang memadai agar masyarakat mampu mengakses aplikasi kesehatan berbasis internet. *Ketiga*, melengkapi jumlah rumah sakit dan ketersediaan tempat tidur.

**c. Kenaikan NTN masih terlalu kecil jika dibanding dengan target yang ditentukan dan faktanya masyarakat pesisir masih dalam kemiskinan, dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:**

- 1) Aspek Politik. Aspek kebijakan politik pemerintah yang memengaruhi pendapatan nelayan, antara lain:
  - a) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama pandemi *COVID-19* menurunkan permintaan ikan dan hasil perikanan lainnya, yang mengakibatkan penurunan harga dan pendapatan nelayan. PSBB juga menghambat aktivitas penangkapan ikan dan

---

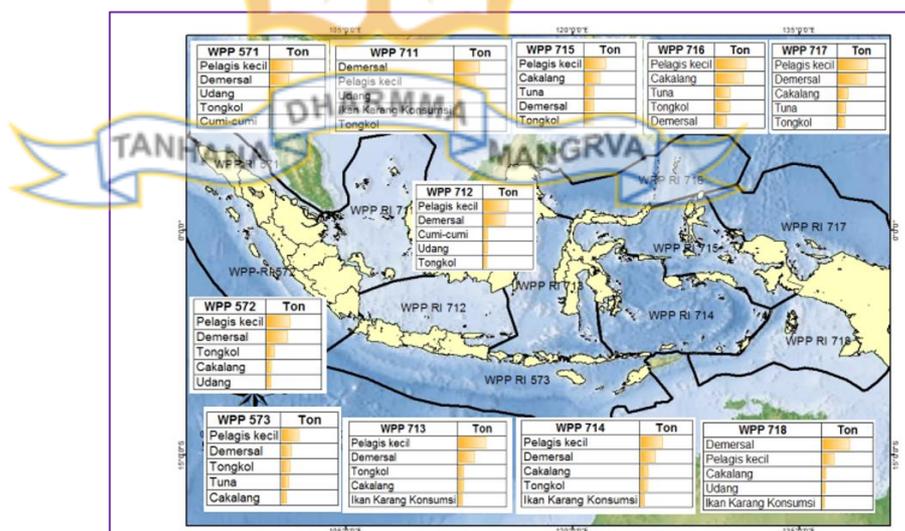
<sup>125</sup> Kemenkes.(2023).Data Onlie. <https://kemenkes.go.id>, diakses pada tanggal 18 Mei 2023, pukul 05.27 Wib.

<sup>126</sup> Kemenkes.(2023).Data Onlie. <https://kemenkes.go.id>, diakses pada tanggal 18 Mei 2023, pukul 05.30 Wib.

pengangkutan hasil tangkapan yang menyebabkan penurunan volume dan kualitas hasil tangkapan sehingga memengaruhi biaya operasional nelayan. Semua faktor ini menyebabkan pendapatan nelayan menurun dan biaya operasional meningkat, sehingga mengurangi keuntungan nelayan. Terlihat pada **Grafik 3**, bahwa NTN nelayan menurun dari tahun 2019 sebesar 106,94 menjadi 100,35 pada tahun 2020 atau turun sebesar (-6,59).

b) Kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat memengaruhi signifikan terhadap NTN. Harga BBM tinggi akan meningkatkan biaya produksi nelayan, sehingga harga ikan naik dan sebaliknya. Kenaikan harga BBM juga memengaruhi daya beli masyarakat terhadap produk ikan, sehingga harga ikan tidak laku di pasaran.

c) Adanya kebijakan penetapan WPPNRI sesuai yang diatur dalam PermenKP RI Nomor 18/Permen-Kp/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. WPPNRI dibagi dalam sebelas zona seperti nampak pada **Gambar 3 Bab II halaman 28**, sebagai berikut:



(Sumber data : Rancangan Renstra DJPT 2020-2024)

**Gambar 3**  
Proyeksi Tingkat Produksi Komoditas Utama per WPP 2020-2024

Kebijakan WPPNRI dapat berdampak positif dan negatif pada pendapatan nelayan. Secara positif, dapat meningkatkan hasil tangkapan dan mendorong manajemen perikanan yang lebih baik. Namun, juga dapat membatasi jumlah hasil tangkapan dan berdampak negatif pada pendapatan nelayan. Sebagai contoh, berdasarkan wawancara dengan ketua Asosiasi Nelayan Jaring Tarik Bergantung “Bhaita Adiguna” di Kabupaten Rembang pada tanggal 13 Mei 2023, menyatakan bahwa *“nelayan di pesisir Pantura, Kalimantan, dan Sulawesi memiliki Zona WPP 7.1.2. Potensi ikan di zona ini dapat dieksploitasi oleh semua nelayan, sehingga bisa over eksploitasi. Hasil tangkapan mungkin tidak sepadan dengan biaya operasional karena banyaknya nelayan. Untuk mempertahankan pendapatan, nelayan harus menangkap ikan di zona lain, namun berdasarkan ketentuan pemerintah harus mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan terdekat”*.

Ada beberapa problem yang dirasakan nelayan jika harus menangkap ikan lintas zona, antara lain: *Pertama*, biaya operasional menjadi lebih besar karena harus lintas zona WPP. *Kedua*, belum semua fasilitas pelabuhan ikan yang dituju sudah siap mendukung keperluan kapal dari luar zona. *Ketiga*, masyarakat setempat belum siap membeli ikan. *Keempat*, harga ikan di wilayah tersebut belum tentu sesuai harapan nelayan.

Menyelesaikan permasalahan tersebut di atas, maka diperlukan langkah-langkah sebagai solusi, yaitu: *Pertama*, pemerintah perlu memberikan bantuan/subsidi bahan bakar atau energi lainnya kepada nelayan. *Kedua*, pemerintah memberikan jaminan ketersediaan sarana prasarana dan infrastruktur jika nelayan mendarat di luar zonanya. *Ketiga*, pemerintah memberikan jaminan usaha nelayan ikan jika terjadi wabah penyakit ikan, bencana alam, dan dampak perubahan iklim. *Keempat*, pemerintah menjamin koordinasi dan terselenggaranya transaksi jual beli ikan antara nelayan lokal dengan nelayan yang mendarat di luar zonanya.

2) Aspek Ekonomi. Aspek ekonomi yang dapat memengaruhi tingkat pendapatan nelayan, antara lain:

- a) Harga jual ikan dipengaruhi oleh permintaan pasar dan pasokan ikan. Jika pasokan ikan banyak sedangkan permintaan pasar rendah, maka harga jual ikan akan turun sehingga pendapatan nelayan menurun.
- b) Akses pasar yang terbatas membuat nelayan sulit menjual hasil tangkapan ikan, sehingga pendapatan mereka akan menurun. Sebagai contoh Pelabuhan Perikanan yang tidak mempunyai TPI akan mempersulit nelayan menjual ikan hasil tangkapannya.
- c) Biaya operasional yang tinggi seperti biaya bahan bakar, perawatan kapal, dan peralatan perikanan dapat membebani nelayan sehingga pendapatan nelayan akan terganggu.

Untuk itu maka perlu langkah-langkah, antara lain: *Pertama*, pemerintah perlu menjamin sehingga harga ikan di pasar menguntungkan nelayan. *Kedua*, menjamin kesiapan akses pemasaran hasil ikan. *Ketiga*, mengendalikan biaya operasional yang diperlukan nelayan.

3) Aspek Sosial. Aspek sosial yang memengaruhi tingkat pendapatan nelayan yaitu kondisi cuaca dan iklim yang buruk seperti badai, gelombang besar, atau musim kemarau yang panjang. Kondisi tersebut dapat dipahami karena memang secara geografis Indonesia memiliki cuaca dan iklim yang khas. Oleh karena itu, perlu langkah-langkah sebagai solusi, yaitu: *Pertama*, menyediakan dan memberikan bimbingan aplikasi informasi perkiraan cuaca berbasis internet yang akurat. *Kedua*, mengubah cara pandang nelayan yaitu menangkap ikan harus menyesuaikan alam. *Ketiga*, mendorong usaha nelayan selain menangkap ikan di laut, seperti budidaya ikan, tambak garam, usaha mikro nelayan, dan profesi lainnya.

4) Aspek Teknologi. Aspek teknologi dalam hal ini sarana prasarana seperti jenis kapal perikanan, jenis alat tangkap, infrastruktur pelabuhan, dan lain-lain dapat memengaruhi tingkat produktivitas nelayan yang berkorelasi dengan pendapatan nelayan.

a) Kapal perikanan yang digunakan oleh nelayan Indonesia dapat pada **Tabel 4 Bab II halaman 23** sebelumnya, sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Jumlah Kapal Perikanan Laut Menurut Kategori dan Ukuran**

Jumlah Kapal Perikanan Tangkap Laut	2019	2020	2021
Total (Unit)	936.249	1.161.332	1.004.060
Perahu Tanpa Motor	192.653	159.417	136.848
Perahu Motor Tempel	427.309	503.955	476.484
Kapal Motor	316.287	497.960	390.728
Kapal Motor < 5 GT	201.924	388.618	29.6764
Kapal Motor 5-10 GT	708.86	64.708	54.398
Kapal Motor 10-20 GT	22.200	21.589	18.902
Kapal Motor 20-30 GT	16.964	17.652	14.238
Kapal Motor 30-50 GT	1130	975	1.010
Kapal Motor 50-100 GT	2.050	2.786	3.238
Kapal Motor 100-200 GT	1.126	1.616	2.162
Kapal Motor 200-300 GT	7	15	15
Kapal Motor 300-500 GT		1	1

(Sumber data : [statistika.kkp.go.id](http://statistika.kkp.go.id) Tahun 2023)

Dari data tersebut, menunjukkan bahwa kapal perikanan yang digunakan oleh nelayan Indonesia didominasi kapal-kapal kecil, yaitu perahu tanpa motor dan perahu motor tempel (**perahu**). Sebagai contoh, pada tahun 2021 jumlah total perahu sebanyak 613.332 unit, sedangkan jumlah Kapal Motor dari berbagai ukuran (5-500) GT sebanyak 390.728 unit. Kapal perikanan yang masih sederhana ini tentu akan terbatas dalam menangkap sejumlah ikan, sehingga pendapatan nelayan pun menjadi kecil.

Untuk membantu nelayan tradisional, pemerintah pusat atau daerah dapat membangun kapal perikanan modern yang lebih baik. Dalam merencanakan kapal bantuan, pendekatan "keberterimaan" harus diterapkan untuk memastikan bahwa kapal yang dibangun memenuhi kebutuhan penerima dan tidak ditolak. Hal ini dilakukan agar proses penyerahan kapal dapat berjalan lancar tanpa adanya masalah atau ketidakcocokan antara kebutuhan penerima dan kapal yang dibangun.

b) Alat tangkap ikan yang dipakai oleh nelayan yang masih tradisional turut memengaruhi hasil tangkap yang rendah. Kondisi inilah yang kemudian menjadi alasan nelayan menangkap ikan dengan cara merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan

bom atau racun. Mereka juga menangkap menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, seperti Cantrang dan Bubu, untuk menghasilkan lebih banyak ikan bahkan penangkapan *over fishing*. Mengatasi kondisi ini, maka perlu pembinaan kepada masyarakat untuk secara sadar tidak menggunakan alat tangkap ikan yang merusak dan menindas tegas bagi yang melanggarnya. Serta pemerintah menyediakan alat tangkap yang ramah lingkungan yang bisa diperoleh oleh nelayan dengan harga yang murah.

c) Keberadaan pelabuhan perikanan sangat membantu nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka karena dapat meningkatkan efisiensi dalam kegiatan perikanan dan memperluas jangkauan pasar untuk hasil tangkapan mereka. Selain itu, pelabuhan perikanan juga dapat berperan sebagai pusat informasi dan pelatihan bagi nelayan, yang membantu meningkatkan pengetahuan mereka tentang teknologi perikanan, manajemen sumber daya laut dan keamanan kerja di laut. Sebaran pelabuhan perikanan di Indonesia dapat dilihat pada **Gambar 1 Bab II halaman 24** sebelumnya, sebagai berikut:



Dari gambar di atas, di Indonesia terdapat pelabuhan perikanan sebanyak 814 lokasi, di mana 747 lokasi di antaranya merupakan PPI (Pelabuhan kelas C). Dari 814 pelabuhan

perikanan, 41,35% berada di Pulau Jawa dan sisanya di luar Pulau Jawa. Sebaran lokasi ini menunjukkan bahwa pelabuhan perikanan belum merata ke daerah-daerah sehingga produktivitas nelayan di daerah-daerah pun menjadi rendah. Selain itu, berdasarkan ketersediaan TPI di Indonesia, pada tahun 2022 terdapat 415 unit pelabuhan perikanan yang memiliki TPI dan 163 unit pelabuhan perikanan tanpa memiliki TPI. Dari 163 pelabuhan perikanan dengan TPI, 52,05% berada di Pulau Jawa, sedangkan 47,95% wilayah luar Jawa. Berdasarkan data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sarana prasarana untuk mendukung operasional nelayan masih terbatas sehingga memengaruhi pendapatan nelayan. Belum lagi jika dihadapkan dengan kebijakan pemerintah yang mengharuskan nelayan yang menangkap ikan di luar zona WPP, mendarat di pelabuhan terdekat, sementara pelabuhan perikanan di daerah masih terbatas dan TPI pun masih sedikit, sehingga nelayan dari luar zona kesulitan dalam menjual ikan hasil tangkapannya.

Belum lagi kondisi pelabuhan perikanan yang belum memadai akan menyulitkan operasional nelayan. Sebagai contoh, pelabuhan di Karanganyar Kabupaten Rembang seperti pada **Gambar 4** masih terdapat beberapa masalah. Survei yang dilakukan Penulis pada tanggal 13 Mei 2023, menunjukkan bahwa dermaga terasa goyah saat ombak datang, lampu penerangan tidak berfungsi di malam hari, fasilitas bongkar muat masih menggunakan tangga kayu yang konvensional, dan akses jalan rusak. Sehingga infrastruktur pelabuhan perlu diperbaiki untuk menjamin keamanan dan efisiensi operasional.

Melihat pentingnya keberadaan pelabuhan perikanan, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pihak swasta perlu menambah jumlah lokasi, kualitas dan sebarannya. Serta meningkatkan kemampuan pelabuhan perikanan yang sudah ada dengan cara melaksanakan perbaikan/pemeliharaan.



**Gambar 4**  
**Kondisi Pelabuhan Perikanan Karanganyar**  
**Kabupaten Rembang**

**d. Usaha masyarakat nelayan yang masih menggunakan teknologi tradisional, dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:**

- 1) Aspek Ekonomi. Ada beberapa pertimbangan sehingga nelayan bertahan menggunakan teknologi sederhana, yaitu:
  - a) Bagi usaha nelayan dengan pendapatan yang rendah kemungkinannya kecil untuk mampu membeli teknologi terbaru yang mahal. Sebaliknya, usaha nelayan dengan pendapatan yang lebih tinggi dapat membeli teknologi terbaru.
  - b) Jika teknologi baru dapat membantu menurunkan biaya produksi, maka usaha nelayan akan mengadopsinya. Namun, jika biaya teknologi lebih tinggi daripada manfaatnya, usaha nelayan mungkin tidak mampu untuk mengadopsinya.
  - c) Usaha nelayan yang memiliki akses ke pasar yang lebih besar mungkin lebih mampu untuk mengadopsi teknologi yang lebih canggih. Sebaliknya, usaha nelayan yang hanya beroperasi di pasar lokal mungkin tidak memiliki insentif untuk mengadopsi teknologi baru.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pemerintah perlu memberikan subsidi bagi nelayan yang akan pengadaan alat

produksi modern. Selain itu, masyarakat nelayan juga dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan yang lebih besar dengan jaminan hasil produknya dijual kepada perusahaan mitra.

2) Aspek Teknologi. Ada beberapa alasan mengapa nelayan belum memanfaatkan teknologi modern dalam proses memproduksi, antara lain:

- a) Keterbatasan akses terhadap teknologi modern.
- b) Biaya yang tinggi untuk membeli dan memelihara peralatan modern.
- c) Nelayan menggunakan teknologi tradisional karena mempertahankan tradisi turun-temurun.

Untuk itu, perlu dilakukan edukasi dan pelatihan gratis kepada nelayan sehingga secara tidak langsung memberikan kesadaran akan pentingnya penggunaan teknologi modern dalam proses produksi usaha masyarakat nelayan.

**e. Usaha nelayan yang masih mengalami kesulitan akses pemasaran hasil-hasil produksinya dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:**

1) Aspek Ekonomi. Aspek ekonomi yang memengaruhi lemahnya akses pemasaran hasil usaha masyarakat pesisir, yaitu:

- a) Kualitas produk yang rendah dapat membuat konsumen enggan untuk membeli atau merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain.
- b) Ketersediaan produk yang terbatas dapat membuat konsumen beralih ke produk lain yang lebih mudah diakses/dibeli.
- c) Persaingan yang ketat dari produk-produk serupa dapat membuat produk usaha nelayan sulit untuk bersaing di pasar.

Untuk itu, diperlukan langkah-langkah antara lain: *Pertama*, meningkatkan kualitas dan ketersediaan produk yang dihasilkan oleh usaha nelayan sehingga dapat meningkatkan daya saing di pasar. *Kedua*, menjalin kerjasama antara usaha masyarakat

nelayan dengan mitra penerima produk nelayan untuk menjamin produk usaha nelayan ada yang membeli.

2) Aspek Sosial. Aspek sosial yang memengaruhi kesulitan akses pemasaran dari usaha masyarakat nelayan, antara lain:

a) Budaya masyarakat pembeli yang lebih menyukai produk-produk yang dibuat secara tradisional, maka produk usaha masyarakat nelayan yang dibuat dengan teknologi modern mungkin kurang diminati.

b) Masyarakat setempat yang lebih cenderung membeli produk dari merek tertentu, maka produk usaha masyarakat nelayan yang sejenis mungkin kesulitan bersaing di pasar lokal.

3) Aspek Teknologi. Terdapat beberapa faktor teknologi yang memengaruhi kesulitan akses pemasaran produk usaha masyarakat nelayan, di antaranya:

a) Masih banyak daerah di Indonesia yang memiliki keterbatasan akses internet. Hal ini membuat usaha masyarakat nelayan sulit untuk memasarkan produknya secara *online*.

b) Beberapa usaha masyarakat nelayan tidak memiliki sumber daya atau keterampilan untuk membuat situs web atau memasarkan produk secara *online*.

c) Adanya persaingan pemasaran produk secara *online* yang semakin tinggi, terutama yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai kapasitas teknologi pemasaran berbasis digital.

d) Banyaknya platform pemasaran *online* menjadi tantangan bagi usaha masyarakat nelayan untuk memilih yang platform yang tepat agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

Agar pemasaran hasil produk usaha nelayan terekspos ke pembeli, maka perlu dilakukan langkah-langkah: *Pertama* digitalisasi usaha nelayan. *Kedua*, pemerintah harus menyediakan infrastruktur internet di wilayah pesisir secara memadai sehingga nelayan dapat mengakses platform digital. *Ketiga*, perlu

memberikan pelatihan kepada nelayan untuk mengaplikasikan platform secara *online*.

**f. Masih tingginya penangkapan ikan secara merusak (*destructive fishing*) dan *over fishing* dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:**

- 1) Aspek Politik. Aspek kebijakan yang menjadi faktor penyebab masih tingginya *destructive fishing* dan *over fishing*, antara lain<sup>127</sup>:
  - a) Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan.
  - b) Kurangnya kerja sama antara lembaga terkait yang bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik *destructive fishing* dan *over fishing*.
- 2) Aspek Ekonomi. Aspek ekonomi bisa menyebabkan nelayan melaksanakan *destructive fishing* dan *over fishing*, antara lain<sup>128</sup>:
  - a) Adanya permintaan pasar yang tinggi terhadap hasil tangkapan ikan tertentu, sehingga nelayan cenderung menggunakan metode penangkapan yang merusak lingkungan demi memenuhi permintaan pasar tersebut.
  - b) Biaya produksi operasional yang tinggi, sehingga nelayan cenderung menggunakan metode penangkapan yang lebih cepat meskipun metode tersebut merusak lingkungan.
  - c) Bahan-bahan peledak dijual bebas dan dengan harga murah membuat nelayan memilih jalan pintas.
- 3) Aspek Sosial. Aspek sosial turut memengaruhi sehingga nelayan melaksanakan *destructive fishing* dan *over fishing*, antara lain:
  - a) Pendidikan masyarakat yang rendah mempunyai korelasi terhadap kesadaran yang rendah pula akan pentingnya menjaga sumber daya ikan yang keberlanjutan.

---

<sup>127</sup> KKP.(2019).KepmenKP Nomor 114/KEPMEN-KP/2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak.

<sup>128</sup> Ibid.

b) Masyarakat pesisir dengan kondisi ekonomi yang buruk bisa melaksanakan penangkapan ikan dengan tidak ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Oleh karena itu, perlu memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya menjaga sumber daya ikan secara berkelanjutan dan meningkatkan ekonomi nelayan.

4) Aspek Teknologi. Aspek teknologi yang menyebabkan nelayan melaksanakan *destructive fishing* dan *over fishing* dapat disebabkan oleh belum adanya sarana tangkap pengganti sebagai alat tangkap ikan yang *sustainable* untuk mengubah pola tangkap *destruktif* masyarakat. Dengan demikian, perlu meningkatkan riset untuk menciptakan alat tangkap yang ramah lingkungan.

**g. Masih adanya kerusakan hutan mangrove di wilayah pesisir Indonesia, dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:**

1) Aspek Politik. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal menjadi faktor penyebab kerusakan hutan mangrove. Di samping itu, dengan banyaknya aktor pengawas, menjadi sulit untuk saling koordinasi dan saling lempar tanggung jawab. Untuk itu diperlukan sinergi antara pihak penegak hukum dan lembaga seperti KKP dan KemenLHK dalam mengawasi hutan mangrove.

2) Aspek Ekonomi. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kerusakan hutan mangrove dari aspek ekonomi antara lain:

a) Permintaan pasar yang tinggi terhadap produk hasil dari mangrove, seperti kayu bakar, arang, dan tambak udang dapat menjadi alasan nelayan memanfaatkan hutan mangrove yang tidak berkelanjutan.

b) Nelayan kurang mempunyai alternatif dalam mencari pendapatan sehingga mereka terpaksa mengambil sumber daya mangrove dengan cara tidak ramah lingkungan.

Dengan demikian, perlu mencari alternatif pendapatan atau usaha nelayan lainnya sehingga mereka tidak lagi memanfaatkan sumber daya mangrove dengan cara merusak.

3) Aspek Sosial. Berdasarkan data dari KLHK bahwa adanya kawasan yang direncanakan untuk membangun tambak, permukiman, dan industri merupakan penyebab berkurangnya lahan mangrove<sup>129</sup>. Untuk itu, dibutuhkan sinergi dalam upaya mencapai konservasi dan restorasi hutan mangrove.

### **15. Strategi Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Secara Terpadu Berbasis Konsep Ekonomi Biru Guna Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Dalam Rangka Ketahanan Nasional.**

Berdasarkan hasil pengukuran IKN, pada tahun 2021 dan 2022, seperti pada **Tabel 1 bab II halaman 15**, terlihat bahwa IKN dan Tannas Gatra Ekonomi cenderung stabil pada kondisi "**cukup tangguh**", namun belum mengalami peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu, memerlukan upaya-upaya strategis yang lebih konkret dalam pemberdayaan masyarakat pesisir untuk memperkuat Tannas agar mampu menghadapi berbagai tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang mungkin muncul di masa depan.

Selanjutnya, berdasarkan analisa dan pembahasan pada subpasal 14, *PEST analysis* dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab akar permasalahan belum optimalnya pemberdayaan masyarakat pesisir secara terpadu berbasis ekonomi biru. Oleh sebab itu, dalam merumuskan strategi optimalisasi perlu mempertimbangkan faktor-faktor penyebab dari aspek politik, ekonomi, sosial dan teknologi. Selanjutnya, perumusan strategi pada kajian ini didasari oleh kerangka berpikir sesuai dengan **Teori Optimalisasi**, yaitu untuk menjadikan proses pemberdayaan masyarakat pesisir mencapai hasil yang lebih baik dari yang sebelumnya dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada<sup>130</sup>. Sedangkan proses perumusan strateginya berdasarkan pada **Teori Strategi** sesuai dengan pendapat Alfred Chandler dan Anthony dan Govindarajan, dimana kedua pendapat tersebut sejalan dengan definisi **Kontemporer Strategi**, yaitu sebuah ilmu yang didasari oleh komponen tujuan (*Ends*), cara (*Ways*), dan sarana (*Means*)

<sup>129</sup> Atalya Puspa.(2022).Pada 2030, Pengurangan Lahan Mangrove Bisa Mencapai 261 Ribu Hektare.<https://mediaindonesia.com/humaniora/486614/pada-2030-pengurangan-lahan-mangrove-bisa-mencapai-261-ribu-hektare>, diakses pada tanggal 5 Juni 2023, pukul 14.40 Wib.

<sup>130</sup> Airlangga, A. S., & Darsono, D.(2019).Pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan restoran seafood. Jurnal Manajemen Pemasaran Petra, 7(1), 1-12.

yang dilaksanakan dalam suatu rentang waktu (*Timeline*), distribusi tugas (*Tasking*), dan pengukuran keberhasilan (*Metrics*), serta diproyeksikan untuk menjaga keseimbangan ketiga komponen<sup>131</sup>. Berikut strategi optimalisasi pemberdayaan masyarakat pesisir secara terpadu berbasis konsep ekonomi biru:

a. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat pesisir melalui pembuatan kebijakan khusus tentang percepatan Wajib Belajar 12 tahun, pembangunan sarana prasarana pendidikan, peningkatan bantuan dana pendidikan bagi keluarga nelayan miskin, sistem bapak angkat pendidikan, peningkatan jumlah dan kompetensi guru di wilayah pesisir termasuk pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan.

Strategi ini dapat dilakukan dengan cara kerjasama dan koordinasi dengan melibatkan DPR, Kemenkeu, KemenDesPDTT, Kemendikbudristek, KemenPUPR, KKP, Pemerintah Daerah, Swasta, LSM, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan para nelayan. Selain itu, adanya program Wajar dan dana BOS menjadi kekuatan dalam mendukung strategi tersebut.

Strategi dapat dilaksanakan dalam rentang waktu 1-5 tahun, dengan indikator keberhasilan strategi yaitu: meningkatnya sarana prasarana pendidikan, tersalurnya dana bantuan pendidikan secara efektif dan efisien, meningkatnya prosentase anak-anak nelayan yang menyelesaikan program Wajar 12 tahun, meningkatnya kualitas pendidikan, meningkatnya ketersediaan guru dan kompetensinya, dan meningkatnya kesadaran masyarakat pesisir terhadap pendidikan, serta terwujudnya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

b. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat pesisir melalui peningkatan ketersediaan Fasyankes, peningkatan bantuan dana kesehatan bagi nelayan miskin, pemenuhan jumlah tenaga dokter dan kompetensinya, peningkatan kualitas lingkungan pesisir, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat.

Strategi ini dapat dilakukan dengan cara kerja sama dan koordinasi dengan melibatkan Kemenkes, Kemenkeu, KKP, KemenPUPR, Pemerintah

---

<sup>131</sup> Ibid.

Daerah, LSM, Swasta, dan masyarakat. Selain itu dengan adanya program JKN dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan kekuatan untuk mengsucceskan strategi ini.

Strategi dapat dilaksanakan dalam rentang waktu 1-5 tahun, dengan indikator keberhasilan strategi yaitu: meningkatnya ketersediaan Puskesmas, meningkatnya kuantitas dan kualitas dokter, meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan seperti kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan, serta terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. Meningkatkan pendapatan nelayan melalui kebijakan subsidi bahan bakar untuk nelayan, pengendalian harga komoditas bahan-bahan operasional yang dibutuhkan nelayan, pengendalian harga ikan, penyediaan informasi tentang cuaca, peningkatan kualitas dan kuantitas kapal perikanan, peningkatan ketersediaan pelabuhan perikanan khususnya di daerah-daerah, peningkatan ketersediaan Tempat Pelelangan Ikan, serta peningkatan riset alat tangkap yang ramah lingkungan.

Strategi ini dapat dilakukan dengan kerja sama dan koordinasi antara KKP, Kemenkeu, KemenPUPR, KemenESDM, Kemendikbudristek, BRIN, Kemeninfokom, Swasta, LSM dan masyarakat. Selain itu, guna suksesnya strategi ini, dapat memanfaatkan organisasi atau entitas di wilayah regional seperti ASEAN *Fisheries and Aquaculture Empowerment* dalam bentuk kerja sama atau mengikuti program-program yang diagendakan untuk pemberdayaan nelayan dalam meningkatkan pendapatannya. Adanya dana PNBK (Pendapatan Negara Bukan Pajak) dari sektor kelautan merupakan kekuatan yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Pusat, Daerah dan Kabupaten.

Strategi dapat dilaksanakan dalam rentang waktu 1-10 tahun, dengan indikator keberhasilan strategi yaitu: meningkatnya pendapatan nelayan, berkurangnya prosentase angka kemiskinan masyarakat nelayan, meningkatnya jumlah dan kapasitas kapal perikanan, meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur perikanan seperti pelabuhan perikanan, TPI, jalan, dan meningkatnya hasil riset alat tangkap yang memenuhi kebutuhan teknis dan standar.

d. Meningkatkan penggunaan teknologi modern dalam usaha masyarakat nelayan melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan teknologi modern, pemberian bantuan dana pengadaan peralatan produksi, peningkatan kerja sama antara nelayan dengan perusahaan alat modern, dan pelatihan peralatan produksi berbasis teknologi modern.

Strategi ini dapat dilakukan dengan cara kerja sama dan koordinasi antara KKP, KemenKop, KemenDesPDTT, Pemerintah Daerah, Lembaga Pembiayaan, BUMDes, KUD dan pihak-pihak lainnya yang bersentuhan dengan program-program pemberdayaan UMKM.

Strategi dapat dilaksanakan dalam rentang waktu 1-5 tahun, dengan indikator keberhasilan strategi yaitu: menurunnya biaya produksi, meningkatnya kualitas produk, meningkatnya daya saing, dan meningkatnya jumlah pesanan produk dari usaha masyarakat nelayan.

e. Meningkatkan akses pemasaran hasil produk usaha-usaha yang dilakukan nelayan melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur internet khususnya di daerah-daerah pesisir, pendampingan dan pelatihan digitalisasi usaha nelayan, peningkatan akses pasar dan informasi pasar, pengembangan jaringan usaha, identifikasi pasar dan perilaku pasar, dan peningkatan mutu produk dan kualitas kemasan.

Strategi ini dapat dilakukan dengan cara kerja sama dan koordinasi antara KKP, KemenDesPDTT, KemenKop, Kemeninfokom, Pemerintah Daerah, Lembaga Pembiayaan, BUMDes, KUD dan pihak-pihak lainnya yang bersentuhan dengan program-program pemberdayaan UMKM. Perkembangan teknologi internet dan infrastruktur yang sudah saat ini, termasuk ketersediaan platform pemasaran *online* akan menjadi kekuatan yang dapat dimanfaatkan dalam strategi ini.

Strategi dapat dilaksanakan dalam rentang waktu 1-2 tahun, dengan indikator keberhasilan strategi yaitu: meningkatnya digitalisasi usaha masyarakat nelayan, meningkatnya ketersediaan infrastruktur internet khususnya di daerah pesisir, meningkatnya penjualan produk usaha nelayan, meningkatnya jumlah pasar yang berhasil diakses oleh nelayan, dan meningkatnya penjualan produk usaha nelayan.

f. Menanggulangi *destructive fishing*, *over fishing* dan kerusakan hutan mangrove melalui peningkatan pengawasan dan penegakan hukum secara terpadu, pemberantasan penyelundupan bahan peledak, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian ekosistem laut, penggunaan alat tangkap ikan sesuai teknis dan standar, dan pengendalian pembukaanutupan hutan mangrove.

Strategi ini dilakukan dengan cara kerja sama dan koordinasi antara KKP, KemenLHK, TNI AL, POLRI, Bakamla, Kejaksaan Agung, Swasta, LSM, dan masyarakat. Selain itu, kerja sama antar negara di ASEAN melalui ASEAN *Sustainable Fisheries Development Action Plan* dapat dimanfaatkan untuk mendukung strategi ini.

Strategi dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1-2 tahun, dengan indikator keberhasilan, yaitu: menurunnya angka pelanggaran *destructive fishing*, menurunnya jenis ikan yang *over-exploited*, dan meningkatnyautupan lahan hutan mangrove.

g. Mensinergikan program-program pemberdayaan masyarakat di berbagai kementerian/lembaga dengan cara identifikasi tujuan dan sasaran, analisa kesesuaian program, identifikais peran dan tanggungjawab, serta dengan pendekatan komprehensif, holistik integral, multi sektor dan multi disiplin berbasis potensi wilayah pesisir dan berkesinabungan.

Strategi ini dilakukan dengan cara koordinasi dan kerjasama dibawah koordinator Kemenkomarves dengan melibatkan KKP, KemendesPDTT, Kemensos, Kemenkes, dan TNI AL.

Strategi dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1-2 tahun, dengan indikator keberhasilan antara lain: kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir yang saling bersinergi, saling memperkuat, dan efisien dalam penggunaan anggaran.

## BAB IV PENUTUP

### 16. Simpulan.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, telah ditemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kajian sebagai berikut:

a. Akar permasalahan dan akibat belum optimalnya pemberdayaan masyarakat pesisir secara terpadu berbasis konsep ekonomi biru, yaitu:

1) Dalam aspek pemberdayaan manusia di wilayah pesisir, terdapat beberapa akar permasalahan, yaitu: *Pertama*, masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pesisir dengan mayoritas lulusan SD. Hal ini dapat berakibat pada keterbatasan masyarakat memperoleh pekerjaan yang lebih layak, rendahnya kesadaran nelayan terhadap kesehatan, dan rendahnya kesadaran terhadap pendidikan. *Kedua*, masih ditemukan penyakit menular, kekurangan gizi, dan kematian ibu saat melahirkan. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya produktivitas kerja, kelahiran *stunting*, dan mempercepat penyebaran penyakit. *Ketiga*, capaian NTN masih relatif kecil dibandingkan dengan target yang ditentukan. Kondisi ini akan berakibat pada kesulitan nelayan memenuhi kebutuhan hidupnya dan terbatasnya memperoleh layanan kesehatan serta pendidikan yang lebih baik.

2) Akar permasalahan pada aspek pemberdayaan usaha masyarakat nelayan meliputi: *Pertama*, usaha masyarakat nelayan masih menggunakan teknologi tradisional. Hal ini dapat berakibat pada rendahnya kualitas dan kuantitas produk, tidak efektif dan efisien, dan produk yang kurang kompetitif. *Kedua*, kurangnya akses pemasaran dari hasil produk usaha masyarakat nelayan, yang dapat berakibat hilangnya peluang pasar dan menurunnya penjualan.

3) Akar permasalahan pada aspek pemberdayaan lingkungan di wilayah pesisir Indonesia meliputi: *Pertama*, masih adanya praktik *destructive fishing* dan *over fishing*, dimana kondisi tersebut dapat berakibat pada kerusakan ekosistem laut dan menurunnya populasi ikan. *Kedua*, masih adanya kerusakan hutan mangrove di wilayah pesisir,

dimana kondisi ini dapat berakibat pada pengurangan sumber daya ekosistem mangrove dan hilangnya fungsi mangrove sebagai penahan abrasi dan erosi.

b. Anatomi permasalahan belum optimalnya pemberdayaan masyarakat pesisir secara terpadu berbasis konsep ekonomi biru, dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1) Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pesisir di mana mayoritas nelayan hanya lulusan sekolah dasar, dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: kurangnya pendanaan program Wajar, masih rendahnya pendapatan nelayan, terbatasnya jumlah dan kompetensi guru, keterbatasan aksesibilitas ke sekolah, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan, serta sarana prasarana pendidikan yang kurang memadai.

2) Kondisi kesehatan masyarakat yang masih rendah dengan masih ditemukan penyakit menular, kekurangan gizi dan malnutrisi serta kematian ibu saat melahirkan di masyarakat pesisir, dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: implementasi SPM Bidang Kesehatan yang belum optimal, rendahnya pendapatan nelayan sehingga terbatas memperoleh layanan kesehatan, keterbatasan tenaga dokter, kondisi lingkungan wilayah pesisir yang buruk, adanya kepercayaan pengobatan tradisional yang belum terbukti secara klinis, dan terbatasnya fasyankes.

3) Kenaikan NTN masih terlalu kecil jika dibanding dengan target yang ditentukan dan faktanya masyarakat pesisir masih dalam kemiskinan, dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: kebijakan kenaikan harga BBM, tingginya biaya kebutuhan operasional nelayan, fluktuasi harga ikan, kondisi cuaca yang tidak menguntungkan, keterbatasan Pelabuhan Perikanan dan TPI, serta kapal perikanan dan alat tangkap yang masih tradisional.

4) Usaha masyarakat nelayan yang masih menggunakan teknologi tradisional, dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: rendahnya pendapatan nelayan sehingga tidak menjangkau pengadaan teknologi modern, keterbatasan akses terhadap teknologi, dan tradisi

nelayan yang masih menggunakan teknologi tradisional secara turun-temurun.

5) Usaha nelayan yang masih mengalami kesulitan akses pemasaran hasil-hasil produksinya dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: rendahnya kualitas dan ketersediaan produk, adanya persaingan produk dari kompetitor, dan usaha nelayan belum memanfaatkan teknologi digital karena keterbatasan infrastruktur internet.

6) Masih adanya *destructive fishing*, *over fishing* dan kerusakan hutan mangrove dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum, kurangnya sinergi antar instansi yang berkepentingan, nelayan memperoleh bahan-bahan peledak dengan mudah, rendahnya pendidikan dan ekonomi masyarakat nelayan, serta masih digunakan sarana prasarana alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan.

c. Strategi yang dapat dilakukan dalam optimalisasi pemberdayaan masyarakat pesisir secara terpadu berbasis konsep ekonomi biru, antara lain:

1) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat pesisir melalui pembuatan kebijakan khusus tentang percepatan dan pendanaan Wajib Belajar 12 tahun, peningkatan bantuan dana pendidikan bagi keluarga nelayan miskin, sistem bapak angkat pendidikan, peningkatan jumlah dan kompetensi guru di wilayah pesisir termasuk pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan, serta pembangunan sarana prasarana pendidikan.

2) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat pesisir melalui peningkatan bantuan dana kesehatan bagi nelayan miskin, pemenuhan jumlah tenaga dokter dan kompetensinya, peningkatan kualitas lingkungan pesisir, peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, serta peningkatan fasyankes di wilayah pesisir.

3) Meningkatkan pendapatan nelayan melalui kebijakan subsidi bahan bakar untuk nelayan, pengendalian harga komoditas bahan-bahan operasional yang dibutuhkan nelayan, pengendalian harga ikan, penyediaan informasi tentang cuaca, peningkatan kualitas dan kuantitas

kapal perikanan, peningkatan ketersediaan Pelabuhan Perikanan khususnya di daerah-daerah, peningkatan ketersediaan TPI, serta peningkatan riset alat tangkap yang ramah lingkungan.

4) Meningkatkan penggunaan teknologi modern dalam usaha masyarakat nelayan melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan teknologi modern, pemberian bantuan dana pengadaan peralatan produksi, peningkatan kerja sama antara nelayan dengan perusahaan alat modern, dan pelatihan peralatan produksi berbasis teknologi modern.

5) Meningkatkan akses pemasaran hasil produk usaha masyarakat nelayan melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur internet khususnya di daerah-daerah pesisir, pendampingan dan pelatihan digitalisasi usaha nelayan, peningkatan akses pasar dan informasi pasar, pengembangan jaringan usaha, identifikasi pasar dan perilaku pasar, dan peningkatan mutu produk dan kualitas kemasan.

6) Menanggulangi *destructive fishing*, *over fishing* dan perusakan hutan mangrove melalui peningkatan pengawasan dan penegakan hukum secara terpadu, pemberantasan penyelundupan bahan peledak, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian ekosistem laut, penggunaan alat tangkap ikan sesuai teknis dan standar, dan pengendalian pembukaan tutupan hutan mangrove.

7) Mensinergikan program-program pemberdayaan masyarakat di berbagai kementerian/lembaga dengan cara identifikasi tujuan dan sasaran, analisa kesesuaian program, identifikais peran dan tanggungjawab, serta dengan pendekatan komprehensif, holistik integral, multi sektor dan multi disiplin berbasis potensi wilayah pesisir dan berkesinabungan.

## 17. Rekomendasi.

a. Kemendikbudristek bekerja sama dengan DPR RI merumuskan kebijakan khusus tentang percepatan pembangunan sarana prasarana pendidikan di wilayah pesisir, termasuk membangun sekolah berasrama bagi daerah pesisir yang tidak mungkin dibangun sekolah.

- b. Kemendikbudristek membuat program rekrutmen khusus untuk menarik lulusan pendidikan yang tinggal di wilayah pesisir sebagai guru setempat dan memberikan insentif seperti tunjangan khusus atau kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan lanjutan serta menyiapkan sarana kebutuhan dasar bagi guru di wilayah tersebut.
- c. Kemenkes, TNI Angkatan Laut dan Pemerintah Daerah bekerja sama untuk merencanakan dan mengusulkan penambahan Kapal Bantu Rumah Sakit TNI AL yang berfungsi sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bergerak untuk menjangkau daerah-daerah pesisir terpencil.
- d. KKP bekerja sama dengan KemenPUPR membangun Pelabuhan Perikanan terpadu beserta infrastrukturnya untuk mendukung rantai pasok hasil perikanan di daerah-daerah pesisir. Dalam operasionalnya, pelabuhan terpadu dapat dimanfaatkan oleh kepentingan KKP, TNI AL, Bakamla atau pihak-pihak terkait yang memiliki armada kapal.
- e. Kemeninfokom memperluas ketersediaan infrastruktur internet untuk mempercepat digitalisasi usaha masyarakat nelayan, pelatihan dan dukungan teknis, serta koneksi ke pasar digital sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha masyarakat nelayan.
- f. KKP meningkatkan kerjasama dengan TNI AL, Bakamla, Polri dan negara-negara tetangga di ASEAN untuk menanggulangi *destructive fishing* dalam satu pola operasi yang terpadu dan digelar sepanjang tahun.
- g. Kemenkomarves sebagai pemakarsa menyusun Grand Design Program Nasional Terpadu Pemberdayaan Desa Pesisir (PANDU DAYA DESIR), sesuai konsep pada **Lampiran VII**.

Jakarta, Agustus 2023

Penulis,

Siswanto, S.T., M.T.  
Kolonel Laut (T) NRP 11926/P

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Bambang Sutiyono.(2016).Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa. CV. Pustaka Setia.
- Badan Pusat Statistik RI.(2022).Statistik Pendidikan Tahun 2022.
- Faroham Syarif.(2020).Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Makro, Kecil dan Menengah. Makassar. Yayasan Barcode.
- Ika Wahyuni Putri,et.al.(2023).Pesisir dan Masyarakat Pesisir. Makasar: CV. Tohar Media.
- Johnson, G., at.al.(2019).Exploring Strategy: Text and Cases (11th ed.). Pearson.
- Keliat, Makmur, et.al.(2022).Prospek Ekonomi Biru Bagi Pemulihan Ekonomi Indonesia. LAB 45 Monograf. Jakarta: Laboratorium Indonesia 2045.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan.(2022).Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2022. Volume 1 Tahun 2022.
- Novia, D.S., et.al.(2022).Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia. Badan Pusat Statistik.
- Salma, W. O., et.al.(2021).Buku Referensi Potret Masyarakat Pesisir Konsep Inovasi Gizi & Kesehatan. Jogjakarta: Deepublish.
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato.(2019).Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik Bandung: Alfabeta.
- Tony M. Wijaya.(2018).Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro. PT. RajaGrafindo Persada.
- Tim Pokja Bahan Ajar BS Tannas.(2023).Ketahanan Nasional. Lemhannas: Direktorat Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional.
- Tim Pokja Bahan Ajar BS Strategi.(2023).Ketahanan Nasional. Lemhannas: Direktorat Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional.
- Wildani.(2022).Perencanaan Satuan Pendidikan Madrasah. NTB: Pusat Pendidikan dan Penelitian Indonesia.

**JURNAL**

- Agnew, D. J., et.al.(2009).Estimating the worldwide extent of illegal fishing. PLoS ONE, 4(2), e4570. doi: 10.1371/journal.pone.0004570.
- Arifin, Z.(2019).Kualitas Pendidikan di Daerah Pesisir Kabupaten Pacitan. Jurnal Administrasi Pendidikan, 6(1), 29-34.
- Airlangga, A. S., & Darsono, D.(2019).Pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan restoran seafood. Jurnal Manajemen Pemasaran Petra, 7(1), 1-12.
- Andi Muhammad Ihsan, et.al.(2020).Formal Child Education in the Fisherman Perspective of the Bajo Tribe in Bajo Village. Jurnal La Geografia Vol. 18 No 3 Juni 2020.
- Christensen, V., & Pauly, D.(1995).Fishing down marine food webs: It is far more pervasive than we thought. Bulletin of Marine Science, 57(2), 638-656.
- Didi Haryono, et.al.(2022).Pemberdayaan dan Pengembangan UKM Masyarakat Pesisir Berbasis Platform Digital. Jurnal Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.5, (3).hal. 544-553.
- Eko Setiawan, et.al.(2021).Peningkatan Produktivitas Makanan Khas Bangka Pada UMKM " Kakap" Menggunakan Teknologi Tepat Guna Di Nelayan 2 Sungailiat Kab.Bangka. Proseding Seminar Nasional Unimus, Vol 4, hal 2060-2066.
- Ernaningsih, et.al.(2023).Analisis Keberlanjutan Ikan Kerapau Sunu (P. Leonardus) Di Kepulauan Spermande Sulawesi Selatan. Jurnal Akuakultur, Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap dan Ilmu Kelautan Vol 6 No 1 Juni 2023 Hal.24-34.
- Giri, C., et.al.(2011).Status and distribution of mangrove forests of the world using earth observation satellite data. Global Ecology and Biogeography, 20(1), 154-159. doi: 10.1111/j.1466-8238.2010.00584.x.
- Hamsal, et.al.(2023).Pengembangan Ekonomi Nelayan Kepenghuluan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4, No. 1 Januari 2023, hal. 9-15.
- Hidayah, N. N., et.al.(2020).Penyediaan Infrastruktur Sekolah di Kawasan Pesisir Jawa Tengah. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, 12(2), 178-187.
- lin Nurlinawati & Rudi Hendro Putranto.(2020).Faktor-Faktor Penempatan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Daerah Terpencil/Sangat Terpencil. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Vol.4, (1).

- I Nengah, P.W.(2023).Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pendekatan Pengembangan Usaha Perikanan. *Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan*, Edisi Khusus 2023. Hal 91-95.
- Khumairah Mansyur.(2019).Budaya Pendidikan Anak Pesisir di Wilayah Kepulauan Spermonde. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran*, Vol 1, No 2, Mei-Agustus, 2019.
- Nugraheni, A. D., & Sudarsono, A.(2020).Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akses Pendidikan di Daerah Pesisir (Studi Kasus: Desa Kemiren, Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 15(2), 107-116.
- Nuraini Nuraini & Muhammad Firdaus.(2019).Kesehatan Nelayan di Indonesia: Sebuah Telaah Literatur. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2019.
- Pauli, G.(2010).*The Blue Economy: 10 years, 100 innovations, 100 million jobs*. Paradigm Publications.
- Siregar.(2016).Kesadaran Masyarakat Nelayan terhadap Pendidikan Anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol 4 (1). Hal 1-10.
- Sari, N. A., & Djam'an, S.(2021).Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anak Putus Sekolah di Desa Pesisir: Studi Kasus di Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(2), 132-143.
- Susilowati, I. H., & Azizah, F.(2020).Kekurangan gizi pada anak balita di wilayah pesisir Kabupaten Indramayu. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 80-91.
- Sahputra, H., & Koto, M. S.(2022).Sosialisasi Pelatihan Dan Pendampingan Pelaku Usaha UMKM di Desa Kebun Pisang Kabupaten Tapanuli Tengah. *COVIT (Community Service of Health)*, 2(2), 7-13.
- Pauly, D., et.al.(2002).Towards sustainability in world fisheries. *Nature*, 418(6898), 689-695. doi: 10.1038/nature01017.
- United Nations Development Programme.(2016).*Blue Economy: Concept and Opportunities*.
- Worm, B., et.al.(2009).Rebuilding global fisheries. *Science*, 325(5940), 578-585. doi: 10.1126/science.1173146.
- Yulianti, Debby Tri.(2019).Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Pengolahan Ikan Laut Di Kecamatan Kampung Melayu Oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Diploma Thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 90 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 40/Permen-Kp/2014 Tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/Permen-Kp/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan Yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik.

## **MATERI SLIDE/PAPARAN**

Direktur Jenderal Penangkapan Ikan.(2023).Refleksi 2022 & Outlook 2023. Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Djoharis Lubis.(2023).Konsep Demografi Dalam Pembangunan IKN Terhadap Issu Kependudukan. Materi Slide Paparan, disampaikan kepada PPRA 65 Lemhannas RI pada tanggal 23 Mei 2023.

## SUMBER INTERNET

Atalya Puspa.(2022).Pada 2030, Pengurangan Lahan Mangrove Bisa Mencapai 261 Ribu Hektare.<https://mediaindonesia.com/humaniora/486614/pada-2030-pengurangan-lahan-mangrove-bisa-mencapai-261-ribu-hektare>,diakses pada tanggal 5 Juni 2023, pukul 14.40 Wib.

Adi Ahdiat.(2022).Pelestarian Lingkungan Indonesia Tergolong Buruk di Asia Pasifik, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/25/>, diakses pada tanggal 11 Mei 2023, pukul 02.32 Wib.

CNBC Indonesia.(2021).Menteri KKP Trenggono: Jangan Ada Lagi Overfishing di NKRI!. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210717092719-4-261621/>, diakses pada tanggal 31 Mei 2023, pukul 05.26 Wib.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.(2016).Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016. <https://dinkes.jatimprov.go.id/userimage/dokumen>, diakses pada tanggal 10 Mei 2023, pukul 06.00 Wib.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.(2023).<https://kkp.go.id/djpt/infografis-detail/1281-pembiayaan-mikro-solusi-mudah-permodalan-nelayan>, diakses pada tanggal 22 Mei 2023, pukul 19.05 Wib.

Fika,N.U.(2021).Banyak Ikan Ditangkap Berlebihan, Komnas Kajiskan Minta Pemerintah Andalkan Data Stok. <http://money.kompas.com>, diakses pada tanggal 5 Maret 2023, pukul 17.00 Wib.

Glosarium Online.(2019).Apa itu terpadu? Pengertian terpadu dan definisinya dalam Glosarium, diakses pada tanggal 16 Maret 2023, pukul 07.30 Wib.

Hendra, S.(2022).Mendongkrak Kontribusi PDB Perikanan. <http://www.kompas.id>, diakses pada tanggal 5 April 2022, pukul 08.52 Wib.

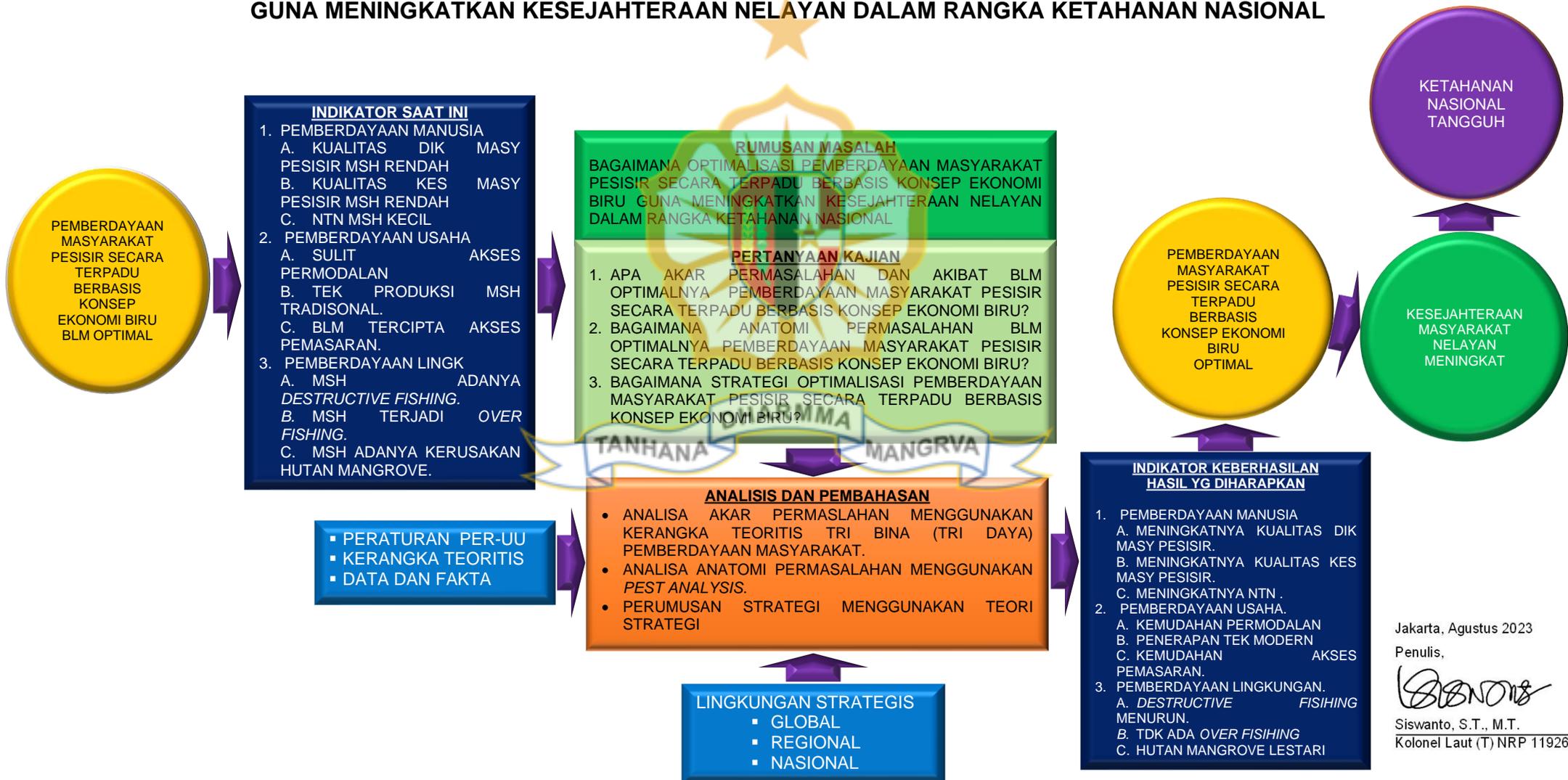
Heru Haetami.(2022).Angka Kemiskinan di Wilayah Pesisir Lebih Tinggi dan Kompleks, Upaya Pemerintah?, <https://kbr.id/nasional/122021/>, diakses pada 5 Maret 2023, pukul 18.04 Wib.

Kementerian Kelautan dan Perikanan.(2020).Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Sebagai Sistem Pertahanan Negara. <http://kkp.go.id>, diakses pada tanggal 09 Mei 2023, pukul 21.52 Wib.

- KemendesPDPTT.(2021).Bumdesa Bersama Selamatkan Aset Rp. 12,7 Triliun Dana Eks PNPM. <https://kemendes.go.id/berita/view/detil/4046/>, diakses pada tanggal 09 Mei 2023, pukul 22.01 Wib.
- Kementerian Desa PDPTT.(2023).Data *online*. <https://kemendes.go.id>, diakses pada tanggal 18 Mei 2023, pukul 11.19 Wib.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan.(2022).Verifikasi Kampung Nelayan Maju. <https://kkp.go.id/>,diakses pada tanggal 10 Mei 2023, pukul 04.07 Wib.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan.(2020).Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Sebagai Sistem Pertahanan Negara. <https://kkp.go.id/djprl/p4k/artikel/22501>, diakses pada tanggal 09 Mei 2023, pukul 21.52 Wib.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan.(2022).Verifikasi Kampung Nelayan Maju. <https://kkp.go.id/djpt/ppnprigi/artikel/38215>, diakses pada tanggal 10 Mei 2023, pukul 04.07 Wib.
- Kementerian Kesehatan.(2023).Data *online*. <https://kemenkes.go.id>, diakses pada tanggal 18 Mei 2023, pukul 05.26 Wib.
- Muhammad, N.S.(2021).KKP : Program Kampung Bahari Sejahterakan Masyarakat Pesisir. <https://ekonomi.republik.co.id>, diakses pada tanggal 10 Mei 2023, pukul 03.57 Wib.
- Penjaga Laut.(2021).Mengapa Destructive Fishing Marak Terjadi di Laut Indonesia. <http://jagalaut.id/>, diakses pada tanggal 5 Maret 2023, pukul 16.05 Wib.
- Portal Informasi Indonesia.(2022).Mengoptimalkan Digitalisasi UMKM. <https://www.indonesia.go.id/>, diakses pada tanggal 2 Juni 2023, pukul 08.07 Wib.
- Trisno Yulianto.(2023).Resolusi BUMDes 2023. <https://kompas.go.id>, diakses pada tanggal 18 Mei 2023, pukul 11.30 Wib.
- Themmy Doaly.(2023).Outlook KNTI: 80% Nelayan Kecil Berpendidikan di Bawah SMP, <https://www.mongabay.co.id/>, diakses pada tanggal 9 Juni 2023, pukul 06.55 Wib.
- World Health Organization.(2010).Social Determinants of Health. [https://www.who.int/health-topics/social-determinants-of-health#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/social-determinants-of-health#tab=tab_1), diakses pada tanggal 6 Juni 2023, pukul 08.52 Wib.
- Walhi.(2022).Jumlah Nelayan Indonesia Terus Menurun Akibat Perubahan Iklim dan Industri Ekstraktif. <https://www.walhi.or.id>, diakses pada tanggal 15 Mei 2023, pukul 20.45 Wib.

**ALUR PIKIR**

**OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR SECARA TERPADU BERBASIS KONSEP EKONOMI BIRU GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN NELAYAN DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL**



INDEKS KETAHANAN NASIONAL VARIABEL GATRA EKONOMI  
TAHUN 2021-2022

GATRA	DESEMBER 2021	DESEMBER 2022
<b>Ekonomi</b>	<b>2,61</b>	<b>2,62</b>
VARIABEL	DESEMBER 2021	DESEMBER 2022
Pangan (gatra Ekonomi)	3,36	3,36
Sandang	2,10	2,10
Perumahan	2,10	2,10
Pertambahan Kekayaan	2,70	2,70
Kemiskinan	2,60	2,60
Kesempatan Kerja	2,15	2,15
Pemerataan	2,50	2,50
Harga Umum	3,70	3,70
Pasar Uang	2,65	2,65
Pasar Modal	3,20	3,20
Neraca Perdagangan	2,40	2,40
Biaya Modal	3,20	3,20
Energi (gatra Ekonomi)	2,95	2,95
Infrastruktur	2,68	2,68
Investasi	3,00	3,30
Fiskal	1,50	1,50
Daya Saing Nasional	2,45	2,45
Teknologi	2,20	2,20
Efisiensi Pasar	1,50	1,50
Hak Kekayaan Intelektual	1,50	1,50

(Sumber Data: Profil Ketahanan Nasional (2021), (2022))

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIC INDONESIA

**INDEKS KETAHANAN NASIONAL VARIABEL GATRA SOSIAL BUDAYA  
TAHUN 2021-2022**

<b>GATRA</b>	<b>DESEMBER 2021</b>	<b>DESEMBER 2022</b>
<b>Sosbud</b>	<b>2,71</b>	<b>2,67</b>
<b>VARIABEL</b>	<b>DESEMBER 2021</b>	<b>DESEMBER 2022</b>
Ekstremisme	2,6	2,7
Pendidikan	2,95	2,39
Kesehatan	1,9	3,36
Keluarga	1,4	2,37
Kerukunan Sosial	2	1
Penyakit Sosial	2,25	3
Hak-Hak Sipil	3,4	1,3
Kesehatan Hub Industrial	2	
Nilai tradisional dan Universal	3	1,3
Perilaku Sosial	2,6	1,8
Kreasi Manusia dan Manfaat Iptek	2	1

(Sumber Data: Profil Ketahanan Nasional (2021), (2022))

Jakarta, Agustus 2023

Penulis,



Siswanto, S.T., M.T.

Kolonel Laut (T) NRP 11926/P

**PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PROGRAM-PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

No	Nama Program	Persamaan Dengan Program Lain	Perbedaan Dengan Program Lain	Kesimpulan	Rekomendasi
1	<p>Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PMP-PPK), KKP.</p> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kesiagaan bencana dan perubahan iklim.</li> <li>- Peningkatan kualitas lingkungan.</li> <li>- Pengembangan sarana prasarana sosial ekonomi.</li> <li>- Pengembangan kelembagaan masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempunyai persamaan dengan program PNPM pada kegiatan pengembangan sarana prasarana sosial ekonomi.</li> <li>- Mempunyai persamaan dengan PKH pada kegiatan pengembangan sarana prasarana sosial ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan.</li> <li>- Mempunyai persamaan dengan KALAJU pada kegiatan pengembangan sarana prasarana sosial ekonomi dan kualitas lingkungan.</li> <li>- Mempunyai persamaan dengan KBN pada kegiatan pengembangan sarana prasarana sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempunyai perbedaan dengan program PNPM pada kegiatan peningkatan kesiagaan bencana dan perubahan iklim dan peningkatan kualitas lingkungan, dan pengembangan kelembagaan masyarakat.</li> <li>- Mempunyai perbedaan dengan PKH pada kegiatan peningkatan kesiagaan bencana dan perubahan iklim dan pengembangan kelembagaan masyarakat.</li> <li>- Mempunyai perbedaan dengan KALAJU pada kegiatan peningkatan kesiagaan bencana dan</li> </ul>	<p>PMP-PPK mempunyai banyak persamaan dengan program PNPM, PKH, KALAJU, KBN, dan PPK.</p>	<p>Program PMP-PPK dapat dipadukan dengan PNPM, PKH, KALAJU, KBN, dan PPK.</p>

No	Nama Program	Persamaan Dengan Program Lain	Perbedaan Dengan Program Lain	Kesimpulan	Rekomendasi
		<p>ekonomi dan pengembangan kelembagaan masyarakat.</p> <p>- Mempunyai persamaan dengan PPK pada kegiatan peningkatan kesehatan.</p>	<p>perubahan iklim dan pengembangan kelembagaan masyarakat.</p> <p>- Mempunyai perbedaan dengan KBN peningkatan kesiagaan bencana dan perubahan iklim dan peningkatan kualitas lingkungan.</p> <p>- Mempunyai perbedaan dengan PPK pada kegiatan peningkatan kesiagaan bencana dan perubahan iklim, pengembangan sarana prasarana sosial ekonomi, dan pengembangan kelembagaan masyarakat.</p>		
2	<p>Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), KemendesPD TT. Kegiatan:</p> <p>- Peningkatan perekonomian desa.</p>	<p>- Mempunyai persamaan dengan program PMP-PPK pada pengembangan sarana prasarana sosial ekonomi.</p> <p>- Mempunyai persamaan dengan KBN pada</p>	<p>- Mempunyai perbedaan dengan program PMP-PPK pada kegiatan peningkatan kesiagaan bencana dan perubahan iklim, peningkatan kualitas lingkungan, dan pengembangan</p>	<p>PNPM mempunyai persamaan dengan program PMP-PPK dan KBN.</p>	<p>Program PNPM dapat digabungkan dengan PMP-PPK dan KBN.</p>

No	Nama Program	Persamaan Dengan Program Lain	Perbedaan Dengan Program Lain	Kesimpulan	Rekomendasi
		kegiatan peningkatan ekonomi.	kelembagaan masyarakat.  - Mempunyai perbedaan dengan program PKH pada semua kegiatan. - Mempunyai perbedaan dengan program KALAJU pada semua kegiatan. - Mempunyai perbedaan dengan KBN pada kegiatan peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, pengembangan usaha wisata bahari, dan pendayaan bidang pertahanan dan keamanan.  - Mempunyai perbedaan dengan program PPK pada kegiatan peningkatan akses kesehatan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.		

No	Nama Program	Persamaan Dengan Program Lain	Perbedaan Dengan Program Lain	Kesimpulan	Rekomendasi
3	Program Keluarga Harapan (PKH), Kemensos. Kegiatan: - Pemberian bantuan bersyarat berupa uang, barang atau jasa. - Pemberian bantuan Pendidikan. - Pemberian bantuan kesehatan. - Pemberian bantuan perumahan. - Pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempunyai persamaan dengan program PMP-PPK pada kegiatan pemberian bantuan pendidikan dan pemberian bantuan perumahan.</li> <li>- Mempunyai persamaan dengan program KALAJU pada kegiatan pemberian bantuan pendidikan, pemberian bantuan perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.</li> <li>- Mempunyai persamaan dengan program KBN pada kegiatan pemberian bantuan bersyarat berupa uang, barang atau jasa, pemberian bantuan pendidikan, pemberian bantuan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.</li> <li>- Mempunyai persamaan dengan program PPK pada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempunyai perbedaan dengan program PMP-PPK pada pemberian bantuan bersyarat berupa uang, barang atau jasa, pemberian bantuan Kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.</li> <li>- Mempunyai perbedaan dengan program KALAJU pada pemberian bantuan bersyarat berupa uang, barang atau jasa dan pemberian bantuan Kesehatan.</li> <li>- Mempunyai perbedaan dengan program KBN pada pemberian bantuan bersyarat berupa uang dan barang atau jasa.</li> <li>- Mempunyai perbedaan dengan program PPK pada kegiatan peningkatan akses kesehatan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, dan</li> </ul>	Program PKH mempunyai persamaan dengan program PMP-PPK, KALAJU, KBN dan PPK.	Program PKH dapat digabung dengan program PMP-PPK, KALAJU, KBN dan PPK.

No	Nama Program	Persamaan Dengan Program Lain	Perbedaan Dengan Program Lain	Kesimpulan	Rekomendasi
		kegiatan pemberian bantuan kesehatan.	pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.		
4	<p>Program Kampung Nelayan Maju (KALAJU), KKP.</p> <p>Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan sarana prasarana/fasilitas umum.</li> <li>- Peningkatan kesehatan lingkungan.</li> <li>- Peningkatan Pendidikan/pelatihan/pendampingan kepada Nelayan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempunyai persamaan dengan program PMP-PPK pada kegiatan perbaikan sarana prasarana/fasilitas umum dan peningkatan kesehatan lingkungan.</li> <li>- Mempunyai persamaan dengan program PKH pada peningkatan kesehatan lingkungan dan peningkatan Pendidikan/pelatihan/pendampingan kepada Nelayan.</li> <li>- Mempunyai persamaan dengan program KBN pada kegiatan perbaikan sarana prasarana/fasilitas umum, peningkatan kesehatan lingkungan, dan peningkatan pendidikan/pelatihan/pendampingan kepada Nelayan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempunyai perbedaan dengan program PMP-PPK pada kegiatan kesiapsiagaan bencana, dan kelembagaan masyarakat.</li> <li>- Mempunyai perbedaan dengan program PNPM pada kegiatan Perbaikan sarana prasarana/fasilitas umum, peningkatan kesehatan lingkungan, dan peningkatan pendidikan/pelatihan/pendampingan kepada Nelayan.</li> <li>- Mempunyai perbedaan dengan program PKH pada kegiatan Perbaikan sarana prasarana/fasilitas umum.</li> </ul>	Program KALAJU mempunyai persamaan dengan program PMP-PPK, PKH, KBN, dan PPK.	Program KALAJU dapat digabung dengan program PMP-PPK, PKH, KBN, dan PPK.

No	Nama Program	Persamaan Dengan Program Lain	Perbedaan Dengan Program Lain	Kesimpulan	Rekomendasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempunyai persamaan dengan program PPK pada kegiatan peningkatan kesehatan lingkungan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempunyai perbedaan dengan program KBN pada kegiatan Pendayaan bidang pertahanan dan keamanan.</li> <li>- Mempunyai perbedaan dengan program PPK pada kegiatan peningkatan akses kesehatan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.</li> </ul>		
5	Program Kampung Bahari Nusantara (KBN), TNI AL. Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pendidikan.</li> <li>- Peningkatan ekonomi.</li> <li>- Peningkatan kesehatan.</li> <li>- Pengembangan usaha wisata bahari.</li> <li>- Pendayaan bidang pertahanan dan keamanan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempunyai persamaan dengan program PMP-PPK pada peningkatan pendidikan, peningkatan ekonomi, peningkatan kesehatan, dan pengembangan usaha wisata bahari.</li> <li>- Mempunyai persamaan dengan program PNPM pada kegiatan peningkatan ekonomi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempunyai perbedaan dengan program PMP-PPK pada kegiatan Pendayaan bidang pertahanan dan keamanan.</li> <li>- Mempunyai perbedaan dengan program PNPM pada kegiatan peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, pengembangan usaha</li> </ul>	Program KBN mempunyai persamaan dengan program PMP-PPK, PNPM, PKH, KALAJU dan PPK.	Program KBN dapat digabung dengan program PMP-PPK, PNPM, PKH, KALAJU dan PPK.

No	Nama Program	Persamaan Dengan Program Lain	Perbedaan Dengan Program Lain	Kesimpulan	Rekomendasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempunyai persamaan dengan program PKH pada kegiatan pendidikan dan peningkatan kesehatan.</li> <li>- Mempunyai persamaan dengan program KALAJU pada kegiatan peningkatan Pendidikan dan peningkatan kesehatan.</li> <li>- Mempunyai persamaan dengan program PPK pada peningkatan pendidikan, Peningkatan ekonomi, Peningkatan kesehatan, dan Pengembangan usaha wisata Bahari.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>wisata Bahari, dan pendayaan bidang pertahanan dan keamanan.</li> <li>- Mempunyai perbedaan dengan program PKH pada kegiatan Pendayaan bidang pertahanan dan keamanan.</li> <li>- Mempunyai perbedaan dengan program KALAJU pada kegiatan Pendayaan bidang pertahanan dan keamanan.</li> <li>- Mempunyai perbedaan dengan program PPK pada kegiatan Pendayaan bidang pertahanan dan keamanan.</li> </ul>		
6	Program Pelayanan Kesehatan (PPK) di Wilayah Terpencil, Perbatasan Kemenkes. Kegiatan:	- Mempunyai persamaan dengan program PMP-PPK pada kegiatan peningkatan akses kesehatan, peningkatan	- Mempunyai perbedaan dengan program PMP-PPK pada kegiatan peningkatan kesiagaan bencana dan perubahan	Program PPK mempunyai persamaan dengan program PMP-PPK, PKH,	Program PPK dapat digabung dengan program PMP-PPL, PKH,

No	Nama Program	Persamaan Dengan Program Lain	Perbedaan Dengan Program Lain	Kesimpulan	Rekomendasi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan akses kesehatan.</li> <li>- Peningkatan mutu pelayanan kesehatan.</li> <li>- Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.</li> </ul>	<p>mutu kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempunyai persamaan dengan program PKH pada kegiatan pada kegiatan peningkatan akses kesehatan, peningkatan mutu kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.</li> <li>- Mempunyai persamaan dengan program KALAJU pada kegiatan pada kegiatan peningkatan akses kesehatan, peningkatan mutu kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.</li> <li>- Mempunyai persamaan dengan program KBN pada kegiatan pada</li> </ul>	<p>iklim, peningkatan kualitas lingkungan, pengembangan sarana prasarana sosial ekonomi, dan pengembangan kelembagaan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempunyai perbedaan dengan program PNPM pada kegiatan Peningkatan perekonomian desa.</li> <li>- Mempunyai perbedaan dengan program PKH pada kegiatan pemberian bantuan bersyarat berupa uang, barang atau jasa, pemberian bantuan pendidikan, pemberian bantuan kesehatan, pemberian bantuan perumahan, dan emenuhan kebutuhan dasar lainnya.</li> <li>- Mempunyai perbedaan dengan program KALAJU pada kegiatan Perbaikan</li> </ul>	KALAJU, dan KBN.	KALAJU dan KBN.

No	Nama Program	Persamaan Dengan Program Lain	Perbedaan Dengan Program Lain	Kesimpulan	Rekomendasi
		kegiatan peningkatan akses kesehatan, peningkatan mutu kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan bidang kesehatan.	<p>sarana prasarana/fasilitas umum, Peningkatan kesehatan lingkungan, dan Peningkatan Pendidikan/ pelatihan/pendampingan kepada Nelayan.</p> <p>- Mempunyai perbedaan dengan program KBN pada kegiatan peningkatan pendidikan, peningkatan ekonomi, pengembangan usaha wisata bahari, dan pendayaan bidang pertahanan dan keamanan.</p>		

Jakarta, Agustus 2023

Penulis,



Siswanto, S.T., M.T.

Kolonel Laut (T) NRP 11926/P

## STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2021-2022

NO	ITEMS	STANDAR	TA 2020/2021	TA 2021/2022	KET
<b>A</b>	<b>SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN</b>				
1	Jumlah Sekolah SD	Naik	148.743	148.992	Naik 249
2	Jumlah Sekolah SMP	Naik	40.597	41.402	Naik 805
3	Jumlah Sekolah SMA	Naik	13.865	14.007	Naik 142
4	Persentase Ruang Kelas SD Rusak Ringan/Sedang	0%	57,13%	60,60%	Naik
5	Persentase Ruang Kelas SMP Rusak Ringan/Sedang	0%	50,56%	53,30%	Naik
6	Persentase Ruang Kelas SMA Rusak Ringan/Sedang	0%	42,87%	45,23%	Naik
7	Rasio Murid per Rombel Sekolah SD	20-28	22,13	21,65	Turun
8	Rasio Murid per Rombel Sekolah SMP	20-32	28,91	28,82	Turun
9	Rasio Murid per Rombel Sekolah SMA	20-36	30,29	30,39	Turun
10	Rasio Perpustakaan Terhadap Jumlah Sekolah SD	100%	77,46%	-	
11	Rasio Perpustakaan Terhadap Jumlah Sekolah SMP	100%	95,64%	-	
12	Rasio Perpustakaan Terhadap Jumlah Sekolah SMA	100%	103,61%	-	
13	Persentase Guru SD Layak Mengajar	100%	94,90%	95,01%	Membaik
14	Persentase Guru SMP Layak Mengajar	100%	97%	97,43%	Membaik
15	Persentase Guru SMA Layak Mengajar	100%	97,50%	98,51%	Membaik
16	Rasio Murid-Guru SD	Maks 20	15	15,46	Jml murid naik
17	Rasio Murid-Guru SMP	Maks 20	14	14,37	Jml murid naik
18	Rasio Murid-Guru SMA	Maks 20	15	15,10	Jml murid naik
19	Persentase Ketersediaan Sanitasi SD (Dasar)	100%	40,80%	59%	Naik
20	Persentase Ketersediaan Sanitasi SMP (Dasar)	100%	52,50%	72%	Naik
21	Persentase Ketersediaan Sanitasi SMA (Dasar)	100%	59,54%	74%	Naik

NO	ITEMS	STANDAR	TA 2020/2021	TA 2021/2022	KET
<b>B</b>	<b>PARTISIPASI SEKOLAH</b>				
1	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	100%	106,20%	106,27%	Lebih
2	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat	100%	92,80%	92,11%	Kurang
3	Angka Partisipasi Kasar SMA/Sederajat	100%	85,23%	85,49%	Kurang
4	Angka Partisipasi Murni SD/Sederajat	100%	97,80%	97,88%	Kurang
5	Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat	100%	80,59%	80,89%	Kurang
6	Angka Partisipasi Murni SMA/Sederajat	100%	61,65%	61,97%	Kurang
<b>C</b>	<b>KEGIATAN PESERTA DIDIK</b>				
1	Persentase Serdik Usia 5-24 Menggunakan Internet	Ada	77,42%	77,76%	Naik
2	Persentase Serdik Umur 10-24 yang Bekerja	Tidak Ada	6,91%	6,53%	
3	Persentase Serdik Umur 10-24 yang Mengurus RT	Tidak Ada	39,34%	30,63%	
<b>D</b>	<b>HASIL DAN CAPAIAN PROSES PENDIDIKAN</b>				
1	Angka Melek Huruf Umur 15-24	100%	99,78%	99,80%	
2	Angka Naik Kelas 2 SD	100%	93,72%	-	
	Angka Naik Kelas 3 SD	100%	93,55%	-	
	Angka Naik Kelas 4 SD	100%	93,69%	-	
	Angka Naik Kelas 5 SD	100%	94,26%	-	
	Angka Naik Kelas 6 SD	100%	95,62%	-	
	Angka Naik Kelas 8 SMP	100%	95,47%	-	
	Angka Naik Kelas 9 SMP	100%	95,23%	-	
	Angka Naik Kelas 11 SMA	100%	94,90%	-	
	Angka Naik Kelas 12 SMA	100%	95,48%	-	
3	Angka Mengulang Jenjang Pendidikan SD/Sederajat	0	5,41	5,76	Naik
	Angka Mengulang Jenjang Pendidikan SMP/Sederajat	0	3,40	3,79	Naik
	Angka Mengulang Jenjang Pendidikan SMA/Sederajat	0	3,39	3,88	Naik
4	Angka Bertahan Kelas 6 SD/Sederajat	100%	93,89%	94,42%	Naik

NO	ITEMS	STANDAR	TA 2020/2021	TA 2021/2022	KET
5	Angka Melanjutkan ke SMP/Sederajat	100%	94,27%	89,78%	Turun
6	Angka Melanjutkan ke SMA/Sederajat	100%	89,14%	87,50%	Turun
7	Angka Putus Sekolah SD	0	0,12	0,13	Naik
8	Angka Putus Sekolah SMP	0	0,90	1,06	Naik
9	Angka Putus Sekolah SMA	0	1,12	1,38	Naik
10	Persentase Anak Tidak Sekolah usia 7-12		0,65	0,56	Turun
11	Persentase Anak Tidak Sekolah usia 13-15		6,77	6,94	Naik
12	Persentase Anak Tidak Sekolah usia 16-18		21,52	22,52	Naik
13	Tingkat Pendidikan Tertinggi yg Ditamatkan Penduduk Usia 15 ke Atas:				
	Tidak Pernah Sekolah	0%	3,31%	3,40%	Naik
	Tidak tamat SD	0%	10,56%	9,09%	Turun
	Tamat SD/Sederajat	0%	25,10%	24,83%	Turun
	Tamat SMP/Sederajat	0%	22,15%	22,56%	Naik
	Tamat SMA/Sederajat	0%	29,21%	29,97%	Naik
14	Rata-Rata Lama Sekolah Usia 15 Tahun ke Atas	9 Thn	8,97 Thn	9,08 thn	Naik
15	Tingkat Penyelesaian Sekolah Usia 13-15	100%	97,37%	97,82%	Naik
16	Tingkat Penyelesaian Sekolah Usia 16-19	100%	88,88%	90,12%	Naik

(Sumber Data: BPS, Statistik Pendidikan (2021), (2022))

Jakarta, Agustus 2023

Penulis,



Siswanto, S.T., M.T.

Kolonel Laut (T) NRP 11926/P

## LAMPIRAN V

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN NASIONAL  
MENURUT PROPINSI TAHUN 2021-2022

## 1. Tahun 2021

No.	Provinsi	1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	4. Pelayanan Kesehatan Balita	5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
1	2	4	5	6	7	8	9
1	ACEH	84.82%	86.84%	89.06%	76.26%	68.79%	56.00%
2	SUMATERA UTARA	80.53%	82.75%	84.67%	73.35%	57.70%	46.78%
3	SUMATERA BARAT	84.75%	86.45%	89.29%	77.60%	69.09%	51.47%
4	RIAU	91.55%	89.92%	91.77%	63.83%	54.02%	34.51%
6	SUMATERA SELATAN	85.79%	91.50%	90.55%	80.97%	84.99%	72.44%
7	BENGKULU	92.82%	91.58%	89.78%	74.68%	61.51%	52.36%
8	LAMPUNG	93.66%	92.35%	94.45%	72.96%	70.00%	49.89%
9	KEP. BANGKA BELITUNG	84.38%	89.23%	92.48%	85.63%	81.42%	79.12%
10	KEPULAUAN RIAU	87.53%	97.16%	91.25%	77.35%	49.17%	50.23%
11	DKI JAKARTA						
12	JAWA BARAT	94.93%	96.79%	98.24%	87.94%	72.61%	50.66%
13	JAWA TENGAH	95.43%	98.56%	98.31%	89.25%	74.80%	66.14%
14	DI YOGYAKARTA	96.68%	98.80%	89.63%	79.16%	61.61%	68.40%
15	JAWA TIMUR	88.57%	94.04%	95.56%	87.46%	70.21%	61.50%
16	BANTEN	91.77%	81.81%	97.21%	83.99%	72.72%	82.15%
17	BALI	91.57%	96.50%	99.21%	85.18%	65.72%	71.81%
18	NUSA TENGGARA BARAT	91.62%	93.43%	90.60%	82.58%	46.33%	66.61%
19	NUSA TENGGARA TIMUR	76.25%	82.12%	86.43%	67.44%	63.88%	42.46%
20	KALIMANTAN BARAT	84.18%	78.95%	88.41%	62.45%	38.44%	40.81%
21	KALIMANTAN TENGAH	90.05%	76.74%	90.90%	72.04%	64.05%	48.21%
22	KALIMANTAN SELATAN	85.69%	83.87%	95.56%	79.69%	70.72%	53.30%
23	KALIMANTAN TIMUR	91.85%	94.69%	94.19%	65.91%	65.47%	45.75%
24	KALIMANTAN UTARA	87.09%	86.25%	88.43%	54.41%	55.58%	32.43%
25	SULAWESI UTARA	93.00%	92.27%	92.82%	85.98%	66.49%	77.14%
26	SULAWESI TENGAH	80.26%	86.52%	89.21%	71.55%	38.80%	32.01%
27	SULAWESI SELATAN	89.78%	94.49%	96.25%	79.20%	78.50%	51.93%
28	SULAWESI TENGGARA	74.83%	79.93%	87.12%	61.40%	61.34%	45.09%
29	GORONTALO	74.18%	65.81%	79.84%	73.38%	66.41%	65.95%
30	SULAWESI BARAT	75.25%	76.62%	85.42%	61.32%	69.91%	48.39%
31	MALUKU	80.21%	68.61%	88.52%	69.11%	56.70%	44.54%
32	MALUKU UTARA	87.07%	83.09%	85.30%	65.65%	60.41%	50.98%
33	PAPUA	39.64%	42.85%	40.83%	36.07%	29.72%	21.98%
34	PAPUA BARAT	28.53%	26.97%	29.68%	14.90%	22.26%	23.65%
	<b>NASIONAL</b>	<b>83.02%</b>	<b>84.10%</b>	<b>87.36%</b>	<b>73.17%</b>	<b>62.55%</b>	<b>52.12%</b>

lanjutan...

No.	Provinsi	7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Hhuman Immunodeficiency Virus) Yang Bersifat Peningkatan/ Promotif dan Pencegahan/Preventif.
1	2	10	11	12	13	14	15
1	ACEH	65.27%	43.07%	77.69%	83.62%	48.09%	66.44%
2	SUMATERA UTARA	69.04%	40.72%	61.55%	66.53%	55.31%	46.09%
3	SUMATERA BARAT	70.90%	47.68%	82.85%	87.88%	57.49%	71.07%
4	RIAU	60.39%	29.31%	73.22%	68.40%	39.98%	54.40%
6	SUMATERA SELATAN	76.09%	69.77%	71.00%	82.54%	63.54%	58.60%
7	BENGKULU	53.35%	69.10%	72.24%	95.53%	33.82%	44.77%
8	LAMPUNG	70.24%	45.06%	76.71%	84.66%	69.62%	76.59%
9	KEP. BANGKA BELITUNG	80.06%	71.32%	97.21%	99.55%	68.11%	88.51%
10	KEPULAUAN RIAU	57.08%	57.23%	80.24%	88.13%	69.04%	89.01%
11	DKI JAKARTA						
12	JAWA BARAT	62.11%	52.81%	72.43%	77.80%	67.45%	74.44%
13	JAWA TENGAH	79.12%	65.45%	90.16%	85.51%	59.20%	90.38%
14	DI YOGYAKARTA	60.16%	46.15%	58.56%	87.60%	63.55%	83.39%
15	JAWA TIMUR	67.90%	46.28%	86.28%	89.35%	57.63%	78.59%
16	BANTEN	79.99%	67.72%	92.09%	89.20%	67.39%	69.73%
17	BALI	75.64%	53.54%	86.11%	74.74%	57.01%	86.07%
18	NUSA TENGGARA BARAT	64.64%	74.29%	74.36%	72.63%	43.78%	58.72%
19	NUSA TENGGARA TIMUR	58.97%	38.45%	63.98%	79.86%	77.09%	67.56%
20	KALIMANTAN BARAT	56.82%	40.33%	71.21%	71.80%	56.85%	70.34%
21	KALIMANTAN TENGAH	55.46%	54.24%	72.28%	91.40%	51.16%	55.73%
22	KALIMANTAN SELATAN	54.42%	49.90%	76.52%	93.60%	55.98%	78.89%
23	KALIMANTAN TIMUR	56.72%	48.08%	68.30%	88.05%	52.10%	80.98%
24	KALIMANTAN UTARA	42.00%	38.96%	69.65%	70.28%	86.37%	90.49%
25	SULAWESI UTARA	76.25%	83.24%	93.70%	98.94%	68.56%	71.41%
26	SULAWESI TENGAH	52.53%	31.38%	42.28%	62.67%	53.36%	59.15%
27	SULAWESI SELATAN	70.55%	50.32%	83.02%	84.08%	68.05%	87.40%
28	SULAWESI TENGGARA	68.90%	45.37%	64.53%	62.11%	66.74%	53.23%
29	GORONTALO	73.62%	69.72%	74.97%	76.67%	71.07%	76.73%
30	SULAWESI BARAT	52.22%	67.79%	86.81%	77.75%	51.97%	45.46%
31	MALUKU	58.96%	21.43%	42.51%	50.75%	42.42%	61.53%
32	MALUKU UTARA	66.41%	51.82%	64.25%	69.56%	51.81%	50.43%
33	PAPUA	31.75%	37.68%	29.67%	30.87%	39.21%	31.65%
34	PAPUA BARAT	25.84%	20.96%	24.70%	16.46%	32.68%	23.37%
	<b>NASIONAL</b>	<b>63.27%</b>	<b>49.81%</b>	<b>71.00%</b>	<b>76.50%</b>	<b>57.49%</b>	<b>66.38%</b>

(Sumber Data: Kemendagri, 2023)

## 2. Tahun 2022

No.	Provinsi	1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	4. Pelayanan Kesehatan Balita	5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
1	2	4	5	6	7	8	9
1	ACEH	85.78%	83.60%	86.98%	79.35%	82.92%	69.47%
2	SUMATERA UTARA	79.89%	79.57%	82.22%	75.17%	72.98%	64.43%
3	SUMATERA BARAT	92.14%	93.13%	94.14%	91.83%	93.17%	79.30%
4	RIAU	82.20%	83.19%	86.66%	72.62%	77.39%	56.34%
5	JAMBI	89.82%	88.60%	92.06%	83.01%	86.40%	80.78%
6	SUMATERA SELATAN	92.15%	92.32%	93.69%	84.36%	91.71%	71.64%
7	BENGKULU	77.93%	78.02%	77.67%	73.63%	79.28%	55.09%
8	LAMPUNG	93.47%	93.10%	95.24%	87.10%	89.18%	68.74%
9	KEP. BANGKA BELITUNG	89.46%	92.63%	95.72%	79.62%	95.32%	81.48%
10	KEPULAUAN RIAU	87.78%	88.01%	89.30%	85.41%	80.26%	74.63%
11	DKI JAKARTA						
12	JAWA BARAT	96.22%	96.59%	97.58%	90.67%	85.43%	72.68%
13	JAWA TENGAH	96.51%	97.74%	97.88%	95.20%	95.03%	85.09%
14	DI YOGYAKARTA	94.14%	96.28%	91.22%	89.70%	93.70%	79.11%
15	JAWA TIMUR	91.38%	93.71%	94.60%	92.37%	85.72%	84.12%
16	BANTEN	87.55%	88.63%	90.20%	89.27%	87.22%	85.64%
17	BALI	81.24%	82.98%	84.94%	85.16%	83.82%	76.50%
18	NUSA TENGGARA BARAT	87.11%	90.04%	91.86%	87.42%	90.34%	80.05%
19	NUSA TENGGARA TIMUR	29.46%	26.98%	29.42%	28.94%	29.92%	19.86%
20	KALIMANTAN BARAT	73.99%	71.29%	73.60%	64.37%	63.63%	46.90%
21	KALIMANTAN TENGAH	90.30%	83.33%	86.65%	73.34%	78.48%	64.15%
22	KALIMANTAN SELATAN	84.79%	87.86%	91.82%	87.34%	88.06%	67.50%
23	KALIMANTAN TIMUR	87.96%	90.77%	89.38%	72.62%	83.64%	62.03%
24	KALIMANTAN UTARA	86.60%	89.17%	90.05%	74.38%	72.46%	60.72%
25	SULAWESI UTARA	94.58%	94.13%	94.47%	92.00%	92.92%	81.66%
26	SULAWESI TENGAH	56.47%	60.46%	65.56%	57.70%	53.67%	44.23%
27	SULAWESI SELATAN	93.58%	95.44%	96.98%	88.72%	91.94%	81.13%
28	SULAWESI TENGGARA	49.32%	52.30%	55.89%	39.42%	45.54%	31.31%
29	GORONTALO	89.17%	90.77%	89.75%	86.28%	88.69%	83.67%
30	SULAWESI BARAT	65.96%	70.96%	74.06%	64.88%	48.73%	40.30%
31	MALUKU	56.31%	51.78%	56.13%	59.01%	59.02%	42.75%
32	MALUKU UTARA	66.03%	67.39%	73.22%	59.30%	53.27%	48.39%
33	PAPUA	19.23%	19.98%	20.23%	17.81%	16.00%	10.14%
34	PAPUA BARAT	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	<b>NASIONAL</b>	<b>76.76%</b>	<b>77.23%</b>	<b>79.00%</b>	<b>72.83%</b>	<b>73.20%</b>	<b>62.11%</b>

lanjutan...

No.	Provinsi	7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Yang Bersifat Peningkatan/ Promotif dan Pencegahan/Preventif.
1	2	10	11	12	13	14	15
1	ACEH	75.81%	65.34%	82.48%	85.40%	71.07%	71.33%
2	SUMATERA UTARA	71.98%	57.48%	73.10%	63.07%	64.15%	59.28%
3	SUMATERA BARAT	91.40%	74.24%	96.49%	96.88%	77.65%	91.60%
4	RIAU	66.41%	53.79%	90.61%	76.12%	82.74%	65.51%
5	JAMBI	84.99%	75.88%	91.82%	92.03%	85.36%	78.82%
6	SUMATERA SELATAN	87.14%	78.38%	80.28%	85.91%	77.54%	73.47%
7	BENGKULU	63.51%	50.49%	62.23%	75.39%	61.60%	52.59%
8	LAMPUNG	83.78%	67.24%	90.49%	84.62%	90.90%	89.65%
9	KEP. BANGKA BELITUNG	86.08%	80.60%	97.92%	96.57%	98.85%	97.33%
10	KEPULAUAN RIAU	74.22%	73.19%	90.30%	93.72%	73.98%	88.99%
11	DKI JAKARTA						
12	JAWA BARAT	81.87%	74.01%	87.32%	86.79%	91.10%	85.20%
13	JAWA TENGAH	90.35%	83.06%	97.44%	92.47%	90.19%	96.64%
14	DI YOGYAKARTA	77.26%	69.12%	73.49%	91.82%	95.43%	98.40%
15	JAWA TIMUR	84.96%	73.82%	94.64%	94.56%	92.58%	91.26%
16	BANTEN	83.92%	82.30%	90.09%	86.18%	85.85%	86.06%
17	BALI	77.13%	76.51%	83.89%	78.80%	77.15%	81.85%
18	NUSA TENGGARA BARAT	84.68%	93.41%	92.84%	82.06%	64.16%	82.43%
19	NUSA TENGGARA TIMUR	25.38%	18.58%	22.12%	33.02%	21.07%	26.92%
20	KALIMANTAN BARAT	62.16%	42.52%	70.80%	77.90%	70.36%	71.28%
21	KALIMANTAN TENGAH	68.60%	59.96%	81.34%	86.00%	67.67%	70.03%
22	KALIMANTAN SELATAN	74.22%	71.55%	95.14%	88.05%	69.78%	86.28%
23	KALIMANTAN TIMUR	71.69%	66.64%	79.05%	91.20%	85.82%	86.68%
24	KALIMANTAN UTARA	63.31%	56.44%	78.98%	80.78%	76.47%	87.66%
25	SULAWESI UTARA	91.39%	88.27%	93.58%	89.32%	86.84%	83.43%
26	SULAWESI TENGAH	53.43%	48.14%	46.48%	56.38%	47.96%	57.77%
27	SULAWESI SELATAN	85.11%	78.72%	96.03%	86.51%	91.59%	95.12%
28	SULAWESI TENGGARA	50.02%	25.33%	49.53%	45.58%	43.71%	36.86%
29	GORONTALO	86.17%	84.36%	95.26%	94.31%	91.79%	84.32%
30	SULAWESI BARAT	51.17%	46.70%	45.49%	57.67%	58.88%	55.78%
31	MALUKU	49.39%	30.46%	53.94%	60.06%	46.03%	42.37%
32	MALUKU UTARA	65.49%	40.11%	59.01%	46.91%	43.70%	43.25%
33	PAPUA	15.16%	19.34%	16.78%	17.06%	20.40%	20.75%
34	PAPUA BARAT	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	<b>NASIONAL</b>	<b>69.20%</b>	<b>60.42%</b>	<b>74.43%</b>	<b>73.88%</b>	<b>69.39%</b>	<b>70.12%</b>

(Sumber Data: Kemendagri, 2023)

Jakarta, Agustus 2023

Penulis,

Siswanto, S.T., M.T.

Kolonel Laut (T) NRP 11926/P

## KONDISI SEKOLAH TERAKREDITASI B DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020

Sekolah	Rasio Siswa Rombel	Rasio Siswa Ruang Kelas	Rasio Siswa Guru	% Guru Kualifikasi	% Guru Sertifikasi	% Guru PNS	% Ruang Kelas Layak	Laboratorium IPA	Perpustakaan	Internet	Sanitasi Siswa
	Standar										
	Maks 28/32	Maks 28/32	Maks 28/32	100	100	100	100	Min 1	Min 1	ada	Min 3
SDN Sarangmeduro 20315516	16,83	101	16,83	83,33	50	33,33	16,67	0	1	tdk ada	0
SDN Sambiyon 20315529	25,67	0	17,11	88,89	44,44	33,33	0	0	1	ada	1
SDN 2 Pamotan 20315594	24,67	59,2	21,14	71,43	64,29	50	41,67	1	1	tdk ada	0
SDN Wirotan 20315553	14	28	10,5	100	75	62,5	50	0	1	tdk ada	0
SMPN 2 Sedan	23,67	23,67	8,88	93,75	56,25	37,5	66,67	2	0	ada	18

Sekolah	Rasio Siswa Rombel	Rasio Siswa Ruang Kelas	Rasio Siswa Guru	% Guru Kualifikasi	% Guru Sertifikasi	% Guru PNS	% Ruang Kelas Layak	Laboratorium IPA	Perpustakaan	Internet	Sanitasi Siswa
	Standar										
	Maks 28/32	Maks 28/32	Maks 28/32	100	100	100	100	Min 1	Min 1	ada	Min 3
20315706											
SMPN 2 Bulu 20315732	24,57	16,44	8,82	77,78	55,56	66,67	100	4	1	ada	2
SMK Muhammdiyah Pamotan 20330117	29,17	23,33	21,08	100	75	6,25	100	0	1	ada	2

(Sumber data : Data Pokok Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, <https://dapo.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 3 Mei 2023, pukul 16.13 Wib).

Jakarta, Agustus 2023

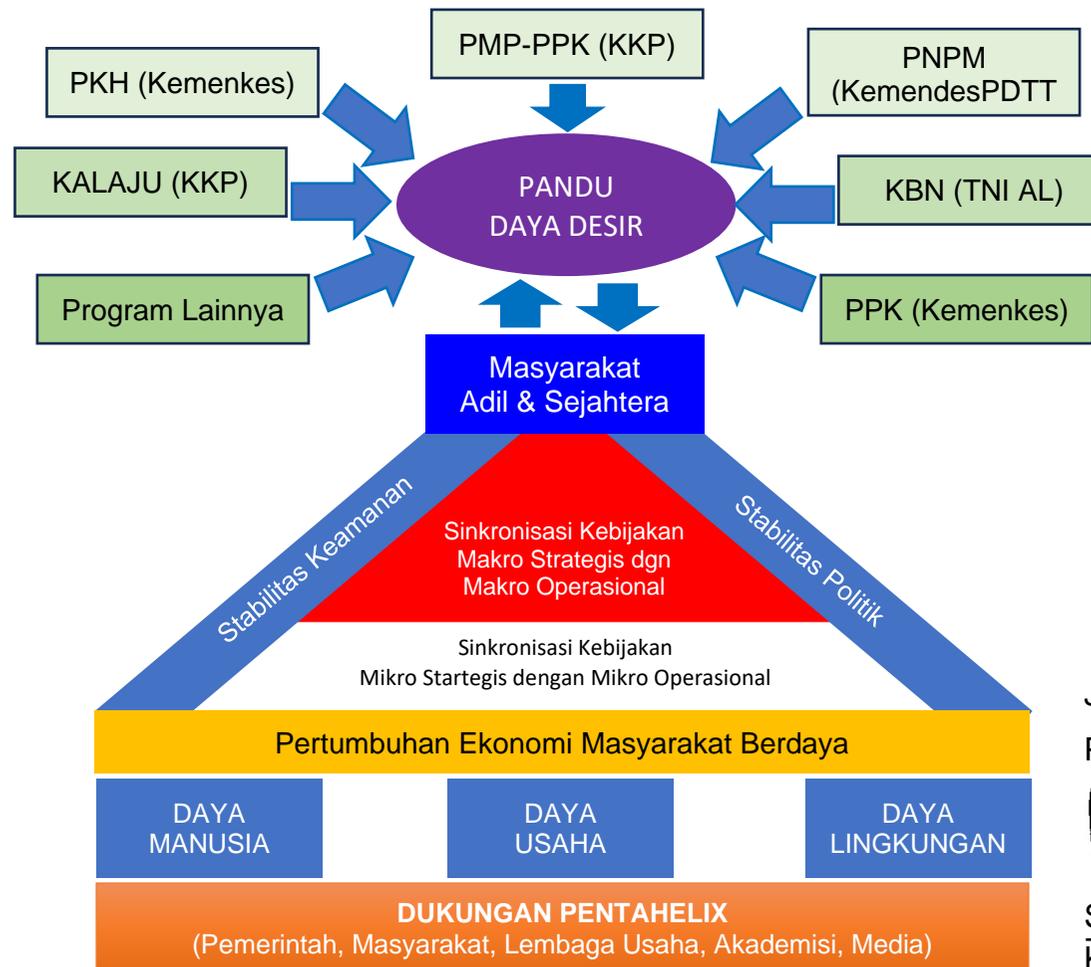
Penulis,



Siswanto, S.T., M.T.

Kolonel Laut (T) NRP 11926/P

**GRAND DESIGN PROGRAM NASIONAL TERPADU PEMBERDAYAAN DESA PESISIR (PANDU DAYA DESIR)**



Jakarta, Agustus 2023

Penulis,

Siswanto, S.T., M.T.

Kolonel Laut (T) NRP 11926/P

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Kolonel Laut (T) Siswanto, S.T., M.T.** lahir di Surabaya pada tanggal 17 Desember 1972 dan memiliki seorang istri bernama Masrukhah, S.Sos, serta tiga anak, yaitu: drg. Salsalia Siska Azizah, Muhammad Zahy Brilliantdy, dan Muhammad Sufi Religineer.

Setelah lulus dari SMA, Penulis melanjutkan pendidikan militer di Akademi TNI Angkatan Laut (AAL) dan lulus pada tahun 1995. Penulis memiliki gelar S-1 dari Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) yang diselesaikan pada tahun 2002, dan gelar S-2 dari ITS Surabaya yang diselesaikan pada tahun 2008.

Penulis juga menyelesaikan pendidikan pengembangan militer, yaitu pendidikan Staf dan Komando TNI AL (Seskoal) pada tahun 2010 dan pendidikan Staf dan Komando TNI (Sesko TNI) pada tahun 2020. Pada tahun 2023, Penulis mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV Lemhannas RI.

Sebagai Perwira TNI AL, Penulis pernah bertugas di beberapa KRI, yaitu: sebagai Asisten Perwira Divisi Motor Pokok di KRI Ahmad Yani-351, Kepala Divisi Motor Pokok di KRI Sungai Gerong-906, Perwira Motor Bantu di KRI Teluk Semangka-512, dan Kepala Departemen Permesinan di KRI Sutanto-877.

Penulis juga memiliki beberapa pengalaman kedinasan di pendirat, yaitu: sebagai Kasi Mesin Pendorong Pokok di Fasharkan V Surabaya, Kepala Mimbar Ajaran Teknik Mesin di AAL, Perwira Staf dan Pemeliharaan Material di Satuan Kapal Ranjau Koarmada II, Kepala Jurusan Teknik Mesin STTAL, Kepala Sub Dinas Klasifikasi dan Kepangkatan Militer di Dinas Personel TNI AL, Kepala Dinas Material dan Perbekalan Koarmada II, Direktur Pembinaan Seskoal, dan Asisten Logistik Pangkolinlamil. Penulis juga memiliki pengalaman dinas luar negeri sebagai Perwira Pengawas Bangunan Kapal Proyek Pengadaan Kapal PKR 10514 di Belanda selama 2 tahun dan 1,5 tahun di PT PAL Surabaya.

Penulis memiliki beberapa sertifikat, yaitu: Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Sertifikat Kelaikan Laut Militer, Sertifikat *Human Resources Management Professional*, Sertifikat *International Qualitative Research*, dan Sertifikat *International Quantitative Research*.

Beberapa penghargaan yang dimiliki Penulis antara lain: tanda jasa SL Kesetiaan VIII, XVI, dan XXIX Tahun, SL Kebaktian Sosial, SL Wira Dharma, SL Wira Nusa, SL Dharma Nusa, dan SL Jalasena Nararya.

Jakarta, Agustus 2023

Penulis,



Siswanto, S.T., M.T.

Kolonel Laut (T) NRP 11926/P